

**" PENGHULU-PENGHULU KERATON"
PERAN DAN KONFERENSI PENGHULU BIDANG AGAMA, HUKUM,
PENDIDIKAN DI KASUNANAN SURAKARTA DAN
MANGKUNEGARAN TAHUN 1936-1947.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Adab Dan Bahasa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora



Oleh:

Fariska Dwi Purbaningrum

183231020

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN BAHASA

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Fariska Dwi Purbaningrum
NIM : 183231020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab dan
Bahasa

Di UIN Raden Mas Said
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.WB

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan, kami selaku pembimbing memutuskan bahwa skripsi sdr :

Nama : Fariska Dwi Purbaningrum

NIM : 183231020

Judul : "PENGHULU-PENGHULU KERATON: PERAN DAN KONFERENSI
PENGHULU DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1936-1947"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 10 November 2022

Dosen Pembimbing



Latif Kusairi, M. A

NIP. 198410252018011001

PENGESAHAN

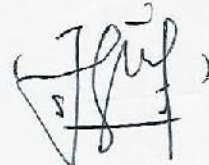
Skripsi dengan judul " Penghulu-Penghulu Keraton" Peran Dan Konferensi Penghulu Bidang Agama, Hukum, Pendidikan Di Kasunanan Surakarta Dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947 yang disusun oleh Fariska Dwi Purbaningrum telah di pertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab Dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada hari Rabu, 14 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A.
NIP. 198804302018012001



Penguji I

Merangkap Ketua : Moh. Ashif Fuadi, M.Hum.
NIP. 199003202019011007



Penjuji II

Merangkap Sekertarias : Latif Kusairi, S.Hum, M.A
(Pembimbing) NIP.198410252018001001



Sukoharjo. 14 Desember 2022

Mengetahui



Fakultas Adab dan Bahasa

Prof. Dr. Eto Suharto, S.Ag., M.Ag.

NIP.197104031998031005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Keluaga besar Sumarta, segenap Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya, Teman-teman seperjuanganku, dan Kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.

MOTTO

“Tidak semua yang engkau cintai akan membahagiakanmu, tidak semua yang engkau benci menyedihkanmu. Seperti pisau yang dapat melukaimu, dan obat yang pahit tapi dapat menyembuhkanmu”

(Habib Abdullah Bin Muhammad Bin Syihab)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fariska Dwi Purbaningrum

NIM : 183231020

Program studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Penghulu-Penghulu Keraton" Peran Dan Konferensi Penghulu Bidang Agama, Hukum, Pendidikan Di Kasunanan Surakarta Dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947 adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Sukoharjo, 14 Desember 2022

Yang Menyatakan



Fariska Dwi P.

NIM. 183231020

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami pajatkan atas Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Humaniora. Penulisan ini penulis mengkaji tentang : penghulu-penghulu Keraton

Proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Muh Fajar Shodiq, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama belajar di bangku perkuliahan.
4. Bapak Latif Kusairi, S.Hum., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh staf pengajar jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, karena berkat pengajaran dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Seluruh staf tata usaha akademik yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh staf perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaraan yang telah membantu dalam pencarian data terkait dengan penelitian ini.
8. Seluruh staf Monument Pers yang telah membantu dalam pencarian data terkait dengan penelitian ini.

9. Orang tua dan keluarga besar Sumarta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dan penelitian hingga menjadi tulisan.
10. Teman-teman yang telah membantu penulis untuk mencari data untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Skripsi ini tentunya memiliki banyak kekurangan baik dalam hal tulisan maupun pembahasan. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Sukoharjo, 1 Desember 2021

Fariska Dwi Purbaningrum.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Nota Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persembahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Keaslian	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	ix
Daftar Istilah.....	x
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka.....	17
E. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN SURAKARTA PADA ABAD 20	29
A. Islam Surakarta Abad 20.....	29
B. Kondisi Politik Islam Di Surakarta Pada Abad 20	37
C. Organisasi Pergerakan Islam Di Surakarta Pada Abad Ke 20	46
a. Sarekat Islam.....	47
b. Muhamadiyah.....	51
c. Sarekat Ngrukti Sawa.....	52
d. Nadhatul Muslimat.....	56
BAB III SEJARAH AWAL PENGHULU KERATON KASUNANAN SURAKARTA DAN MANGKUNEGARAN.....	58
A. Sejarah Awal Kemunculan Penghulu Di Keraton.....	58
B. Peran Penghulu Di Keraton Kasunanan Surakarta Dan Keraton Mangkunegaraan Di Bidang Keagamaan, Hukum, Dan Pendidikan.....	72
a. Peran Penghulu Di Bidang Keagamaan	72
b. Peran Penghulu Dalam Bidang Pendidikan.....	75
c. Peran Penghulu Dalam Bidang Hukum.....	84

Bab IV Perkumpulan Penghulu Di Keraton Surakarta	90
A. Awal Mula Terbentuknya Perkumpulan Penghulu Dan Pegawaiinya Di Keraton Kasunanan Surakarta Dan Kadipaten Mangkunegaran.....	90
B. Konferensi Penghulu Penghulu Di Keraton Kasunanan Dan Kadipaten Mangkunegaran	94
C. Dampak Dari Diadakan Konferensi Bagi Penghulu	99
 BAB V PENUTUP	101
a. Kesimpulan	101
b. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109

Abstrak

Penghulu merupakan gelar atau jabatan yang diberikan kepada orang yang ahli dalam bidang keagamaan di Keraton Surakarta. Keraton Surakarta terdiri dari Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran, kedua Keraton ini merupakan Keraton yang berbasis agama Islam. Penghulu di Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran memiliki peran yang cukup penting terutama dalam bidang keagamaan. Penghulu Keraton kasunana dan Mangkunegaran juga mengadakan pertemuan atau perkumpulan. Perkumpulan penghulu se Jawa Madura di latarbelakangi dengan adanya tekanan dari Belanda yaitu tentang perubahan peran penghulu yaitu dengan menghapus salah satu tugas penghulu yaitu pencabutan penangan hak waris yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 dan baru terlaksana tahun 1937. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran penghulu Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran yang pada abad akhir ke 19 dan awal abad ke-20 memiliki peran yang cukup penting bagi agama Islam di Keraton dan sekitarnya, selain itu penelitian ini juga akan membahas tentang mengapa dilakukan konferensi penghulu Surakarta pada tahun 1936 yang bertempat di pendopo Mangkunegran ?

Berikutnya penelitian ini juga menggunakan metode yang terdiri dari 4 tahapan penelitian yang pertama yaitu heuristik, Kritik, interpretasi yang terakhir yaitu historiografi yaitu penulisan sejarah. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan berbagai sumber yang didapatkan dari perpustakaan yang berupa arsip, koran, majalah, buku, jurnal, artikel, dan web yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang sejarah awal terbentuknya penghulu keraton Kasunanan dan keraton Managkunegaran, penghulu keraton merupakan jabatan yang telah diwariskan oleh kerajaan demak untuk kerajaan Islam berikutnya yaitu Mataram, Pajang, Kasunanan sampai dengan Mangkunegaran. Struktus birokrasi masih dipertahankan dengan adanya abdi daelm penghulu di dalamnya. Penghulu menjalankan tugas dibantu oleh beberapa staf diantaranya ada modin, kayim, muadzin, penghulu khakim, khatib, dll. Penghulu bertugas dalam berbagai bidang yaitu di bidang keagamaan yang meliputi dakwah, kepengurusan masjid Agung, dalam bidang hukum penghulu menjadi qodi untuk menyelesaikan perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), serta menyelesaikan persengketaan mawaris, bidang pendidikan para penghulu mendirikan sekolah. Penghulu juga mengadakan pertemuan pada setiap tahunnya dengan membahas program-program yang bersifat memajukan.

Kata kunci : Penghulu, keraton, Peran, Perkumpulan.

DAFTAR ISTILAH

Abangan	: Penganut Islam yang masih bercampur dengan agama Hindu-Budah atau muslim yang masih menjalankan tradisi dan ritual agama jawi.
Abdi Dalem	: Orang yang mengabdikan dirinya kepada Keraton dengan aturan yang ada.
Bangsawan	: Kelas tertinggi dalam masyarakat pra- moderen.
Chatin	: Orang yang bertugas mengkhitan laki-laki di Keraton.
Chatinah	: Orang yang bertugas mengkhitan perempuan di Keraton.
Gubernamen	: Pemerintah pada masa Belanda.
Katib	: Orang yang bertugas untuk melakukan kotbah di masjid.
Kejawen	: Kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama,
Kiai	: Orang yang ahli dalam bidang agama.
Landraad	: Pengadilan agama.
Modin	: Sebutan orang yang ahli di bidang agama untuk di kampung.
Muadzin	: Orang yang bertugas mengumandangkan adzan.
Naib	: Wakil penghulu.
Pamethakan	: Abdi dalem ulama.
Panembahan	: Gelar yang ada di Keraton dibawah sultan.
Pangulu	: Ulama abdi dalem.

Priester	: Sebutan ulama pejabat dimata orang-orang Eropa.
Priyai	: Kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan
Putihan	: Muslim yang taat beragama Islam (santri)
Residen	: Orang yang memimpin suatu tempat dalam tradisi kolonial.
Staatsblad	: Undang-Undang yang dibuat Belanda.
Surambi	: Pengadilan di Keraton.
Vorstenlanden	: Wilayah bagian dari kerajaan.
Wali	:Seorang yang dipercaya dan dianggap memiliki keterdekatan dengan Allah SWT.
Yogiswara	: Abdi dalem yang mengurus bidang keagamaan.
Zending	: Misi keagamaan yang dibawa oleh Belanda.
Rekso Rumecko	: Perkumpulan yang didirikan oleh H. Samanhoedhi untuk kegiatan tolong menolong.
Kecu	: Penjahat.

DAFTAR SINGKATAN

BU	: Budi Utomo
CSI	: Central Sarekat Islam
HBS	: Hollandsche Burgersholen
HIS	: Hollandsche Inlanddsche Scholen
MULO	: Meer Uitgbreit Lagere Onderwijs.
NDM	: Nadhatul Muslimat.
SD	: Sekolah Dasar.
SDI	: Sarekat Dagang Islam
SI	: Sarekat Islam
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SNS	: Sarekat Ngrukti Sawa
STAV	: Sidiq Tablig Amanah Fatonah.
STOVIA	: School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen.
VOC	: Vereenigde Oost-Indische Compagnie

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta

Tabel 1.2. Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Mangkunegaran.

Tabel 2.1. Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Bumiputra Angka Dua

Tabel 2.2. Jumlah Murid Yang Bersekolah Di HIS Dan Sekolah Lanjutan

Tabel 2.3. Jumlah Anggota SNS

Tabel 3.1. Struktur Kepengurusan Madrasah Mambaul Ulum Keraton Kasunanan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sinuhun Pakubuwana X bersama dengan permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu Mas dan KRT Pangulu Tafsiranom V sehabis melaksanakan shalat Jumat di Masjid Agung Surakarta Hadiningrat

Gambar 3.2 Suasana sidang di Jawa pada abad ke 20

Gambar 3.3 Murid- murid yang di terima di Madrasah Mambaul Ulum

Gambar 4.1 surat kabar yang mengabarkan tentang diadakanya konferensi naib di Mangkunegaran

Gambar 4.2 surat dari mangkunegaran yang berisi tentang telah dilaksanan koferensi penghulu yang bertempat di pendopo Mnagkunegaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surakarta merupakan kota yang banyak menyimpan hasil kebudayaan peninggalan kerajaan Islam, maka tidak heran jika masyarakat menyebut Surakarta sebagai pusat peradaban agama Islam yang ada di pulau Jawa. Selain menjadi pusat peradaban agama Islam Surakarta juga menjadi saksi kelahiran organisasi kebangkitan nasional, gerakan keagamaan, serta pusat nasionalisme yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal.¹

Islam di Jawa mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyak berdirinya Kerajaan Islam di Jawa yang meliputi Kerajaan Demak (1575-1546), Kerajaan Banten (1550-1757), Kerajaan Pajang sampai dengan Mataram Islam (1575-1757), yang kemudian pada tahun 1755 terjadi peristiwa *Palihan Negari* (pembagian wilayah kerajaan), peristiwa ini juga ditandai dengan Perjajian Giyanti yang berisi tentang pembagian wilayah kerajaan menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamangkubuwono I (Pangeran Mangkubumi), setelah terpecahnya kerajaan menjadi dua bagian, Kasunanan Surakarta harus membagi wilayahnya dengan Raden Mas Said, hal ini disebabkan karena Raden Mas Said yang telah bersedia mengakhiri perlawanan pada Sunan,

¹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Dinamika Radikalisme Dan Konflik Bersentimen Keagamaan Di Surakarta*, Studi Philoshopica Et Theologica, Vol. 10No. 2, tahun 2010, Hlm 259

sehingga lewat perjajian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757 Keraton Kasunanan Surakarta harus kembali berbagi wilayah dengan Keraton Mangkunegaran.²

Kerajaan-kerajaan di Surakarta secara formal merupakan kerajaan yang menganut kepercayaan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jabatan penghulu dan Abdi dalem *ngulama* dalam struktur birokrasi yang ada pada sistem pemerintahan kedua Keraton, berlakunya peradilan menurut syariat Islam, terdapat gelar *Khalifatullah Syaidin Panatagama* bagi sunan/raja, serta banyak dilakukannya peringatan hari-hari besar Islam seperti grebeg serta isra miraj.³

Kedekatan agama Islam dengan kedua Keraton ditunjukkan dengan dimasukkannya golongan santri dan ulama dalam struktur kekuasaan kerajaan. Santri dan ulama ditempatkan dalam bidang keagamaan kemudian mendapat julukan *Abdi dalem Pamethakan*⁴ atau *Golongan Putih* yang ditempatkan dilembaga administrasi yang disebut dengan *Reh Pengulon*, yang dipimpin oleh seorang penghulu ageng atau dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan dengan Penghulu Tafsir Anom⁵

² Ibid., Hlm 259

³ Supriadi, *Dinamika Kehidupan Relegius Era Kasunanan Surakartan*, (Jakarta: Litbang Pres, 2017), Hlm 47-48.

⁴ Abdi dalem Pamethakan atau Putih merupakan suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi golongan santri serta orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama Islam, istilah putih sendiri memiliki makna sebagai agama yang suci namun secara harfiah putih digambarkan sebagai warna yang putih yaitu dari pakaian yang digunakan oleh Abdi dalem pamethakan yang berwarna serba putih baik dari baju serta sarung yang digunakan untuk kegiatan berdakwah atau sehari harinya. Tidak hanya pakaian yang digunakan oleh para Abdi dalem pamethakan bahkan daerah perkampungan yang ditinggali oleh kyai, santri, serta orang yang memiliki pemahaman lebih tentang agama Islam itu disebut dengan kampung putihan.

⁵ Qayim Ismail, *Kyai Penghulu Jawa Peranya Di Masa Kolonial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Hlm 65.

Penghulu adalah suatu jabatan keagamaan yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam maupun dalam pelaksanaan ajaran agama Islam serta dalam hukum agama Islam yang ditaati oleh masyarakatnya.⁶ Sedangkan kata penghulu terdiri dari kata *hulu* yang berarti pemimpin, orang yang ahli dan dihormati. Namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan makna menjadi orang yang ahli dalam bidang keagamaan terutama dalam agama Islam. Penghulu menurut buku Ibnu Qayyim adalah ulama yang berkedudukan dibidang sosial keagamaan yaitu berada dijalur *at-tasyri' wal qodla* (aktivis sosial keagamaan yang berperan dalam bidang kehakiman yang menyangkut hukum syariat Islam). Sedangkan Penghulu menurut buku Ma'mun Pusponegoro penghulu adalah kepanjangan tangan dan lidah raja yang menjabat sebagai pemimpin (*Sayiddin Panatagomo*) dan sebagai panutan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam yang patut di teladani bagi seluruh rakyat kerajaan agar tercipta orang-orang yang bermoral dan berbudi pekerti luhur.⁷

Sejarah awal kemunculan penghulu sudah ada sejak zaman dahulu ketika kerajaan Islam mulai muncul di Jawa dan pada masa walisongo, diantara sembilan wali juga pernah ada yang menjabat sebagai penghulu diantaranya ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Di Kerajaan Demak, penghulu memiliki jabatan yang tinggi yaitu sebagai wali raja bersama dengan Patih (Perdana Menteri), Adipati (Pemimpin Militer). Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusuma

⁶ Muhammad Hisyam, 2005, *Potret Penghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian*, Wacana, Vol. 7 NO. 5, Hlm.27-31

⁷ Ma'mun Pusponegoro, *Kauman , Religi, Tradisi, dan Santr* , (Surakarta : Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, 2005), Hlm.35.

(1613-1645) Kiai penghulu ditanah Jawa menjalankan aktivitasnya di kerajaan dengan sebutan *Dewan Perampara* (Penasehat Kerajaan), kemudian pada masa selanjutnya, yaitu setelah kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman juga dijumpai lembaga keagamaan yang disebut dengan kepengulon yang diduduki oleh *Abdi dalem Pamethakan* atau *Abdi dalem Yogaswara* yang dikepalai oleh *Penghulu Kepala* atau *penghulu agung*. Jabatan penghulu di wilayah Keraton berlangsung lama, hal ini dapat dilihat ketika orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia masih menjumpai apa yang disebut dengan penghulu, namun dengan nama *opper-priester* dan *chieft priest*. *Priester* atau *Prieset* memiliki arti orang yang menjabat sebagai ulama pejabat, tetapi orang Sunda menyebutnya dengan *Pangulu*, orang Jawa menyebutnya dengan *Pengulu*, orang Madura memanggilnya *pangulon*, sementara orang Melayu dikenal dengan *penghulu*.⁸

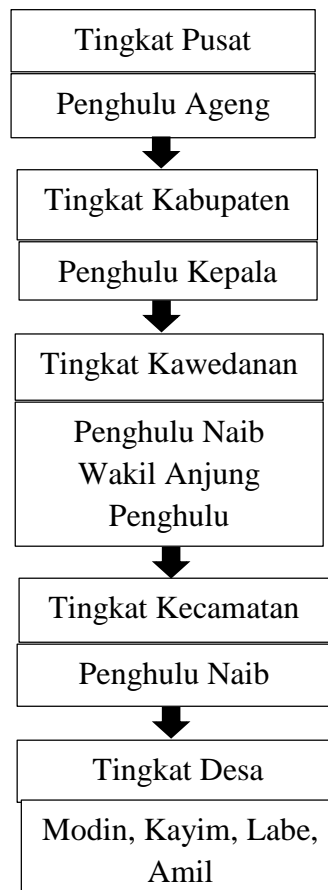
Pada abad ke-19 telah terjalin kedekatan antara masyarakat agraris dengan ulama, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya sistem feodal atau kasta yang di terapkan pada waktu itu, selain itu ulama yang dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dan memiliki wibawa yang tinggi membuat masyarakat tertarik pada kepribadian maupun ajaran yang ulama ajarkan. Para Ulama menyebarkan agama Islam di Jawa memiliki julukan sendiri diantaranya : *Wali*, gelar yang diberikan pada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan yang cukup tinggi, *Panembahan*, gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki

⁸ Qayim Ismail, *Kyai Penghulu Jawa Peranya Di Masa Kolonial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Hlm 65.

spiritual yang tinggi yang berusia lanjut, gelar *Kiai*, juga diberikan untuk ulama yang berada di desa atau orang-orang yang biasanya pulang dari pergi haji. Untuk di daerah-daerah sendiri juga terdapat beberapa Tokoh penyebar agama Islam yang dikenal dengan penghulu, *Modin, Naib, dan katib*.⁹

⁹ Ahmad Adaby, 2004, *Ulama Jawa Dalam Prespektif Sejarah*, Humaniora, Vol. 6 No.01, Hlm. 27-31.

Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran struktur menurut jabatannya Berikut struktur tingkatan jabatan penghulu Keraton Kasunanan Surakarta diantaranya,



Tabel 1.1 Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta¹⁰

¹⁰ Hasyim Muhammad , 2005, *Potret Penghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian*, Wacana Vol. 7 No. 5

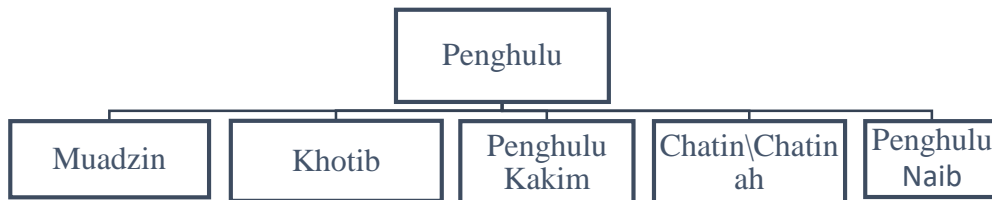
Keterangan:

- 1) Tingkat Pusat : Penghulu Ageng
- 2) Tingkat Kibupaten : Penghulu Kepala/ Hoofdpenghulu/Hooge Priester/ Penghulu Landraad/ Khalifah
- 3) Wakilnya : Anjung Penghulu/ Anjung Khalifah
- 4) Tingkat Kawedanan : Penghulu/ Naib dan wakilnya adalah Anjung Penghulu.
- 5) Tingkat Kecamatan : Penghulu/ Naib
- 6) Tingkat Desa : Modin/ Kaum/ Kayim/ Labe/ Amil.¹¹

Tugas kewajiban penghulu Keraton Kasunanan Surakarta, diantaranya: *Penghulu Ageng*, Penghulu Ageng merupakan penghulu yang berperan sebagai penghulu pusat atau penghulu kepala yang biasanya ditempatkan dikerajaan dan bertugas mengawasi penghulu-penghulu yang ditempatkan didaerah-daerah, *Penghulu kepala / Hoofd penghulu /hoogcepriester / penghulu landraad atau khalifah*, penghulu ditempatkan dikabupaten-kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya penghulu kepala ini diberi wakil yang dikenal dengan Anjung penghulu, *Penghulu atau Naib* yang di tempatkan ditingkat kawedanan, serta terdapat Modin,

¹¹ Amir Fadillah,2011, *Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren di Jawa*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 08 No. 01,Hlm. 115-116

Kaum, kayim, lebe, atau amil yang ditempatkan di desa–desa.



Tabel 1.2. Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Mangkunegaran.¹²

Keterangan: Tugas penghulu Keraton Mangkunegaran diantaranya sebagai berikut:

1. Penghulu menjadi pemimpin kemudian dibawah penghulu kakim, penghulu naib, khotib¹³, muadzin, serta penghulu chatin dan chatinah.
2. *Penghulu kakim* memiliki peran menjadi ketua pengadilan di pengadilan perdata dalem, dan menikahkan, talak, rapak, dan wasiat, dilanjutkan dengan *penghulu naib* yang memiliki tugas yang hampir sama dengan penghulu kakim tetapi tidak mengurus masalah peradilan dan tidak ikut membuat keputusan.
3. *Muadzin* adalah jabatan awal untuk menjadi penghulu dan bertugas untuk mengumandakan adzan, *Modin*,¹⁴ penghulu yang bertugas di dalam masjid baik sebagai imam,serta sebagai pengisi ceramah dalam masjid,

¹² Nur Lufika, skripsi, 2018 , *Peran Penghulu Mangkunegaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944* ,

¹³ Khotib adalah ulama yang bertugas memberikan khotbah pada saat sholat jumat dan sebagai imam sholat rawatib.

¹⁴ Modin adalah petugas yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari di masjid seperti menabuh bedug, kentongan menjelang waktu salat tiba, serta mengumandangkan adzan sebagai

4. Abdi dalem Chatin¹⁵, penghulu ini bertugas mengkhitan anak laki-laki.
5. Abdi dalem Chatinah¹⁶ bertugas untuk mensunati anak perempuan.¹⁷

Para penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran memiliki struktur jabatan yang berbeda hal ini dapat dilihat dari jabatan dalam penghulu yang terdapat di Mangkunegaran, seperti yang kita lihat bahwa di keraton Mangkunegaran terdapat penghulu khakim yang bertugas ketua pengadilan di pengadilan perdata dalem, dan menikahkan, talak, rapak, dan wasiat, penghulu chatin dan chatinah yang memiliki tugas mengkhitan laki-laki dan menyunati perempuan. Sedangkan dalam jabatan penghulu Keraton Kasunanan Surakarta tidak terdapat penghulu *khakim* dan penghulu *chatin* dan *chatinah*.

peringatan telah tiba waktunya salat. Namun dalam kehidupan sehari-hari modin juga melaksanakan tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan kematian, yaitu memimpin doa pada acara selamatan maupun acara kematian dan memandikan jenazah dll.

¹⁵ Abdi dalem Chatin adalah Abdi dalem yang dimiliki Keraton Mangkunegaran dan orang tersebut memiliki kewajiban mengkhitan anak laki-laki

¹⁶ Abdi dalem Chatinah adalah Abdi dalem yang dimiliki Keraton Mangkunegaran bertugas untuk menyunati anak perempuan.

¹⁷ Sunat atau khitan adalah suatu kegiatan praktek tradisi yang dilakukan oleh masyarakat muslim diberbagai daerah yang masih menganut tradisi khitan perempuan. Sunat atau khitan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu diambil dari kata *al khitan* yang diambil dari kata dasar *khatana*. Khitan menurut Ibn Manzur adalah pemotongan bagian quluf untuk laki-laki dan nawah untuk perempuan. Secara historis sunat perempuan merupakan tradisi yang sudah ada sejak Mesir Kuno zaman Firaun sekitar abad ke 16 SM, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang terpotong, diperkuat dengan penemuan tahun 2800 SM yaitu dengan ditemukannya relief-relief Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir. Praktek sunat perempuan ini merupakan tradisi turun temurun dari zaman mesir kuno dan kemudian menyebar ke beberapa benua seperti Afrika, Arab, serta Asia (Indonesia, Malaysia, dan India) juga terdapat tradisi sunat perempuan. Kegunaan Sunat perempuan menurut Jad Al- Haq sesungguhnya sunat itu dapat mempercantik wajah dan menyenangkan suami". Namun secara medis praktek tradisi sunat perempuan dilarang oleh WHO karena dianggap membahayakan bagi kaum perempuan dan jika masih dilakukan maka harus diawasi dan dilakukan oleh para dokter mengingat bahaya yang ditimbulkan dari sunat perempuan ini sangat membahayakan yaitu seperti infeksi vagina, infeksi saluran kencing, kemandulan dll. Sunat dalam hukum agama Islam menyebutkan bahwa para ulama tidak ada yang mengatakan sunat perempuan itu wajib, sunnah dan makrumah. Melainkan mubah, makruf dan haram, hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil yang kuat tentang sunat perempuan. Namun ada sebagian ulama yang masih berpegang pada hukum fiqh yang berpendapat bahwa sunat perempuan merupakan tradisi yang harus dilakukan.

Namun para penghulu baik Keraton kaasunanan maupun Mangkunegaran dalam menjalankan tugas dalam masjid dibantu oleh beberapa orang untuk memperlancar dalam urusan perawatan serta pemakmuran masjid diantaranya dibantu dengan 9 Khatib, 40 ulama dan 10 Marbot,

Proses pengangkatan penghulu pada abad 16 yaitu pada masa kerajaan Islam, diangkat oleh para bupati atau pemerintah tradisional Jawa yang menjabat pada saat itu. Para calon bakal penghulu mengajukan lamaran kepada bupati kemudian dari sini bupati mengangkat penghulu dan di tempatkan di daerah yang telah ditentukan. Namun setelah pemerintahan diambil alih oleh pihak Belanda proses pengangkatan penghulu sedikit panjang yaitu harus dari bupati diteruskan ke residen, lalu ke gubernur jendral, dengan tembusan justisi. Proses pengangkatan penghulu pada tahun 1894 terjadi penambahan syarat-syarat yaitu dengan membuat surat lamaran yang telah dilampiri dengan biodata pribadi, keluarga, dan pendidikan. Pada tahun 1930-an proses pengangkatan penghulu mengalami perubahan, yakni dengan melalui seleksi ujian yang dilakukan oleh bupati dan para ulama lainnya, dengan materi ujian yang terdiri dari membaca dan menulis bahasa Arab (khususnya kitab fikih yang telah ditentukan), bahasa latin dan hukum Islam yang menyangkut hukum munahakat (perkawinan).¹⁸

Penghulu pada masa kerajaan Islam memegang peranan dan tugas yang sangat penting misalnya dalam urusan peradilan yang berkaitan dengan hukum munakahat, selain dalam urusan peradilan penghulu juga bertanggung Jawab dalam

¹⁸ Ibnu, Oayim, *Op.Cit*, Hlm 67-68

urusan keagamaan di internal keraton seperti memimpin doa keselamatan raja, mengajari ilmu agama untuk keluarga raja dll.¹⁹ Pada abad ke 19 tepatnya pada masa kekuasaan tradisional Jawa para penghulu berperan dalam bidang kehakiman bersama dengan jaksa. Bidang kehakiman disini tidak hanya masalah pernikahan, perceraian, talak, dan rujuk, serta warisan, zakat, dan waqaf saja. Melainkan peran penghulu yang menyangkut pidana dan perdata pun juga termasuk tugas penghulu bersama dengan jaksa. Pada saat menjalankan tugasnya penghulu bertempat di serambi masjid sehingga dari sini muncul peradilan serambi masjid. Pada pemerintahan tradisional Jawa penghulu memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada jaksa.

Setelah berakhirnya kekuasaan tradisional Jawa tugas penghulu mulai dibatasi dan dikurangi. Hal tersebut dilakukan karena pihak Belanda mencoba mengurangi peran penghulu di masyarakat karena dianggap membahayakan jika penghulu memiliki kedekatan dengan masyarakat. Dengan rekayasa pemerintah Belanda maka kegiatan penghulu dalam masyarakat menjadi terbatas namun pada praktiknya penghulu masih mengurus perkara yang menyangkut hukum keluarga dan hukum warisan Islam. Tugas yang dijalankan penghulu yang menyangkut hukum Islam masih menjadi tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang penghulu, bahkan pada tahun 1930 penghulu masih bertugas menangani hukum perkawinan, atau yang dikenal dengan undang-undang NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk).²⁰

¹⁹ Akhmad Arif, *Penafsiran Al-qur'an Penghulu Kraton Surakarta Interteks dan Ortodoksi*, (Semarang : Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), Hlm 77-78.

²⁰ Ibnu qayim, *Op,Cit*, Hlm 70-71.

Peran yang sangat menonjol pada diri penghulu membuat pemerintah VOC Belanda pada akhir abad ke-18 mengangkat penghulu kedalam struktur pemerintahan yaitu menjabat sebagai penasehat yang mereka namakan dengan *landraad* (pengadilan negeri).²¹ Perekrutan penghulu dibarengi penarikan penghulu kedalam struktur birokrasi pemerintahan Belanda yang ditandai dengan dibuatnya peraturan raja Belanda tahun 1882 nomer 152 yang kemudian diabadikan dalam *staatsblad* yang memasukan unsur-unsur moderenitas keluarga penghulu. Modernitas yang dilakukan pihak Belanda kedalam keluarga kiai penghulu diantaranya dibidang adminitrasi, pendidikan, gaya hidup dan lain-lain. Pengaruh pihak kolonial terhadap para keluarga kiai penghulu ini mengakibatkan adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang semula penghulu tidak ada golongan-golongan kemudian dengan adanya pengaruh diberbagai bidang yang dilakukan pihak Belanda maka terbentuk golongan yang dinamakan Priyai yang membuat kondisi masyarakat menjadi goyah. Penghulu juga melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi generasi yang memelopori modernisasi beragama di Jawa. Salah satu tokoh tersebut adalah KH Ahmad Dahlan yang pada saat itu menjabat sebagai asisten penghulu di Keraton kesultanan Yogyakarta yang kemudian diberi gelar Khatib amin.²²

Pada hari sabtu tanggal 25 April 1936 diadakan konferensi naib yang bertempat di rumah Penghulu Besar, Mangkunegaran. konferensi Naib ini dihadiri oleh beberapa daerah yang berada dibawah kekuasaan Mangkunegaran,

²¹ Fuad Munajat, 2013, *Hikayat Pencuri : Pergesekan Citra Penghulu Abad Ke-19 Dalam Konstelasi Politik Hukum Pemerintah Kolonial*, Jumanntara, Vol.4, No. 1 Hlm. 126.

²² Ibnu Qoyim Ismail, *Op, Cit*, Hlm 68...

diantaranya: ada perwakilan dari Djatipoero, Batoewarno, Gondanrejo, dan dari Kasunanan diwakili oleh R. H. Moch Ngadenan dan R. Katib Biman. Pertemuan ini ada beberapa daerah yang absen atau yang tidak menghadiri konferensi tersebut dikarenakan sakit. Konferensi dibuka jam 9 dengan memaparkan pentingnya diadakan kumpulan penghulu yaitu untuk membereskan persoalan agama Islam. Konferensi ini juga dibahas mengenai tugas penghulu (menikahkan dan menyiarkan agama Islam di daerahnya) serta penarikan biaya untuk membuat surat pernikahan mengingat belanja atau gaji penghulu pada saat itu tidak tetap sehingga dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan penarikan uang kepada orang yang sedang melakukan akad nikah. Tepat pukul 12.00 pertemuan berakhir dengan selamat.²³

Pada tahun 1937 terjadi pertemuan penghulu se-Jawa-Madura. Pertemuan tersebut menurut Kiai Adnan yang merupakan penghulu Keraton Kasunana Surakarta mengatakan bahwa tujuan awal dari pertemuan penghulu ialah untuk merumuskan suara-suara protes yang masih belum ada keordinasi yang belum baik. Namun para peserta yang hadir malah menghendaki dibentuknya suatu wadah atau organisasi penghulu yang kemudian dinamai dengan Perhimpunan Penghulu Dan Pegawainya (PPDP) danag ketua Kiai Haji Mohammad Adnan yang merupakan penghulu Landraad Surakarta, dengan sekretaris Raden Asrowardi Penghulu Landraad Boyolali yang bertempat di Surakarta.²⁴

²³ Darmokondo Conferentie naib Mangkunegaran pada tanggal 27 April 1936

²⁴ Ismail Ibnu Qayim, *Op.Cit*, Hlm 111.

Pembahasan mengenai penghulu-penghulu Keraton peran dan konferensi bidang agama dan hukum menjadi menarik untuk diteliti lebih mendalam lagi mengingat pada tahun 1936 penghulu Keraton melakukan pertemuan dengan penghulu naib yang berada di wilayah kekuasaan Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan yang membahas peran dan peraturan yang telah disepakati para penghulu Keraton. Sehingga dari pemaparan diatas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai peran dan konferensi penghulu baik itu penghulu Keraton Kasunanan Surakarta maupun Keraton Mangkunegaran yang sangat menarik untuk dikaji sebagai wawasan sejarah maupun umum maka dari sini penulis akan membahas tentang penghulu Keraton Kasunanan surakarta serta penghulu Keraton Mangkunegaran dengan perodesasi 1936-1945 sehingga dari penulis ini dapat mengambil judul " **Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Konferensi Bidang Agama dan Hukum Di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947**"

B. Rumusan Masalah

Penulisan penelitian ini berjudul. “ Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Konferensi Penghulu Bidang Agama dan Hukum Di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947 “. Kajian ini memfokuskan pada peran penghulu yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam serta dalam peradilan terutama menyakut hukum keluarga. Selain itu penulis juga memfokuskan pada latar belakang diadakan konferensi penghulu di Mangkunegaran. Pada kisaran tahun 1936-1945 ini yang banyak menyimpan

peristiwa-peristiwa yang melibatkan penghulu dari diadakan konferensi, pendirian sekolah penghulu serta pembentukan perkumpulan penghulu atau yang lebih dikenal dengan P.P.D.P dan pada tahun 1945 para penghulu ditarik dalam struktur pemerintahan Indonesia sehingga penghulu Keraton dan penghulu landrad tidak lagi di Keraton maupun di pihak kolonial.

Dari pemaparan urian diatas dapat diambil beberpa pembahasan mengenai penghulu naib yang ada di Mangkunegaran, Diantaranya :

- a. Bagaimana awal terbantuknya penghulu di Mangkunegaran dan Kasunanan ?
- b. Bagaimana peran dan kehidupan sosial penghulu pada masa Mangkunegaran dan Kasunanan pada tahun 1936-1947 ?
- c. Bagaimana latar belakang diadakanya perkumpulan penghulu di keraton Kasunanan dan Mangkunegaran?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian penulisan sejarah terdapat periodisasi dan ruang lingkup. Periodisasi dalam penulisan sejarah ini sangat diperlukan agar dalam penulisan sejarah tertata dengan rapi serta dapat dipahami. Periodisasi merupakan konsep atau suatu ide yang dimiliki oleh sejarawan. Periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara suatu periode dengan periode lainnya setelah para sejarawan melihat sesuatu yang unik dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah ini Membutuhkan sumber baik itu sumber tertulis maupun

sumber lisan. Setelah mendapatkan beberapa sumber maka peneliti menyeleksi sumber-sumber yang didapatkan agar tepat dalam penggunaannya.²⁵

Penulisan ini akan dibahas tentang Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Konferensi Bidang Agama Dan Hukum Di Kasunanan Surakarta Dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947, selain konferensi penghulu penulis juga akan membahas tentang kehidupan penghulu dalam agama Islam mengingat peran penghulu di Keraton menjadi peran penting dalam urusan agama Islam maupun peradilan agama Islam. Dalam penelitian ini penulis memilih tahun 1936 karena pada tahun tersebut merupakan awal konferensi akan dibentuk yang didasari dengan ketidak puasan para paenghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran terhadap *Steatblads* atau undang-undang yang dibuat Belanda, yang isinya membatasi kinerja penghulu yaitu mencabut salah satu tugas penghulu. Kemudian penulis memilih tahun 1947 karena pada tahun tersebut para penghulu ditarik kedalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.

Sejauh ini penulis menggunakan data arsip yang didapat dari perpustakaan Rekso Pustaka Mangkunegaran, Monumen Pers, arsip online, dll. Selain itu penulis juga juga melakukan wawancara kepengurus Masjid Agung Surakarta.

²⁵ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana,2008), Hlm 19-20.

D. Tujuan Dan Manfaat penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana perkembangan agama Islam di Jawa pada abad ke-19-20.
2. Mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya penghulu dan sejak kapan adanya sebutan penghulu di Kasunanan Surakarta maupun Mangkunegaran,
3. Mengetahui latar belakang serta hasil dari konferensi yang dilakukan penghulu pada tahun 1936-1947.

Manfaat dari penulisan ini diantaranya :

1. Memberi dan menambah wawasan terhadap masyarakat atau mahasiswa terutama yang berada di Surakarta dan sekitarnya.
2. Memberi kehidupan masyarakat Islam Jawa pada akhir abad ke 19-20, serta menambah wawasan tentang sejarah adanya penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran dan latar belakang diadakanya konferensi Penghulu ,dampak dan hasil akhri dari konferensi.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini penulisan penelitian mengenai Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Dan Konferensi Bidang Agama Dan Hukum Di Kasunanan Surakarta Dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947 belum banyak temukan, namun penelitian dan penulisan peran penghulu secara keseluruhan sudah ada

Kemudian ada beberapa buku dan tulisan karya ilmiah yang membahas peran penghulu pada zaman dahulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan terhadap tema yang memiliki kemiripan dalam penulisan ini.

Buku *penafsiran al-qur'an penghulu kraton surakarta interteks dan ortodoksi* karya Akhmad Arif Junaidi yang diterbitkan oleh Program pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2012. Buku ini menjelaskan tentang penafsiran kitab kitab baik dari luar Indonesia maupun Indonesia, salah satu kitab yang dibahas dalam buku ini tafsir karya Raden Penghulu Tafsir Anom V dengan judul *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* . Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai biografi penghulu tafsir anom serta peran penghulu dalam proses mengadili yang berpedoman pada kitab-kitab yang telah dianjurkan .²⁶

Buku *Kyai Penghulu Jawa : Peran di Masa Kolonial* , ditulis oleh Ibnu Qoyyim Ismail yang diterbitkan Gema Insani pada tahun 1997. Menjelaskan tentang unsur-unsur ulama penghulu dan organisasinya serta permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh ketidak harmonisan hubungan sosial keagamaan yang dialami oleh umat muslim khususnya pada jabatan penghulu pada era penjajahan kolonial pada tahun 1882 sampai 1942. Dalam buku ini juga membahas tentang peran penghulu atau ulama pada saat ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.²⁷

²⁶ Akhmad Arif, *Penafsiran Al-Qur'an Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta Interteks Dan Ortodoksi*, (Semarang : Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang,2012),Hlm 67.

²⁷ Ismail Ibnu Qoyim, *Op. Cit.* ...

Serat Pengetan Lampahanipun Kanjeng Raden Penghulu Tafsir Anomingkang Kaping 5 Sumerep Ing Imogiri". Serat ini memuat awal mula adanya penghulu dari Keraton dalem Kartasura sampai dengan Keraton dalem Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Serat ini menerangkan kehidupan penghulu tafsir anom V dari masa muda hingga diangkat menjadi penghulu tafsir anom V atau yang bisa disebut dengan penghulu Ageng. Serat ini juga dijelaskan silsilah penghulu tafsir anom V dari awal hingga wafatnya, kemudian proses masuknya penghulu dari Keraton dalem kartasura hingga ke Keraton Kasunanan surakarta hadiningrat sampai dengan merangkap menjadi guru bagi sekolah mambaul ulum sampai dengan lintas agama, serat ini juga menerangkan tentang peran penghulu dalam urusan agama dan pengangkatan penghulu mulai dari nasab keluarga para penghulu.²⁸

Jurnal Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan karya Mery Kurnia pada tahun 2018. Pada jurnal ini membahas tentang lika-liku perjalanan kehidupan penghulu di Minangkabau dari zaman kolonial hingga kemerdekaan dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat terhadap pemahaman mengenai agama Sehingga terpecah masyarakat Minangkabau menjadi dua, yaitu kaum adat dan reformis Islam. Dalam pertikaian tersebut terdapat politik adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda sehingga kaum yang terdesak yaitu kaum adat berpihak kepada Belanda, sehingga para penghulu terdesak oleh kondisi kemudian mau tidak

²⁸ Serat Pengetan Lampahanipun Kanjeng Raden Penghulu Tafsir Anomingkang Kaping V Sumerep Ing Imogiri tahun 1930

mau para penghulu menjual barang-barang yang yang dianggap sakral pada saat itu dan menimbulkan julukan bagi penghulu di Minangkabau, sehingga mendapatkan Citra yang yang jelek di mata masyarakat Minangkabau pada saat itu.²⁹

Jurnal yang berjudul *Potret Peghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian*, Karya Muhamad Hisyam, Pada tahun 2005 terdapat pada jurnal Wacana, Vol. 07 No 2. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang gambaran dan citra penghulu menurut masyarakat Jawa sendiri. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai penghulu dalam serat cabolek yang menceritakan tentang penghulu yang dipandang sebagai para alim ulama yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam bidang keagamaan., Dalam serat jatiswara dijelaskan bahwa penghulu adalah orang yang berada di masjid dan memimpin kegiatan dalam masjid. Salain mengurus masjid penghulu juga mengajar santri dalam lingkungannya. Pada dasarnya dalam serat jatiswara penghulu bertugas melayai masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dalam serat Centhini yang sering disebut dengan ensklopedia Jawa ini juga menggambarkan bahwa penghulu tidak sepele peran penghulu seperti dalam serat kedua tadi disini penghulu berperan sebagai orang yang menikahkan , memberi nasehat, mengadili dalam urusan keluarga, pencabulan dll.³⁰

²⁹ Kurnia Mery, 2018 , *Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan* karya, Beranda, Vol. 7 No, 1

³⁰ Hasyim Muhammad , 2005, *Potret Penghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian*, Wacana Vol. 7 No. 5

Jurnal yang berjudul *Antara Hitam Dan Putih: penghulu pada masa kolonial Belanda* karya Amelia Fauziah yang terdapat dalam jurnal studi Islam hingga vol.10, No.2 . 2003. Jurnal ini membahas tentang kritik kritik terhadap kajian penghulu, kodi yang berpihak kepada raja dan pemerintahan kolonial sehingga dari sini timbul beberapa gerakan yang terjadi di antara Kyai dengan penghulu .Dalam jurnal ini juga menerangkan bahwa penghulu juga memiliki peran dalam melakukan perubahan bagi masyarakat muslim pada saat itu.³¹

Skripsi yang berjudul *Peran Penghulu Mangkunegaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944* yang ditulis oleh Nur Lufita Muhibah Fatimah tahun 2008. Pada tulisan ini membahas tentang peran peran penghulu Mangkunegaran pada masa pemerintahan mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944. Dalam tulisan ini juga di jelaskan tentang peran ulama yang yang menjadi panstagomo Mangkunegaran. Kemudian dijelaskan tentang kondisi kehidupan para ulama Keraton pada saat itu. Pada awal abad ke-20 muncul beberapa organisasi Islam yang kemudian membuat perubahan dengan lebih berkembangnya Islam di Surakarta yang dibuktikan dengan banyak ditemukan organisasi atau sekolah-sekolahan yang memiliki basis Islam serta munculnya gerakan-gerakan yang lebih modern contohnya Muhammadiyah.³²

³¹ Fauziah Amelia, 2003 , *Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.10 No.02

³² Nur Lufika, skripsi, 2018 , *Peran Penghulu Mangkunegaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944* ,

Skripsi yang berjudul *Abdi dalem Penghulu Pada Masa Pemerintahan Pakubuwono X Kraton Kasunanan Surakarta (1893-1939)* yang ditulis oleh Yeni Dwi Ayu Paramitha pada tahun 2013. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang struktur birokrasi Keraton Kasunanan Surakarta pada masa pemerintahan pakubuwana tahun 1893-1939. Kemudian membahas tentang gambaran kehidupan ke-Islaman serta munculnya organisasi-organisasi yang berbasis Islam seperti SI , Muhammadiyah dan lain-lain. Dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai awal mula munculnya ulama Keraton serta perannya dan membahas mengenai Abdi dalem penghulu yang terdiri dari jabatan serta perannya terhadap Keraton.³³

Skripsi yang berjudul *Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya Staatsblad 1937 No. 116 Di Kasunanan Surakarta Tahun 1937-1940* karya Agus Triyanta tahun 2018. Dalam Skripsi ini membahas tentang perekrutan penghulu kedalam struktur birokrasi Belanda dikarenakan penghulu pada waktu itu memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam serta sebagai penanggung Jawab mendidik keluarga Keraton. Melihat peran penting yang dilakukan oleh penghulu maka pemerintahan Belanda mengeluarkan staatsblad 1937 yang membatasi ruang gerak penghulu, maka dari sinilah terjadi protes-protes yang dilakukan oleh penghulu namun protes-protes tersebut tidak mengubah keputusan pemerintahan Belanda.³⁴

³³ Yeni Dwi , 2013 , *Abdi dalem Penghulu Pada Masa Pemerintahan Pakubuwono X Kraton Kasunanan Surakarta (1893-1939)* , (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

³⁴ Agus Triyanta, 2018 , *Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya Statsblad 1937 NO.116 Kraton Surakarta 1937-1940*.

Penelitian-penelitian diatas dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitiannya. Kajian-kajian di atas juga memberi gambaran pada penulis bahwa penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian sebelumnya namun dalam penelitian ini penulis memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya . Penelitian ini lebih memfokuskan ke dalam peran penghulu-penghulu Keraton kasunana Surakarta dan Mangkunegaran serta Konferensi penghulu pada tahun 1936-1947.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada sejarah mentalitas. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang unik dan hanya terjadi satu kali.³⁵ Mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan, aktivitas jiwa, cara berpikir, dan perasaan.³⁶ Sejarah mentalitas merupakan sebuah kemungkinan yang dekat dengan jangkauan. Misalnya sejarah mentalitas yang dekat dengan kesadaran masyarakat dan sumbernya tersedia, sehingga untuk mendapatkannya sangatlah mudah sumber-sumber tersebut dapat berupa koran, masyarakat, dan sejarah lisan. Penulisan sejarah mentalitas tidak perlu menggunakan sumber asing mengingat sumber-sumber sangat banyak dan mudah ditemukan di sekitar kita.

Penghulu Mangkunegaran merupakan sejarah mentalitas yang bertugas sebagai panatagama yang ditempatkan di Keraton Mangkunegaran pada saat

³⁵ Kuntowijaya, *Metodelogi Sejarah* , (Yogyakarta: Tiara wacana, 2003) ,Hlm 235-237.

³⁶ [https : // kbbi.web.id/mentaltas](https://kbbi.web.id/mentaltas) dikses 10 juni 2021

itu penghulu di Pura Mangkunegaran juga berperan dalam penyebaran agama Islam, urusan yang berhubungan dengan masjid, dan sebagai kodi .

Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepala urusan agama Islam yang ditempatkan di Kabupaten atau kota madya. Penghulu juga bisa diartikan sebagai penasehat Urusan Agama Islam di pengadilan tinggi negeri. Penghulu di Mangkunegaran bertindak sebagai panatagama yang memiliki tugas yang berhubungan dengan agama Islam.³⁷

Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran juga memiliki struktur yang ditempatkan di wilayah di wilayah kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

Penghulu adalah jabatan yang menempati bidang keagamaan terutama agama Islam bertugas melayani masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian , kemudian menyebarkan agama, dan bertindak sebagai penengah atas permasalahan seperti pemasaran harta warisan dan perceraian.

Konferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan yang dihadapi bersama³⁸. Guna untuk melakukan koordinasi dengan penghulu naib pemerintahan Mangkunegaran juga mengadakan suatu pertemuan yang berguna untuk memberi arahan kepada para penghulu naib agar dalam kegiatan bisa berjalan dengan tertib dan aman. Misalnya seperti

³⁷ <https://kbbi.web.id>. Penghulu arti kata penghulu – kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) Online diakses pada tanggal 10 juni 2021

³⁸ <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/koferensi.html> Arti Kata Konferensi-kamus besar Indonesia (KBBI) Online

yang dilakukan oleh penghulu Mangkunegaran yaitu dengan mengundang para penghulu naib untuk diajak diskusi bersama.

G. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan data penelitian deskriptif yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer maupun data sekunder yang berupa arsip yang didapat dari perpustakaan Rekso pustoko Mangkunegaran yang berhubungan dengan penghulu dibawah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran. Maka dari itu penulis disini menggunakan metode penulisan sejarah agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan terarah karena penulisan ini bertujuan untuk menambah literatur.

Penulisan kali ini penulis masih menggunakan data yang diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dan penulis berencana akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mengalami atau terlibat dalam kegiatan penghulu atau naib Mangkunegaran. Menurut Kuntowijoyo dalam penulisan sejarah Terdapat lima tahapan diantaranya nya:

Pertama, pemilihan topik merupakan langkah awal yang harus diambil dalam melakukan penelitian sejarah dalam pemilihan topik ini penulis hendaknya memilih sesuai dengan kedekatan emosional maupun kedekatan intelektual yang dimiliki oleh seorang sejarawan. Hal ini perlu dilakukan jika seorang sejarawan memiliki kesenangan dan didukung dengan pengetahuan

yang lebih tentang tema yang akan diambil. Sehingga dalam melakukan penulisan dan penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar.

Pemilihan topik ini bermula ketika kegiatan magang observasi di perpustakaan Rekso pustoko Mangkunegaran. Penulis pada saat itu diarahkan untuk membaca katalog di ruang sebelah kiri kemudian penulis menemukan katalog yang menarik yaitu Konferensi naib Mangkunegaran pada tahun 1936. Hal tersebut kemudian memunculkan rasa penasaran dan keingintahuan yang lebih mendalam mengenai peran serta konferensi penghulu di Keraton Mangkunegaran dan kaeraton Kasunanan Surakarta. Selain itu penulis juga memiliki rasa ingin tau yang cukup besar terhadap sejarah awal serta peran penghulu pada masa kerajaan Islam terutama yang ada di Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaraan.

Kedua, heuristik merupakan proses pencarian data serta mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada data arsip, buku, koran-koran serta wawancara. Kegiatan kegiatan dilakukan di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran. Pada saat melakukan pencarian data penulis menemukan arsip di Perpustakaan Rekso Pustaka Mangkunegaran dengan judul *Konperensi Naief* Mangkunegaran dengan nomer katalog P.3016 dengan huruf Jawa dan melayu, surat kabar Darmokondo tahun 1936 yang di temukan di Perpustakaan Rekso Pustaka Mangkunegaran dengan nomer P 3016.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber merupakan kegiatan memilah-milah sumber atau data yang telah didapat dari perpustakaan . Dalam proses

ini terdapat dua tahapan yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan tahapan menyeleksi sumber-sumber sejarah yang dilihat dari fisik luarnya saja tanpa memperhatikan keadaan sumber yang telah didapatkan , setelah melewati tahapan kritik ekstern maka akan dilanjutkan ke kritik intern dalam tahapan ini penulis tinggal memilih sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan tema yang akan dibahas.

Keempat, melakukan interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan data-data yang telah dilakukan verifikasi kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh tentang konsep yang yang telah dipikirkan berdasarkan analisis data tentang Konferensi naib Mangkunegaran dengan nomer 3016 yang yang didapatkan di perpustakaan Rekso Pustako Mangkunegaran. Setelah itu data yang didapatkan dimasukkan ke dalam isi pembahasan dari penelitian dengan dibantu dengan sumber-sumber lainnya yang yang se tema dengan penelitian tersebut.

Kelima, historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yakni berupa penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan maupun laporan penelitian mengenai tema Penghulu Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Konferensi Bidang Agama dan Hukum Di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947.³⁹

³⁹ . Kuntowijoyo, (*Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana,2003), Hlm 69-82.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penyusunan dan penulisan penulis membuat sistematika penulisan sebagai acuan penulisan poin-poin yang akan ditulis dalam proposal penulisan Penghulu-Penghulu Keraton : Peran Dan Konferensi Bidang Agama Dan Hukum Di Kasunanan Surakarta Dan Mangkunegaran Tahun 1936-1947 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup, latar belakang yang mencoba menjelaskan tentang kehidupann masyarakat Islam Surakarta serta sejarah dan tugas penghulu kraton Kasunanan maupun Mangkunegaran. Kemudian diikuti pembahasan lainnya yaitu rumusan masalah, yang menggali permasalahan yang menyangkut kajian dari penulisan ini serta tujuan dan manfaat dari kajian. Setelah itu tinjauan pustaka yang menerangkan perbedaan penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Diikuti dengan kerangka teori yang digunakan untuk acuan dalam penelitian, dan diikuti dengan metode penelitian yang menerangkan tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan urutan dalam melakukan penyusunan penelitian.

BAB II bab ini mendeskripsikan tentang kondisi social maupun keagamaan yang ada di surakarta pada akhir abad 19 sampai abad 20. Pembahasan meliputi kondisi Islam menjelang abad 20 serta gerakan Islam yang muncul dan berkembang pada abad 20.

BAB III bab ini menjelaskan awal kemunculan penghulu di Keraton, peran penghulu baik dalm bidang hukum, pendidikan maupun agama serta kehidupan penngulu.

BAB IV bab ini diterangkan latar belakang diadakan konferensi, dampak serta respon penghulu ketika diadakan konferensi tersebut

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan daftar pustaka.

BAB II

DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

SURAKARTA PADA ABAD 20

A. Islam Surakarta Abad 20

Surakarta merupakan kota yang terletak di pulau Jawa bagian tengah, pada masa penjajahan kolonial disebut dengan wilayah *vorstenlanden* yang berarti tanah raja-raja, Surakarta dalam menjalankan kegiatan pemerintahan diawasi oleh seorang *residen* sehingga wilayah Surakarta disebut dengan wilayah *karisidenan*, selain itu kota Surakarta merupakan pusat kekuasaan raja Jawa yakni meneruskan tradisi Kerajaan Mataram Islam. Sebagai pusat kerajaan kota Surakarta banyak menyimpan histori-histori yang cukup penting bagi peradaban Islam khususnya yang berada di pulau Jawa. Maka tidak heran jika masyarakat menyebut Surakarta sebagai pusat peradaban agama Islam yang pertama di pulau Jawa.

Dinamika kehidupan keagamaan Surakarta pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 mengalami transformasi dengan cepat. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu-Budha, Islam, Kristen dan Katholik yang bersamaan dengan perkembangan masyarakat Jawa membuat masyarakat untuk memahami apa itu hubungan antara Tuhanya dengan manusia. Kehadiran agama di Jawa tidak hanya terjalin hubungan kerohanian (antara manusia dengan Tuhanya), namun kehadiran agama di Jawa membuat perubahan konsepsi-konsepsi diberbagai bidang kemasyarakatan baik dari segi kesenian, kebudayaan, politik kenegaraan, dll.

Kehadiran agama di Jawa juga membuat perubahan dalam tradisi yang terdahulu, maka dari sini terjadi akulturasi antara tradisi yang terdahulu kemudian dimasukan unsur-unsur baru sehingga membentuk tradisi baru yang ada di masyarakat.⁴⁰ Masyarakat Surakarta dalam kesehariannya terbagi menjadi tiga kelompok atau golongan yakni golongan *bangsawan* yang terdiri dari keluarga kerajaan, golongan *priyayi* yang terdiri dari pegawai pemerintahan seperti pejabat dan pegawai pemerintahan kolonial termasuk ulama penghulu, dan golongan masyarakat umum yang terdiri dari petani, pedagang, buruh serta ulama *paradikan*. Masyarakat Jawa di Surakarta, baik aritokrasi maupun rakyat jelata memiliki sebutan yang berbeda dalam urusan ketaatan dalam menjalankan perintah agama Islam. Seorang muslim yang saleh disebut dengan santri atau *putihan*⁴¹ (golongan putih), sedangkan orang yang tidak siap untuk menerima ajaran agama Islam dan dalam menjalankan kegiatan keagamaanya masih tercampur dengan pengaruh Hindu-Budha serta animis (orang yang menganut kepercayaan animisme⁴²) mereka mendapat julukan sebagai *abangan* yang berasal dari bahasa Jawa “*abang*” yang berarti merah.⁴³

⁴⁰ Supriadi, *Dinamika Kehidupan Religius Era Kasunanan Surakarta*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2017), Hlm, 57-58.

⁴¹ *Putihan* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut santri, (orang yang berpegang teguh pada rukun iman, selalu menjalankan dan terus menebar kebaikan dan meninggalkan tradisi yang menyimpang agama).

⁴² *Animismie* berasal dari bahasa latin *anima* yang artinya nyawa, jiwa atau roh, jadi animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang dianut oleh manusia purba pada zaman dahulu. Kepercayaan animisme ini mempercayai bahwaroh nenek moyang dan makhluk halus bisa membantu dan memberi pertolongan kepada manusia, selain mempercayai roh nenek moyang animism juga mempercayai bahwa setiap benda yang ada di bumi diciptakan untuk dihormati agar tidak memngganggu manusia.

⁴³ Syamsul Bakri, *Gerakan Koloniasme Islam Surakarta 1914-1942*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), Hlm, 41-42.

Perubahan- perubahan diberbagai bidang terjadi karena masyarakat Jawa yang masih menganut *Agama Jawa*, agama Jawa menurut Harsya W.Bachtiar merupakan pemujaan terhadap leluhur mereka. Kemudian Parsudi Suparlan mengatakan bahwa agama Jawa merupakan suatu agama yang bukan identik dengan pemujaan terhadap roh leluhur mereka, melainkan suatu kegiatan keagamaan yang berintikan pada prinsip utama yaitu *Sangkan Paraning Dumadi* Atau *Sangkan Paraning Manungsa* yang artinya dari mana manusia berasal, apa dan siapa dia pada masa kini dan kemana arah tujuan hidup yang mereka jalani serta tujuan yang akan dicapainya. Pembahasan sangkan paraninga dumadi tidak bisa terlepas dari *mistik* dan *kejawen*. Dimana manusia menyadari dalam perjalanan hidup itu berdampingan dengan alam gaib serta dalam menjalankan kehidupannya untuk menuju kesempurnaan harus menuju kepada illah.⁴⁴

Proses Islamisasi di Surakarta banyak dipengaruhi oleh kerajaan mengingat Surakarta merupakan wilayah yang terdapat banyak kerajaan yang bercorak Islam yang dimulai dari Dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegran. Berdirinya Keraton memegang peranan dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat baik dari segi kebudayaan sampai dengan keyakinan sangat berpengaruh bagi masyarakat, hal ini dikarenakan raja-raja pada saat itu memiliki wibawa yang cukup mempengaruhi masyarakat maka segala perbuatan dan perkataan pasti akan di ikuti oleh masyarakat. Proses Islamisasi yang dilakukan di Surakarta berjalan dengan damai, mengingat agama Islam sangat memajemukan

⁴⁴ M.C. Ricklef, *MengIslamkan Jawa Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangannya Dari Tahun 1930 Sampai Sekarang*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,2013), Hlm, 62-63.

sifat sama rata yang menimbulkan tata tertib dan kenyamanan serta ketentraman seraya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kerukunan dan menjunjung tinggi rasa toleransi antara umat beragama.⁴⁵ Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para ulama memasukan unsur budaya misalnya dalam kegiatan slametan yang diadakan oleh kebanyakan orang Jawa yang merupakan bentuk terimakasih dan rasa syukur mereka terhadap yang maha kuasa dengan mengadakan selamatan dengan menggunakan sesajen dalam praktiknya.⁴⁶ Penyebaran agama Islam di Jawa tidak menggunakan unsur pemaksaan dalam menjalankan keyakinan. Pada akhirnya agama Islam menjadi agama mayoritas orang Jawa sebelum abad ke 19 walupun agak terjadi pergesekan antara ulama dan pihak kerajaan akibat dari ambisi politik dari kerajaan Pajang yang menyerang wangsa suci di tembayat. namun konflik tersebut segera teratasi dan Islam semakin berkemabang di wilayah Surakarta dan sekitarnya secara damai.⁴⁷

Perkembangan agama Islam di Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegran dapat dibuktikan dengan adanya Abdi dalem *Pamethakan* atau *Putihan* merupakan suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi golongan santri serta orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama Islam, istilah putihan sendiri memiliki makna sebagai agama yang suci namun secara

⁴⁵ Dr. H.J.. De Graaf dan Dr. TH. G. TH. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), Hlm, 36.

⁴⁶ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok : Komunitas Bambu, 1985), Hlm, 3-4.

⁴⁷ M. Hari Mulyadi, *Runtuhnya Kekuasaan Keraton Alit (Studi Radikalisme Social Wong Solo Dan Kerusuhan Mei 1998 Di Surakarta)*, (Solo: Lptp, 1999), Hlm, 147.

harfiah putihan digambarkan sebagai warna yang putih yaitu dari pakaian yang digunakan oleh Abdi dalem pamethakan yang berwarna serba putih baik dari baju serta sarung yang digunakan untuk kegiatan berdakwah atau sehari harinya. Tidak hanya pakaian yang digunakan oleh para Abdi dalem pamethakan bahkan daerah perkampungan yang ditinggali oleh kiai, santri, serta orang yang memiliki pemahaman lebih tentang agama Islam yang disebut dengan kampung putihan atau Kauman. Peran ulama di Surakarta memiliki peranan yang cukup penting dalam menyebarkan agama Islam di Surakarta, para ulama Keraton yang terdiri dari penghulu, dan para Abdi dalem yang berada dalam bidang keagamaan memegang peran yang cukup penting dalam menyebarkan agama Islam. Para penghulu diberi tugas untuk mengajarkan agama Islam serta menyebarkan agama Islam di sekitaran Surakarta.

Pada masa Pakubuwana IV (1788-1820) mendatangkan beberapa kiai ke Keraton untuk mengajarkan dan mengembangkan agama Islam di lingkungan Keraton. Beberapa ulama yang di datangkan oleh Pakubuwana ke IV di antaranya ada Kiai Jamsari dari Banyumas, Kiai Muhammad Idris dari Klaten. Para kiai tersebut merupakan kiai yang memiliki peranan yang cukup penting dalam membela agama Islam di daerah mereka dari serangan pihak kolonial, bahkan pesantren-pesantren yang didirikan oleh kiai tersebut dianggap bahaya oleh pihak kolonial Belanda maka pada abad ke 19 pesantren banyak yang dihancurkan serta terjadi perlawanan yang cukup berarti, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh para santri Jamsaren yang ikut serta dalam peperangan Diponegoro pada tahun 1825-1830. Pondok pesantren Jamsaren pada abad ke 20 mengalami perkembangan

yang sangat pesat sehingga pada tahun 1908 terjadi pemugaran pondok pesantren dan ditambah dengan bangunan masjid, dan pada tahun 1913 sistem pangajian sorogan diubah menjadi sistem kelas.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Pakubuwana ke X memerintahkan masyarakat untuk menjalankan syariat agama Islam dengan baik, seperti shalat, puasa, dan zakat, serta memerintahkan masyarakat yang memiliki uang yang lebih untuk mendirikan masjid. Pada masa pemerintahan Pakubuwana X bisa dikatakan Islam semakin maju di Keraton Kasunanan

Pada awal abad ke 20 Adipati Sastroningrat dan patih dalem Keraton Surakarta yang bernama Raden Temanggung Wreksadiningrat menyuruh menyayikan lagu-lagu yang bernuansa Islam untuk dijadikan nyayian yang kemudian disebut dengan *santiswaran* yang diiringi dengan terbang, kendhang, dan lain-lain. Nyayian dimainkan pada setiap hari minggu dari jam 20.00 sampai dengan jam 24.00 di Kedhaton. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Keraton agama Islam telah eksis dan menjadi budaya di dalam Keraton.⁴⁹

Pada tahun 1905 tepatnya pada masa pemerintahan Pakubuwana X juga melakukan penambahan kiai serta mendirikan sekolah khusus untuk memperdalam agama Islam yang berlokasi di selatan masjid agung Surakarta yang dinamai dengan sekolah Mambaoel Oeloem⁵⁰ yang selesai dibangun pada tahun 1914

⁴⁸ Syaifudin zuhri, dkk, *Gerakan Wahabi Di Indonesia (Dialog Dan Kritik)*, (Yogyakarta: Bina Harfa, 2009), Hlm, 283-285.

⁴⁹ Syamsul Bakri, *Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), Hlm, 77.

⁵⁰ *Mambaoel Oeloem* merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta yang bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan. Dalam kegiatannya sekolah ini bekerjasama dengan Pondok Pesanteren Jamsaren Surakarta, yaitu dengan sekolah pagi

dengan jumlah kelas yang semula 8 kelas kemudian semakin bertambah menjadi 11 kelas. Tenaga pendidik yang terdapat di Mamba'ul ulum terdiri dari para kyai dan ulama yang ada di sekitaran Surakarta dengan murid yang sebagian besar masih keluarga dengan Abdi dalem Pametakan atau Penghulu dengan di kepalai langsung oleh Penghulu Tafsir Anom.⁵¹

Islam mulai melekat dan berkembang di Keraton pada abad ke 20 sudah melekat pada orang Jawa Surakarta, hal ini dapat dibuktikan dengan banyak dilakukannya ibadah dan perintah yang telah dianjurkan dalam agama Islam, serta menghindari larangan-larangan yang dilarang oleh agama yang telah disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadits. Islam di Surakarta pada abad ke 20 sudah bisa memahami ajaran-ajaran agama Islam serta larangan-larangan yang dilarang dalam agama Islam walaupun dalam kegiatan sehari-hari masih tercampur dengan tradisi agama yang terdahulu. Proses Islamisasi di Surakarta dilakukan dengan bantuan pihak Keraton yang ada di Surakarta serta melibatkan para penghulu yang berperan sebagai ulama Keraton yang berperan dalam pengembangan ilmu fikih yaitu *al-tasyri' wal al qada*, yang berperan dalam bidang peradilan, dan perundang-undangan, selain ulama penghulu juga terdapat ulama peradilan yang berperan dalam bidang ilmu akidah, akhlak, serta tasawuf.⁵²

di Mambaoel Oeloem kemudian pada malam hari akan sekolah di pondok pesantren Jamsaren Surakarta. Pelajaran yang dipelajari di Mambaoel Oeloem merupakan pelajaran mengenai agama Islam yang terdiri dari tafsir, hadits, fikih, tasawuf, ilmu fikih, akhlak, bahasa arab dan ilmu pengetahuan umum.

⁵¹ Heri Mulyadi, dkk, *Op, Cit*, Hlm, 150.

⁵² Syamsul Bakri, *Gerakan Kolonialisme Islam Surakarta 1914-1942*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), Hlm, 78.

Proses Islamisasi di luar Keraton juga semakin berkembang dengan adanya organisasi pergerakan yang ikut membantu menyebarkan agama Islam, organisasi tersebut diantaranya ada Sarekat Islam di Laweyan Surakarta (1912), Sarekat Ngrukti Sawa di kauman (1914), Muhammadiyah di Surakarta (1923), dan Nadhatul Muslimat (1931). Proses Islamisasi semakin menunjukkan perkembangannya ketika banyak berdiri pusat-pusat pengkajian Islam dan hadirnya beberapa ulama besar seperti Bagoes Arafaf, Muhammad Adnan, Kiai Jauhar Laweyan, Kiai Masyahud Keprabon, Kiai Imam Ghazali Narabitan, dan lain-lain.

Proses Islamisasi di Surakarta juga dilakukan oleh para Da'I yang tergabung dalam perkumpulan Sidik Amanah Tablig Vatonah (SATV) yang berdiri pada tahun 1914 yang diketuai oleh Misbach. Keberadaan perkumpulan SATV mendapat dukungan yang positif dari masyarakat dan pemerintah setempat, hal ini disebabkan karena tujuan dari dibentuknya perkumpulan SATV yang positif yaitu mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam dunia hitam seperti judi, mencuri, mabuk, suka bermain perempuan, dll. Selain itu SATV juga aktif dalam dunia pendidikan yaitu dengan cara mendirikan lembaga pendidikan, yang kemudian diberi nama *School Met De Koeran* (HIS). SATV juga rutin melakukan kegiatan kajian-kajian Islam di sekitaran Surakarta. Kegiatan kajian ini semakin berkembang bersamaan dengan sekolah Mambaoel Oeloem Surakarta yang berhasil membuka di beberapa daerah seperti Boyolali dan Klaten⁵³. Pada tahun

⁵³ Mambaoel Oeloem di Klaten mulai berdiri pada tahun 1918 dengan dibimbing oleh Penghulu dan Penghulu Landraad, dengan santri dari beberapa daerah yang ada di Klaten.

1919 atas rekomendasi dari kongres *Al-Islam* yang di fasilitasi perhimpunan SATV, berhasil didirikan *read oelama* (dewan ulama).⁵⁴

B. Kondisi Politik Islam Di Surakarta Pada Abad 20

Bangkitnya gearakan nasionalisme pada abad ke 20 menandai permulaan politik Islam di Surakarta yang mulai menunjukkan keeksistensianya. Gerakan masyarakat peribumi mulai bermunculan dengan memiliki visi politik yang jelas, yaitu menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.⁵⁵ Pada awal abad ke 20 kegiatan politik dunia internasional mulai bergejolak yang ditandai dengan kemunculan semangat untuk memerdekakan dari Negara yang menjajah tak terkecuali Indonesia yang ingin memerdekakan diri dari jajahan Belanda. kesadaran keterjajahan telah memunculkan kebangkitan masyarakat jajahan, dalam dunia Islam semangat untuk melepaskan diri dari Negara penjajah ini disebut sebagai era reformasi. Pada awal abad ke 20 gerakan reformis Islam diperkuat oleh moderinisme dalam hal pendidikan menuju yang lebih modern. Adanya pergaulan antara Islam dan moderenitas mendorong tumbuhnya golongan intelektual aktivis Islam yang berperan penting dalam aktivis pergerakan yang ada di Surakarta yang mampu

⁵⁴ Syamsul Bakri, 2018, *Surakarta Bergerak (Rekontruksi Sejarah Pergerakan Di Surakarta Awal Abad Ke 20)*, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, Vol 31,N0 2, Hlm, 371-373.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Politik Islam: Pergaulan Ideology Ppp Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), Hlm, 23.

memahami aspek pembelajaran tradisional Islam yang mumpuni, serta berperan langsung dalam persoalan sosial, budaya maupun politik.⁵⁶

Pada abad ke 20 perkembangan Islam semakin menampakan keeksistensinya yang dibuktikan dengan munculnya gerakan pan-Islamisme yang telah menyebar ke Indonesia. Gerakan Pan-Islamisme merupakan gerakan yang berasal dari Timur Tengah dan memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh dunia Islam dalam satu kekuasaan politik. Bermula dari gerakan inilah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam dengan memiliki misi bersatu dan membentuk satu kekuatan untuk melawan penjajah. Perlawanan itu dapat dilihat dari berlangsungnya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan pengikut sebagian besar kaum santri dan ulama sehingga tidak Perang Diponegoro juga disebut perang *fi sabilillah*, serta terjadi pemberontakan yang dilakukan para santri yang dilakukan di beberapa wilayah terutama di wilayah Jawa.⁵⁷

Gerakan pan Islamisme datang ke Indonesia bermula ketika masyarakat menunaikan ibadah haji kemudian mereka menyerukan semangat untuk membebaskan diri dari penjajah. Jumlah jamaah haji pada tahun ini mengalami penambahan dengan jumlah yang sangat besar, yang terdiri dari masyarakat yang muslim yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa dan Madura dengan kisaran angka sekitar 8.000-15.000 orang pertahun 1912-1930.⁵⁸ Sepulang dari

⁵⁶ Ibid, Hlm, 23.

⁵⁷ Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideology 1924-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm, 42.

⁵⁸ M.C. Riceklf, *Op, Cit*, Hlm, 53.

melaksanakan ibadah haji para jamaah mengajarkan ilmu yang mereka dapat kepada masyarakat sekitaran mereka. Pengajaran ilmu yang dilakukan oleh para haji biasanya dilakukan di pondok pesantren, maka masyarakat beranggapan bahwa semakin banyak jumlah haji yang datang dan mengajarkan ilmu dikampung mereka maka semakin banyak pondok pesantren yang di dirikan oleh para haji, oleh karena itu tidak heran jika masyarakat menganggap para haji sebagai orang yang taat dengan agama Islam serta memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai agama Islam.

Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 Surakarta menjadi pusat utama industri batik yang mendominasi pasar nasional. Dengan daerah terbesar atau sentral batik berada di kauman dan laweyan. Selain menjadi pusat pengrajin batik Kauman juga merupakan tempat tinggal para Abdi dalem sunan yang berada dalam bidang keagamaan, maka orang-orang kauman saling membagi tugas dengan keluarga untuk bekerja sama dimana para perempuan melakukan perdagangan sedangkan lelaki bekerja sebagai Abdi dalem Keraton serta menjadi guru agama, dan penghulu. Selain menjadi pusat perekonomian serta kebudayaan Jawa Surakarta juga menjadi pusat perkembangan politik serta pusat perjuangan kaum bumiputra untuk melawan penjajahan kolonial.⁵⁹

Pada awal abad ke 20 Surakarta memasuki era baru yang disebut dengan zaman baru atau zaman etis, yang ditandai dengan kemajuan menuju kearah yang lebih modernitas baik dari segi pendidikan untuk golongan bangsawan⁶⁰

⁵⁹ Syamsul Bakri, *Op, Cit*, Hlm, 56.

⁶⁰ Pada awal abad ke 20 ssejumlah pangeran kerato Kasunanan dan Mangkunegran dikirim ke Belanda untuk mengikuti pendidikan tinggi dan mengikuti pendidikan *javanologi*. Golongan

maupun rakyat biasa, pelayanan informasi, peningkatan pertanian, dll. Tebentuknya politik etis ini memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap golongan priyai yang mendapatkan keuntungan dari pihak barat. Politik etis memberi masukan untuk mengembangkan dalam dunia pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Serta memberi dampak yang cukup berarti dalam masyarakat terutama dalam dunia pendidikan yang semula pendidikan masyarakat peribumi menggunkan pondok pesantren untuk kegiatan pembelajaran keagamaanya, namun dengan datangnya politik etis ini merubah gaya pendidikan pondok pesantren yang awalnya bercorak tradisional dan mau tidak mau harus mengikuti gaya pendidikan kolonial yang memasukan unsur barat serta bersifat terbuka untuk menerima perubahan dalam pembelajaran yang telah mereka lakukan. Pendidikan dengan menerapkan gaya barat tidak hanya menghasilkan tenaga professional, tetapi juga menjadi alat untuk mengangkat masyarakat bumiputra untuk bisa bersaing di dunia luar. Namun pendirian beberapa sekolah yang didirikan oleh pihak kolonial ini juga memberi untung bagi pihak Belanda yaitu dengan mendirikan beberapa sekolah maka pemerintah Belanda akan mendapatkan tenaga yang ahli dalam bidang yang telah dipelajari dengan upah atau gaji yang murah. Pendidikan ini dibuka untuk seluruh rakyat namun terjadi diskriminasi dalam sistem pengajaran yang dilakukan yaitu pengajaran yang berada dikelas I hanya diperuntukan untuk anak-anak para bangsawan dan

bangsawan yang dikirin ada R.M. Soerjosoeparto yang kemudian menjadi Mangkunegran yang ke VII, R.M. Woerjodiningrat, Pangeran Ngabehi yang kemudian menjadi Pakubuwana XI, serta pangeran hadiwijojo. Setelah menyelesaikan pendidikannya para bangsawan juga berperan dalam organisasi Budi Oetomo yang membangkitkan rasa nasionalisme di Jawa.

priyai, dan kelas II kepada anak peribumi dan umum. Hal ini dilakukan semata mata hanya untuk memperkuat keadaan politik kolonial. Pendirian sekoalan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda ini juga bertujuan untuk memecah belah peribumi yang memeluk agama Islam,. Seperti yang dilakukan oleh pihak kolonial dalam memberikan kurikulum kepada anak-anak para bangsswan, priyayi dan anak para bangsawan eropa diberikan kurikulum yang sama yaitu dengan mencampurkan pendidikan gaya Eropa tanpa memperhatikan kepercayaan anak-anak tersebut sehingga menyebabkan anak-anak para bangsawan muslim dan anak para sultan jauh dari pengaruh pembinaan ulama Islam yang mengajarkan mereka mengenai agama Islam. ⁶¹

Pada penghujung abad 19 dan awal abad 20, pendidikan bagi anak-anak peribumi tersedia dengan nama Holland inlands school (HIS) dan normal School (sekolah guru untuk pribumi dan salah satu lanjutan bagi sekolah tingkat dua atau sekolah desa), *Earste Klass Inlanddsche Scholen* (Sekolah Bumiputra Tingkat Satu) yang muridnya terdiri dari para anak priyai, serta *Tweede Klass Inlandesche Scholen* (Sekolah Bumiputra Tingkat Dua) yang muridnya terdiri dari anak-anak masyarakat biasa. Dengan jumlah sekolan dan murid sebagai berikut:

⁶¹Syamsul bakri *Op, Cit..*

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1900	1.387	98.173
1905	1.942	16.1816
1910	3.127	23.2629
1915	3.400	32.0974
1920	4.231	35.7970

Tabel 2.1.

Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Bumiputra Angka Dua.⁶²

Seiring dengan berjalanya waktu sekolah bumiputra tingkat satu berubah dan mengalami pergantian nama dengan nama Hollandsche Inlanddsche School (HIS) dalam system pendidikannya menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar serta terdapat sekolah lanjutan Belanada. Hal ini mendapat respon yang sangat positif di masyarakat karena masyarakat menyadarri pendidikan dengan gaya barat sangat bermanfaat bagi anak mereka maka dari sini perkembangan sekolah HIS ini sangat cepat dan berikut jumlah sekolahan dan murid yang bersekolah di HIS maupun sekolah lanjutan Belanda.

Tahun	Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah HBS Dan MULO	STOVIA, OSVIA, DLL
1900	896	13	376
1905	1.353	118	-
1910	1681	50	1470
1915	25.808	406	-
1920	38.024	1168	3.917

Tabel 2.2 Jumlah Murid Yang Bersekolah Di HIS Dan Sekolah Lanjutan.⁶³

⁶² Takashi shirishi, *Zaman Bergerak*, (Jakarta : Grafiti,1997), Hlm,

⁶³ Ibid.

Politik etis ini memiliki maksud untuk mempertahankan negeri jajahan mengingat pihak kolonial tidak mau kehilangan negeri jajahan mereka karena banyak investor yang masuk ke Hindia Belanda, namun fasilitas dan tenaga terdidik atau profesional belum memadai.⁶⁴

Pada abad 20, muncul dinamika politik baru di Surakarta. Menurut catatan M. Ricklef mencatat bahwa pada tahun 1909 telah berdiri suatu gerakan yang dinamai dengan Sarekat Dagang Islam yang berada di Batavia, gerakan serupa juga ditemukan di Bogor pada tahun 1911. Dan pada tahun 1911 Tirtidiharjo membujuk Samanhoedhi untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta, dengan tujuan untuk bersaing dengan pedagang batik yang berasal dari Tionghoa yang ada di Surakarta, kemudian pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Perkumpulan atau gerakan ini berkembang dari organisasi *Rekso Rumekso* yang didirikan Haji Samanhoedi (1868). Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong untuk menghadapi para *kecu* yang membuat usaha batik di Surakarta tidak aman karena adanya pencurian batik yang sedang dijemur di halaman mereka. Permusuhan semakin menjadi-jadi ketika *Rekso Rumekso* berseteru dengan organisasi serupa yang dimiliki orang Cina yang dikenal dengan organisasi *Kong Sing*. Perseteruan ini terjadi pada akhir tahun 1911 sampai awal 1912 yang melibatkan polisi sehingga polisi melakukan penyelidikan terhadap status antara kedua perkumpulan dan meminta kedua perkumpulan tersebut untuk menyerahkan anggaran dasar karena jika

⁶⁴ Syamsul Bakri, *Op, Cit, Hlm*, 30-32.

tidak bisa menyerahkan anggaran tersebut maka *rekso rumekso* bisa dibubarkan. Maka dari sini Samanhoedi meminta Martodarsono untuk menghubungi Tirtaadhisoerjo membuat anggaran dasar yang kemudian mengirimkan berkas tersebut ke *Onderafdeling* laweyang, dan kemudian *rekso rumekso* berubah nama menjadi sarekat dangang Islam cabang Bogor yang ada di Surakarta.⁶⁵

Selama ratusan tahun orang-orang tionghoa dijadikan alat Belanda untuk menjadi adu domba antara masyarakat peribumi dengan masyarakat Cina, maka dari sini timbul rasa kebencian dan rasa sentimental antara Cina dan Indonesia. Rasa sentimental ini dapat dilihat ketika Belanda memonopoli perdagangan. Pada saat itu Belanda memberi hak-hak yang istimewa terhadap Cina dan dari sinilah mulai timbul tindakan protes yang dilakukan oleh masyarakat peribumi. Tindakan protes dari masyarakat peribumi inilah yang kemudian disebut dengan tindakan *perkecuan*.

Sebelum terbentuknya organisasi Sarekat Islam terlebih dahulu terbentuk organisasi pergerakan nasional yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan yang dibentuk oleh para mahasiswa kedokteran di STOVIA pada 2 Mei 1908. Gerakan Budi Utomo merupakan gerakan yang pertama kali lahir serta memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan. Kepemimpinannya organisasi Budi Utomo memadukan gaya tradisional serta gaya barat. Setelah mendapatkan pengakuan dari pemerintah organisasi BU mendapat banyak

⁶⁵ Ibid.

dukungan dari kelompok priyai, namun untuk penghulu organisasi ini tidak mendapat dukungan dari jabatan tersebut mengingat pada awal pendirian organisasi ini tidak meemfokuskan kepada satu agama namun organisasi ini tidak terlalu memperdulikan mengenai urusan agama. Perkembangan gerakan Budi Utomo mengalami pasang surut di Surakarta namn pada tahun 1910-an cabang budi utomo di Surakarta menjadi cabang yang paling kuat dan maju makmur, dan kepemimpinan Budi Utomo jatuh di tangan Pangeran Kasunanan dan Mangkunegran yang berpendidikan barat dan maju sehingga masyarakat peribumi bisa merasakan pendidikan dengan gaya barat. Di samping itu patih Kasunanan R. Adipati Sosrodiningrat pada tahun 1906 membentuk sekolah agama yang pertama yang mengadopsi gaya modern serta berinisiatif memoderenkan birokrasi keagamaan di Kasunanan Surakarta.⁶⁶

Dinamika politik Surakarta juga ditandai dengan perlawanan terhadap kolonialisme yang terjadi pada tahun 1918-1924 yang melibatkan masyarakat Surakarta dai berbagai kalangan diantaranya ada, kaum santri, buruh, petani yang di pimpin oleh tokoh revolusioner dengan nama Misbach. Namun pada tahun 1924 misbach ditangkap dan diasingkan ke Manokwari, tertangkapnya Misbach tidak mengendorkan semangat masyarakat peribumi untuk menyerang pihak kolonial, dan puncaknya pada tahun 1924-1926 terjadi banyak perlawanan yakni perlawanan yang dilakukan oleh Sarekat Ra'jat yang dipimpin oleh Marco Kartodikromo, perlawanan kaum buruh yang oleh Moetakalimoen dan

⁶⁶ Takashi shirishi, *Zaman Bergerak*, (Jakarta : Grafiti, 1997), Hlm, 51-52.

kelompok Moa'allimin yang dipimpin oleh Achmad Dasuki. Pada 1926 para pejuang tertangkap dan di adili serta dibuang ke Digoel. pada tahun 1918-1926 bisa dikatakan puncak dari pergerakan yang ada di Surakarta.⁶⁷

C. Organisasi Pergerakan Islam Di Surakarta Pada Abad Ke 20

Surakarta menjadi tempat penting bagi perkembangan politik dan perjuangan masyarakat peribumi, pada tahun 1900 ini Surakarta memasuki babak baru yang dikenal dengan zaman pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini memiliki tujuan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan masyarakat peribumi. Pergerakan ini muncul atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi keterjajahan mereka dari pihak imperialisme tua (VOC) ataupun dari imperialisme baru.⁶⁸ pada awal tahun 1900-an Surakarta mengalami banyak perkembangan baik dari segi pendidikan, dunia pars maupun dalam organisasi. Organisasi pergerakan yang muncul di Surakarta diantaranya ada :

a. Sarekat Islam

Pada awal abad ke 20 tepatnya pada tahun 1900-an di Jawa muncul beberapa gerakan politik yang menjadi kekuatan masyarakat Jawa diantaranya ada Sarekat

⁶⁷ Syamssul Bakri, *Pergerakan Di Jantung Vorstenlanden*, disampaikan dalam sidang senat terbuka Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2021.

⁶⁸ Bahwa imperialisme di Indonesia terjadi tiga fase yaitu fase VOC (fase dagang yang berasal dari Belanda), fase eksploitasi dengan cara tanam paksa, fase capital (pemerintah tidak melakukan eksploitasi, melainkan mendatangkan investor asing).

Dagang Islamijah yang berdiri tahun 1909 di Batavia yang didirikan oleh Tirtoadisoerjo, organisasi ini terus berkembang sampai pada puncaknya yaitu Tirtoadisoerjo meminta Samanhudi untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta yang bergerak untuk mewadahi perkumpulan pedagang batik bumiputra agar dapat bersaing dengan pedagang keturunan Tionghoa yang saat itu menguasai pasar. Pada tahun 1912 sarekat dagang Islam berubah menjadi sarekat Islam.⁶⁹

Sarekat Islam lahir pada tahun 1912 yang diawali dengan organisasi *Rekso Rumekso*, *Rekso Rumekso* didirikan oleh Haji Samanhoedi bersama dengan beberapa saudaranya, teman dan para pengikutnya pada tahun 1868. Organisasi *Rekso Rumekso* ini merupakan organisasi tolong-menolong untuk menghadapi para *kecu* yang melakukan pencurian batik pada saat dilakukam penjemur di halaman rumah yang terjadi di daerah Laweyan (Surakarta). Organisasi ini sering mengalami sengketa dengan organisasi serupa yang berasal dari Tionghoa lainnya yaitu organisasi *Kong Sing*, yang menimbulkan perkelahian di jalan pada akhir tahun 1911 sampai dengan awal tahun 1912. Perkelahian ini membuat penyelidikan terhadap organisasi *rekso rumekso* terhadap status hukumnya. Kemudian Djojomargodo (pegawai kepatihan dan orang dekat dari Samanhoedhi), meminta bantuan kepada Martodharsono yang kemudian meminta bantuan terhadap Tirtoadisoerjo yang memahami masalah yang sedang dihadapi *rekso rumekso*. Maka diri ini Tirtoadisoerjo dimintai bantuan untuk untuk membuat anggaran dasar yang kemudian ditanda tangani pada bulan November 1911, lalu

⁶⁹ Syamsul Bakri, op, cit Hlm, 52.

menyerahkan anggaran dasar yang telah dibuat ke *onderafdeling* Laweyan, dan mengumunkan bahwa organisasi rekso rumekso merupakan organisasi SDI cabang Bogor, setelah disampaikannya surat itu kepada kepolisian maka organisasi rekso rumekso berubah nama menjadi Sarekat Dagang Islamijah cabang Surakarta . Kemudian pada tahun 1912 sarekat dagang Islam muncul kembali dengan nama sarekat Islam(SI).⁷⁰

Disamping melakukan boikot anti-cina, sarekat Islam mulai mengembangkan rencana untuk bergerak dibidang perdagangan, mendirikan sekolah Islam, dan menerbitkan surat kabar harian yang murni berbahasa Jawa, dari penerbitan surat kabar berbahasa Jawa ini maka dapat dilihat bahwa sarekat Islam memiliki sifat Jawa sehingga pada saat awal kelahiran SI masyarakat cina menyebut sebagai *DJawaBin Tong* atau paratai rakyat Jawa. Semangat nasionalisme orang Jawa muncul ketika muncul beberapa faktor diantaranya ada faktor komersial dan pertentengangan etnis terhadap orang Cina, sentiment anti Eropa dan perlawanan terhadap upaya untuk memoderenisasikan dan mengubah masyarakat.⁷¹

Rasa nasionalisme yang ada dalam diri masyarakat Jawa ini muncul karena adanya dominasi orang-orang asing dan campur tangan asing terhadap adat istiadat Jawa, maka dari sini SI Surakarta memanfaatkan peluang untuk mendekati dan mencari dukungan dari pihak Susuhan dan para tokoh pembesar untuk melawan

⁷⁰ Takashi Shiraishi,1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa,1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Citra Grafiti, 1997), Hlm, 77.

⁷¹ George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Hlm,60-61.

pegawai-pegawai yang terpengaruh oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Namun untuk respon penghulu terhadap Sarekat Islam ada tiga pendapat atau respon yang pertama memberikan dukungan secara langsung dan ikut serta dalam organisasi tersebut hal ini dilakukan karena mereka ingin bergabung agar terlibat langsung dan bisa menjadi pemimpin di cabang SI yang mereka tempati seperti yang dilakukan oleh penghulu banyumas, penghulu Puwokerto dan penghulu Rembang yang ikut bergabung di organisasi Sarekat Islam di daerah mereka. Respon yang kedua yaitu memberi dukungan atau mendukung secara diam-diam, hal ini dikarenakan mereka menganggap Sarekat Islam merupakan alat pemersatu umat Islam yang dapat dijadikan wadah untuk alat ekspresi untuk mengembangkan diri. Namun para penghulu ini hanya memberi tanggapan mereka mengenai organisasi Sarekat Islam dan tidak ikut masuk dalam organisasi tersebut, penghulu yang memberikan dukungan tersebut diantaranya ada penghulu Haji Hasan Moestopo yang pada saat itu menjabat penghulu Bandung dan Muhammad Soerna yang menjabat penghulu di Ciawi. Dan respon yang terakhir yaitu penghulu yang melakukan penolakan terhadap organisasi Sarekat Islam penghulu yang melakukan penolakan ini dikarenakan penghulu menganggap para pemimpin Sarekat Islam tidak memahami kitab dan menggambarkan jika penghulu mengikuti organisasi tersebut maka sama halnya seperti orang buta menuntun orang buta sehingga akan terjadi tersesat dan berakhir di tempat yang salah. Pendapat ini disampaikan oleh Sayyid Idrus yang melakukan kotbah salat jumat di masjid Kauman.⁷²

⁷² Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires : The Javanese Penghulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, (Jakarta : INIS, 2001), Hlm, 153.

Pada tanggal 26 Januari 1913 SI mengadakan kongres yang pertama yang bertempat di Surabaya, yang dihadiri oleh 10.000 peserta dari seluruh cabang SI yang ada di Indonesia. Kongres ini disepakati untuk melakukan pembentukan tiga departemen besar untuk memperluas gerakan SI, departemen tersebut diantaranya ada departemen pusat yang akan bertempat yang bertempat di Surakarta yang bertujuan untuk memudahkan untuk mengawasi setiap cabang SI.⁷³

Pesatnya perkembangan SI membuat masalah baru, maka atas saran dari pihak Hindia-Belanda yang menyuruh Tjokroaminoto untuk menyusun anggaran dasar SI yang baru. Hal ini dimanfaatkan oleh Tjokro untuk menjadi orang nomer satu di SI, yang membuat Samanhoedhi geram dan memberi restu Goenawan untuk membuat SI tandinagan. Dalam kondisi perpecahan di organisasi SI, Misbach masuk dunia pergerakan dengan masuk sebagai anggota dan propagandis. Perseteraun antara Samanhoedhi dan Tjokroaminoto berakhir setelah CSI yang dipimpin oleh Tjokroaminoto berhasil mendapat pengakuan hukum dari pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1916. CSI pada masa kepemimpinan Tjokroaminoto mengalami kemajuan pesat, pada saat yang sama komunisme juga berkembang di Jawa sehingga membuat Tjokroaminoto dan Agoes Salim untuk mengantisipasi paham tersebut. Maka pada tahun 1921 SI mengadakan kongres yang bertempat di Surabaya, dalam kongres tersebut Agoes Salim mengusulkan untuk membuat disiplin partai sebagai salah satu cara untuk membersihkan SI dari pengaruh komunisme. Akibat dari disiplin partai ini, SI terpecah menjadi dua kelompok yaitu SI merah yang dipimpin Semaoen dan SI putih yang dipimpin oleh Tjokroaminoto.

⁷³ Ibid, Hlm, 63-64.

SI pada kongres ke VII mengubah nama SI menjadi Partai Sarekat Islam dan berhaluan Pan-Islam. Haluan ini digunakan untuk mengubah citra SI yang berpaham komunis.

b. Sarekat Ngrukti Sawa (SNS)

Sarekat Ngrukti Sawa merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh R. Ng. Djojoprasanto pada tahun 1914. Pada awal kemunculanya organisasi ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan terutama mengenai perawatan jenazah dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan, serta kegiatan ritual slametan yang dilengkapi dengan do'a, tahlil, dan dzikir. Namun organisasi SNS ini terus mengalami perkembangan dengan jumlah anggota yang semakin bertambah dari tahun ketahunya, sehingga organisasi ini merambah dibidang persewaan peralatan seperti meja, kursi, dan gelas.

Penambahan anggota SNS ini dapat dilihat dari data anggota dari tahun ke tahun yang akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tahun	Anggota	Tahun	Anggota
1917	163	1922	401
1918	194	1923	457
1919	250	1924	505
1920	292	1925	514
1921	373		

Tabel 2.3. Jumlah Anggota SNS⁷⁴

⁷⁴Ma'mun Puspongoro, dkk, *Kauman , Religi, Tradisi, dan Santri*, Surakarta : Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman,2007), Hlm,

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa anggota SNS terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran berorganisasi dalam masyarakat Jawa khususnya warga Kauman Surakarta sangat penting, serta terjalin silaturahmi dan saling tolong menolong sesama masyarakat sangat maju. Dalam perjalanannya SNS termasuk organisasi yang cukup bertahan lama dan baru berakhir pada tahun 1981 ketika masyarakat tidak lagi membutuhkan kereta jenazah lagi serta mulai bermunculan tempat-tempat persewaan meja, kursi, dan gelas di tempat-tempat lain.

c. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan⁷⁵ pada tahun 1912. Pendirian Muhammadiyah ini didasari dengan adanya keterlibatan Ahmad Dahlan di organisasi sebelumnya yaitu Budi Oetomo, pada saat Ahmad Dahlan di Budi Oetomo ia menunjukkan pandangan-pandangan mengenai keterbukaan, toleransi, dan pluralitas yang memberikan kesan bagus di mata anggota lainnya. Dalam membangun organisasi Muhammadiyah ini juga dibantu oleh Budi Oetomo yang membari masukan untuk mengajukan permohonan pengakuan hukum kepada pemerintahan Hindia-Belanda mengingant pada saat itu untuk mendirikan pergerakan baru sangat sulit, namun atas saran dari Budi Oetomo Ahmad Dahlan mengirimkan permintaan formal dengan tujuh anggota Muhammadiyah harus

⁷⁵ Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta pada tahun 1868, dengan nama kecil Muhammad Darwisy, putra dari K.H. Abu Bakar, seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta yang menjabat sebagai Katib, dan ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari K.H. Fadhil, seorang penghulu Keraton Yogyakarta. Maka dari silsilah keluarga Ahmad Dahlan merupakan keluarga bangsawan keagamaan.

masuk organisasi Budi Oetomo, dan pada Desember tahun 1912 Dwijosewojo mengumumkan izin sah dari pemerintah terhadap keberadaan organisasi Muhammadiyah.⁷⁶

Pada tahun 1923 Muhammadiyah mulai membka cabang-cabang diberbagai daerah, salah satunya di Solo dengan ketua cabangnya K. Muhtahar Bukhori. Pada awal berdirinya Muhammadiyah di Surakarta di dominasi oleh para pengusaha batik kaya, yang tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga menyumbangkan dana untuk kemajuan di Muhammadiyah Surakarta terutama dalam bidang penerbitan jurnal baru, pendirian sekoalah-sekolah Muhammadiyah, pembangunan perpustakaan dan penyelenggaraan tablig akbar atau pengajian rutin. Gerakan Muhammdaiyah dapat menjalin hubungan elemen-elemen progresif badan relegius, untuk memperluas pengaruh dikalangan anggota muda priyayi baik di Keraton Kasunananan Surakarta Maupun Mangkunegaraan. Organisasi ini dipandang masyarakat sebagai organisasi yang aktif di bidang pendidikan, agama dan sosial maka dari keaktifan organisasi ini di masyarakat maka tidak heran jika Muhammadiyah Surakarta semakin berkembang sama seperti organisasi Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Proses pengembangan organisasi Muhammadiyah ini dilakukan dengan cara pendekatan musyawarah kepada ulama-ulama, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antar ulama,

⁷⁶ Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Jawa*, (Jakarta: Al-Wasat Publising House, 2010), Hlm, 64-65.

perkumpulan ini biasanya dilakukan dengan mengadakan acara pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi yang dilakukan secara berpindah-pindah.⁷⁷

Bidang pendidikan Muhammadiyah memiliki peranan yang cukup besar, Muhammadiyah berhasil mendirikan beberapa sekolah ibtidaiyah yang diprakarsai oleh K. Muhtahar Bukhori. pendirian sekolah ini didasari dengan ketertinggalan masyarakat peribumi dalam bidang ilmu pengetahuan umum, maka Muhtahar bukhori memiliki keinginan untuk merubah sistem tradisional menjadi lebih moderen. Pada awalnya sekolah ini belum memiliki gedung yang tetap sehingga dalam proses pembelajaran harus menumpang di rumah H. Abu Amar. Pada tahun 1937 sekolah tersebut dinamai dengan sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah juga terdapat organisasi perempuan yang dinamai dengan Aisyah. Aisyah juga mendirikan sekolah untuk anak-anak. Dengan adanya lembaga pendidikan ini maka tujuan Muhammadiyah bisa dikatakan berhasil untuk meningkatkan kualitas pengetahuan umum tanpa meninggalkan unsur keagamaanya.⁷⁸

Respon Muhammadiyah terhadap penghulu agak sedikit mengalami konflik. Konflik ini bermula ketika Ahmad Dahlan pulang melaksanaka ibadah haji, beliau melakukan pembaharuan di dalam masjid agung kauman Yogyakarta yaitu dengan melakukan perubahan arah kiblat dari yang sebelumnya ke arah barat menjadi menjadi 20 derajat ke arah utara barat, hal ini dilakukan ahmad dahlan karena beliau menganggap bahwa masalah arah kiblat merupakan masalah fundamental yang

⁷⁷ Ma'mun Puspongoro, Dkk, *Kauman: Religi, Tradisi Dan Seni*, (Surakarta : Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, 2007), Hlm, 13-16.

⁷⁸ Ibid,Hlm,16-17.

harus dikoreksi. Koreksi yang dilakukan Ahmad Dahlan mengenai arah kiblat menimbulkan kemarahan di kalangan penghulu yang saat itu dijabat oleh penghulu Hadji Cholil Kumaladiningrat karena tidak izin kepada penghulu mengenai pengkoreksian arah kiblat, maka dari sini para penghulu meminta kepada sultan untuk membubarkan organisasi yang dipimpin Ahmad Dahlan, namun gretakan para penghulu tidak menyurutkan Ahmad Dahlan dan kawan-kawan untuk terus melakukan pembaharuan dan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Setelah penghulu Cholil Kumaladininrat wafat (1914) kemudian digantikan putranya yaitu Muhammad Sangidu, dengan pergantian penghulu ini hubungan penghulu dengan muhammadiyah membaik karena Muhammad Sangidu merupakan anggota Muhammadiyah Kauman, maka dari sini sangat terjalin kedekatan bahkan kantor penghulu direlakan untuk membuat kantor untuk Muhammadiyah. Berbeda dengan Yogyakarta penghulu di Surakarta menjalin dan bahkan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah namun hanya sekedar mengikuti organisasi Muhammadiyah, tokoh pelopor Muhammadiyah di Surakarta bukan dari kalangan penghulu atau adminitarsi keagamaan melainkan dari pengusaha batik yaitu Hajdi Misbach.⁷⁹

d. Nahdhatul Muslimat (NDM)

⁷⁹ Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires The Javanese Pengulu*, (Jakarta: INIS, 1985), Hlm, 168.

Pada tahun 1931 di Kauman Surakarta berdiri organisasi Nadhatul Muslimat, yang anggotanya terdiri dari perempuan muslimat yang tidak tergabung dalam organisasi perempuan Muhammadiyah (Aisiyah). Organisasi ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan tujuan Muhammadiyah yaitu berkeinginan memajukan peran serta masyarakat khususnya kaum wanita agar mendapatkan kesetaraan dan kewajiban yang sama dengan pria (membaca, menulis, dan memiliki pengetahuan di bidang agama maupun umum). Pusat kegiatan NDM berpusat di rumah Hj. Sofyan di Gontoran Kauman. Kegiatan awal organisasi ini adalah kursus memasak, kursus ilmu pengetahuan agama, dan mendirikan sekolah sore bagi wanita.

Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang NDM berhasil mendirikan sekolah TK, Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SMP). Pada 1933 sempat mengalami masalah karena masuknya guru yang merupakan tokoh PKI yaitu H. Dasuki Siraj, namun konflik tersebut teratasi dan pengurus NDM mendirikan kembali sekolah Ibtidaiyah. Keadaan terus berkembang dan jumlah siswa terus mengalami penambahan, banyak siswa-siswi dari luar daerah yang bersekolah di NDM. Maka wakaf tanah terus bertambah seperti wakaf tanah dari Hj. Sofiah Noyo Curigo. Kemudian pada tahun 1957 sekolah Muhammadiyah berhasil didirikan dan digunakan sampai saat ini⁸⁰

⁸⁰ Ibid, Hlm, 18-22.

BAB III
SEJARAH AWAL PENGHULU KERATON KASUNANAN
SURAKARTA DAN MANGKUNEGARAN

A. Sejarah Awal Kemunculan Penghulu Di Keraton Kasunanan dan Manghunegran

Eksistensi penghulu dikenal di masyarakat Indonesia sebagai orang yang ahli atau menguasai dalam bidang agama Islam. Kata penghulu dalam bahasa Jawa berarti *sesirah* (kepala) atau *pangjeng* yang berarti (pemimpin). Penghulu secara umum memiliki makna sebagai orang yang bekerja dan menjabat sebagai petugas yang berhubungan dengan keagamaan terutama menyangkut dengan urusan agama Islam. Penghulu juga diartikan sebagai kepanjangan tangan dan lidah raja yang menjabat sebagai ulama Keraton yang mendapat gelar *Sayyidin Panatagama* dan menjadi panutan dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan agama Islam, yang patut ditiru dan ditauladani oleh masyarakat. Di setiap daerah penghulu memiliki sebutan atau panggilan yang berbeda-beda misalnya di Jawa Barat penghulu dipanggil dengan nama *pangulu*, Jawa dan Madura dijuluki sebagai *pangoloh*, sedangkan di Melayu penghulu dijuluki sebagai *penghulu*, yang berasal dari kata “*hulu*” yang berarti kepala, yang memiliki arti sebagai orang yang dihormati, atau orang yang mengepalai.⁸¹ bahkan di Daerah Sumba Timur dan Sumba Selatan Penghulu disebut sebagai

⁸¹ Megi Saputa, 2018, *Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta*, Al-Ahwal, Vol 11, No.2, Hlm, 200.

wali Tanah yang berarti orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penghulu.⁸² Penghulu juga berarti sebagai ulama yang berperan dalam bidang *at-tasyri wal-qadla* yang berarti aktifitas sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan terutama dalam bidang kehakiman yang menyangkut hukum Islam. Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penghulu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai agama Islam yang menjabat sebagai petugas keagamaan yang berperan dalam bidang kehakiman agama Islam,⁸³

Secara historis, kemunculan penghulu sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Bahkan ketika kerajaan Islam mulai berkuasa di Jawa, misalnya pada masa kerajaan Demak berkuasa di pulau Jawa raja berperan dalam semua bidang misalnya, sebagai pemimpin negara, pemimpin militer, dan pemimpin agama. Dalam menjalankan tugasnya Raja tidak menjalankan tugas dengan sendiri, raja saat menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Abdi dalem misalnya dalam menjalankan kepengimpinannya di Negara raja dibantu oleh *Patih*, dalam bidang militer dibantu oleh *Adipati*, kemudian dalam bidang agama dipimpin oleh seorang *penghulu*. Bahkan dijelaskan kemunculan penghulu sudah sejak zaman dahulu ketika masjid Agung Demak mulai beroperasi yaitu pada abad ke-15, ketika itu masjid Agung Demak yang merupakan awal tempat untuk pengislaman pertama kali di pulau Jawa. Dari dibangunnya masjid inilah jabatan

⁸² Ter, Haar, *Asas-Asas Hukum Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Prandja Paramita, 1960) Hlm 5.

⁸³ Ibnu Qayim, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Hlm, , 65-68.

imam mulai dibentuk untuk menjalankan tugasnya yaitu mengimami sholat wajib lima waktu.

Kekuasaan Islam semakin berkembang dan meluas ketika Islam memegang semboyan bahwa agama Islam tidak mengenal perbedaan, dan dari sinilah awal mula terbentuk imam masjid dan masyarakat menyebutnya dengan kata “*Penghulu*” yang memiliki arti kepala atau orang terdahulu mengartikan sebagai kepala yang bergerak dibidang rohani terutama yang menyangkut agama Islam. Penghulu yang pernah menjabat diantaranya ada Makdum Sampang, beliau merupakan suami dari cucu Nyai Gede Pancuran. Setelah Makdum Sampang wafat beliau digantikan oleh putranya yang bernama Kiai Gedeng Pambayung ing Langgar, namun posisi ini tidak lama karena Kiai Gedeng Pambayung harus dipindah tugaskan ke Jepara untuk menjadi imam masjid di masjid Agung Jepara, setelah kepergian Kiai Gedeng ke Jepara beliau digantikan oleh sepupu dari garis keturunan ibunya yaitu Adipati Sabrang Lor yang mendapatkan gelar Penghulu Rahmatullah dari Undung, namun beliau gugur saat peperangan⁸⁴ dan dimakamkan di dekat Masjid Demak disamping makam pamanya yaitu Kiai Makdum Sampang. Penghulu kelima masjid Agung Demak dijabat oleh salah satu anggota dari Walisongo yaitu Sunan Kalijaga atau Sunan Kudus, Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Pandita Rabani yang merupakan putra dari

⁸⁴ Peperangan yang dimaksud adalah peperangan melawan orang-orang Majapahit yang terjadi pada tahun 1524. Imam masjid agung keempat ini merupakan imam yang pertama yang mendapat gelar penghulu. Penghulu berasal dari bahasa Melayu yang kerap digunakan di pakai di Jawa. Pergantian sebutan dari yang semula imam menjadi penghulu ini dikarenakan raja ingin menambah bobot yang lebih sekuler lagi kepada penghulu. hal ini terbukti ketika penghulu keempat yaitu penghulu rahmatullah ikut serta dalam peperangan melawan Majapahit. *Rahmatullah* merupakan nama yang anumerta yang memiliki arti yang telah kembali ke rahmatullah.

Penghulu Rahmatullah. Kata kalijaga sendiri terdiri dari kata *kali* yang berasal dari kata *qadli* dan jaga dari kata *zaka* yang berarti hakim atau penghulu suci.⁸⁵

Secara umum, tugas penghulu pada masa kerajaan Demak memiliki tugas yang cukup banyak diantaranya sebagai penasehat spiritual kerajaan, memastikan syariat Islam dijalankan dengan baik oleh masyarakat, menjadi pengadil dalam urusan pengadilan NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk), pembagian warisan serta menjadi penengah dalam urusan wasiyat. Maka tidak heran jika penghulu di Kerajaan Demak memiliki hubungan yang sangat baik dengan raja dan diberi kebebasan untuk mengatur segala urusan di masyarakat maupun di kerajaan yang berhubungan dengan proses penyebaran agama Islam maupun syariat Islam.

Pada masa Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma (1613-1645), para penghulu diberi tempat yang tinggi dan dihormati oleh banyak masyarakat, yakni sebagai pejabat anggota *Dewan Parampara* yang memiliki tugas sebagai penasehat kerajaan. Selain sebagai anggota *Dewan Parampara* penghulu juga memiliki lembaga yang disebut dengan nama Mahkamah Agama Islam yang anggotanya terdiri dari para ulama yang kemudian menjadi Abdi dalem yang mengurus masalah keagamaan di Keraton dan dikepalai oleh penghulu.⁸⁶

Jabatan penghulu terus ada dalam struktur administrasi kerajaan Islam di Jawa bahkan ketika Kerajaan Mataram Islam terpecah yang ditandai dengan

⁸⁵ Ibnu Qayim, *Op, Cit*, Hlm, 65.

⁸⁶ Ismail Qoayim, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Hlm, 65

perjanjian giyati yang terjadi pada 1755, perjanjian Giyati merupakan perjanjian yang terjadi antara VOC, Pakubuwana III, Raden Mas Said dan Pangeran mangkubumi. Perjanjian Giyati ini dilatarbelakangi adanya perebutan pewaris Kerajaan Mataram yang kemudian dimanfaatkan pihak Belanda untuk memecah belah kerajaan mataram, yang pada akhirnya di tanda tangannya Perjanjian Giyati ini yang isinya membagi wilayah kekuasaan kerajaan Mataram menjadi dua wilayah yaitu dengan Wilayah di sebelah timur sungai Opak (yang melintas di daerah Prambanan sekarang) diserahkan kepada Pakubuwana III dan tetap berkedudukan di Surakarta , sementara di sebelah barat (daerah Mataram asli) di serahkan kepada pangeran Mangkubumi yang berkedudukan di Yogyakarta. Setelah perjanjian Giyati selesai Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi masih harus menyelesaikan konflik dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, maka dari sini diadakan perjanjian Salatiga (1757) yang berisi mengenai membagi lagi wilayah kekuasaan mereka kepada Raden Mas Said yang kemudian dibagi daerah Karanganyar, kabupaten Wonogiri dan sedikit daerah Ngawen ,Yogyakarta⁸⁷.

Pada saat terpecahnya kerajaan Mataram menjadi beberapa bagian diantaranya ada Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaraan dan Pakualaman, pada pemerintahan kerajaan tersebut masih dijumpai lembaga yang disebut *kepengulon* yang dijabat oleh abadi dalem *Pamethakan* atau *Yogaswara*, yang

⁸⁷ Anton Haryono, 2015, *260 Tahun Kasultanan Yogyakarta*.

dikepalai oleh Penghulu Ageng dan dalam tradisi keraton Kasunanan Surakarta disebut dengan Tafsir Anom.⁸⁸

Penghulu di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan di Keraton Mangkunegaraan menjadi bagian dari struktur pemerintahan yaitu masuk kedalam bagian birokrasi pemerintahan Keraton yang bertugas dalam bidang keagamaan. Pengulu di Keraton bertugas sebagai orang yang mengadili perkara pernikahan, warisan, wasiat, serta menjalankan salat hajat, memohon keselamatan kerajaan kepada Allah SWT, dan mendoakan supaya kemuliaan tetap tercurah kepada raja, istri, putra-putri, keluarga dan rakyat sewilayahnya Jawa. Selain itu penghulu juga bertugas menghitung penanggalan dan jam berdasarkan bayang-bayang matahari, ahli dalam ilmu perbintangan, serta mengetahui segala macam kitab yang dipakai untuk memberi hukuman kepada orang yang bersalah secara adil dan menurut kitab yang telah dipelajari sebelum menjadi penghulu.⁸⁹

Pada abad ke 19 dan 20 perkembangan penghulu baru bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Gubernur Herman Wiliem Deandelees masih mempertahankan struktur jabatan penghulu yang berperan dalam bidang keagamaan terutama menyangkut dengan hukum agama Islam, pengakuan dari pihak kolonial ini membuktikan bahwa keberadaan ulama sebagai penghulu nata gama sangat diperlukan untuk menarik simpatisan

⁸⁸ Amelia Fauziah, 2003 , *Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.10 No.02, Hlm, 180-181.

⁸⁹ S. Margana , *Keraton Surakarta Dan Yogyakarta 1769-1874*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm, 14.

muslim untuk tunduk kepada pihak kolonial. Namun pihak kolonial mengenal nama penghulu dengan nama yang berbeda yaitu dengan nama *opper priester* dan *chiefs priest*. *Priester* dan *priest* sendiri memiliki arti sebagai pejabat agama Islam. Pada awal abad 19 ketika itu Deandelees berada di Jawa (1808-1811), terdapat surat kabar yang menyebutkan adanya “*penghulu*” atau “*priet*”, dan mengatakn :

In every chief town there is a high priest , who with the assistance of several inferior priests , holds an ecclesiastical court , and superintends the priests who are appointed in the subordinate districts and villages .
(Di setiap kota kepala ada seorang imam besar, yang dengan bantuan beberapa imam yang lebih rendah, memegang pengadilan gerejawi, dan mengawasi imam-imam yang diangkat di distrik-distrik dan desa-desa bawahan).⁹⁰

Pada tahun 1808 Deandelees juga mengungkapkan bahwa para bupati menjadi pengawas untuk memperhatikan keadaan umat Islam agar tetap aman dalam menjalankan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya, Serta agar penghulu dapat menjalankan tugasnya yaitu, menikahkan, memutuskan perceraian dan pembagian pusaka. Pembagian tugas penghulu ini dimuat dalam *Staatsblad* 1820 No 22 ayat 13 yang isinya bupati harus mengawasi semua permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para penghulu bebas dalam melaksanakan tugasnya menurut adat kebiasaan orang Jawa baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan dan lain sebagainya.⁹¹ pada tahun 1882 Belanda membentuk lembaga penghulu (*Priesterrad*) dan lembaga ini merupakan bagian dari pengadilan landraad, serta *Reh Pengulon* yang semula di pegang oleh raja

⁹⁰ Thomas Stamford Raffles, 1817, *The History Of Java* Jilid II, Hlm, 3-4.

⁹¹ Abdullah Idi, *Politik Enisitas Hindia Belanda: Dilemma Dalam Pengelolaan Keberagaman Entis Di Indonesia*, (Jakarta : Prenandamedia Group, 2019) Hlm, 78-79.

kemudian masuk kedalam *Priesterrad* dengan demikian anggota reh pengulon termasuk dalam ulama birokrasi kolonial yang masuk dalam golongan priyayi. Masuknya reh pengulon ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak *Belanda* untuk menahan laju pan Islamisme yang sangat dgencar dilakukan oleh masyarakat Jawa.⁹²

Pada saat menjalankan tugasnya penghulu di Keraton Kasunanan Surakarta dibantu oleh beberapa orang yang diantaranya terdapat struktus dalam jabatan penghulu diantaranya sebagai berikut :

Pada tingkatan pertama ada penghulu ageng atau dalam tradisi di Kasunanan Surakarta diberi julukan penghulu *Tafsir Anom*. Penghulu *Tafsir Anom* membawahi para penghulu di tingkat yang lebih rendah yang ada di Surakarta. Penghulu *Tafsir Anom* merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada penghulu kepala pada masa pemerintahan Sri Pakubuwono IV (1788-1820).⁹³ Penghulu Tafsir Anaom atau Penghulu Ageng bertugas mengawasi para anggota yang dibawahnya, di tingkatan kedua setingkat dengan kabupaten terdapat pejabat keagamaan yang disebut dengan pangulu atau pengulu. Pejabat keagamaan di tingkat ketiga atau setingkat dengan kecamatan terdapat na'ib atau na'ib pangulu. Pada tingkat desa terdapat petugas yang berbeda sebutanya dengan daerah satu dengan yang lainnya ada yang menyebut sebagai modin, kayim, atau kaum. Karena tugas dan fungsi pengulu dan para pembantunya ini berhubungan dengan kagamaan terutama agama Islam maka kantor atau tempat

⁹² Hermanu Soebagjo, 2015, *Politik Symbol Kasunanan, Sejarah Dan Budaya*, Vol 9 Nomer 2, Hlm, 185-186.

⁹³ Arif Junaidi, *Op, Cit*, Hlm., 91.

yang digunakan yaitu masjid disetiap level adminitrasi yang mereka ditugaskan. Dan disetiap adminitrasi.⁹⁴

Para penghulu memiliki staf agama untuk membantu, misalnya untuk membantu penghulu ageng yang ditempatkan di Keraton dibantu oleh 9 ketib (penceramah atau khatib), 5 modin yang bertugas sebagai mu'adzin, 40 ulama yang bertugas sebagai jamaah shalat jumat dan 10 marbot yang bertugas mengurus keperluan masjid yang menyangkut dengan kebersihan lingkungan serta peralatan yang digunakan. Tingkat kabupaten pengulu berperan sebagai hakim disamping jaksa, dengan dibantu ketib yang bertugas menjadi khatib dalam shalat jumat serta melakukan pencatatan pernikahan, perceraian, pembagian warisan, serta memberi nasehat kepada pengantin mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Naib di tingkat kecamatan yang sering disebut dengan penghulu naib memiliki tugas seperti pengulu tingkat kabupaten namun tidak berfungsi sebagai hakim. Sedangkan kaum, modin, kayim bertugas di tingkat desa dengan dibantu oleh beberapa pengurus masjid seperti marbot, mudzin, bilal, kabayan (petugas keamanan masjid).⁹⁵

Sama halnya dengan Keraton Kasunanan Surakarta, penghulu Keraton Mangkunegaran juga masuk dalam struktur pemerintahan dalam Keraton yang menjabat sebagai penghulu dan Abdi dalem ulama. Penghulu Keraton pada masa pemerintahan mangkunegara yang ke VII (1916-1944) yang saat itu dijabat oleh H. Imam Rosyidi memiliki tugas sebagai pemimpin lampahan di masjid- masjid

⁹⁴ Ibnu Qayim, *Op, Cit.*

⁹⁵ Amila Fauzia, *Op, Cit.*, Hlm, 182-183.

yang berada dibawah naungan praja Mangkunegaran, berperan dalam mendirikan sekolahan yang berbasis agama, serta bertugas untuk membimbing sholat, mengajarkan puasa, sedeqah, dan mengajarkan agama Islam di kerajaan maupun di masyarakat. Selain itu ulama Abdi dalem Keraton atau Penghulu juga berperan sebagai pemangku urusan agama, menjadi penasehat kerajaan, serta memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan keagamaan.⁹⁶

Penghulu menjalankan tugasnya di Keraton Mangkunegaran juga dibantu oleh beberapa pejabat keagamaan yang ada dibawahnya diantaranya ada *Penghulu Khakim* yang bertugas sebagai ketua pengadilan di perdata dalem, menikahkan, memberi nasehat pernikahan, mengadili sidang talak, cerai dan pembagian harta warisan. Katib, katib bertugas sebagai penyelidikan dalam suatu perkara kemudian dimintakan vonis dan denda kepada Kanjeng Pangeran Arya dan Kanjeng Tuan Residen dan kemudian di putuskan vonis dan denda yang diterima tersangka. Naib, naib ini memiliki tugas seperti penghulu khakim tetapi tidak mengurus peradilan dan tidak bisa menjatuhkan hukuman. Modin, modin ini bertugas menjadi imam masjid dan melakukan ceramah di masjid agung mangkunegaraan, Muadzin, merupakan jabatan terendah dalam struktur birokrasi yang memiliki tugas sebagai orang yang mengumandangkan adzan saat masuk waktu sholat. Abdi dalem chatin dan chatinah, yang memiliki tugas sebagai pengkhitan anak laki-laki untuk chatin dan untuk chatinah bertugas melakukan sunat pada anak perempuan.⁹⁷

⁹⁶ Margana, *Op, Cit*, Hlm, 246.

⁹⁷ *Ibid*,

Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran memiliki perbedaan dalam struktur administrasi pemerintahan, dimana dalam menjalankan tugasnya penghulu Keraton Kasunanan Surakarta dibantu oleh beberapa bawahannya untuk mengkoordinasi disetiap wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dengan pengawas satu yang disebut dengan penghulu ageng atau dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan Tafsir Anom. Sedangkan untuk di wilayah kekuasaan Keraton Mangkunegaran penghulu fokus kedalam Keraton dengan markas di Masjid Agung Al Wustha yang ada di Keraton Mangkunegaran, hal ini dikarenakan di Mangkunegaran tidak mengenal tingkatan jabatan sehingga dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan saling melengkapi, serta dalam menjalankan tugasnya penghulu Keraton Mangkunegaran agak memiliki perbedaan dengan penghulu Kasunanan misalnya dalam struktur birokrasi di Mangkunegaran penghulu memiliki Abdi dalem chatin dan chatinah yang bertugas untuk mengkhitan anak laki-laki yang dilakukan Abdi dalem chatin dan untuk khitan perempuan dijalankan oleh Abdi dalem chatinah.⁹⁸

Pada tahun 1937 *Belanda* mengeluarkan undang-undang atau *Staatsblad* 1937 No. 116 yang berisi tentang penghapusan salah satu tugas dari penghulu yaitu mencabut penyelesaian hukum warisan yang tidak lagi diselesaikan di pengadilan agama dikarenakan pengadilan agama tidak ada sangkut pautnya dengan hukum warisan dan penyelesaian pengadilan yang menyangkut hukum

⁹⁸ Nur Lufita M, *Peran Penghulu Mangkunegaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

waris diselesaikan di pengadilan tinggi negeri. Dikeluarkannya *Staatsblad* 1937 no 116 juga bertujuan untuk melengkapi *Staatsblad* yang di buat pada tahun 1882 No. 152⁹⁹, yang semula memuat tugas dan wewenang dalam mengadili perkara perkawinan, perceraian, talak, rujuk, dan pembagian harta warisan namun dengan adanya *Staatsblads* 1937 perkara mengadili masalah hak waris dihapuskan.

Setelah dikeluarkannya *Staatsblads* 1937 No. 116 yang dianggap para penghulu merugikan untuk para penghulu, maka dari sinilah penghulu membuat perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para penghulu yang berada di Jawa dan Madura pada tanggal 16 Mei 1937 membentuk suatu perkumpulan dengan nama perhimpunan para penghulu dan pegawainya di Surakarta.pembentukan P.P.D.P.

Terbentuknya P.P.D.P. ini didasari dengan adanya kekecewaan para penghulu pada tanggal 1 April 1937 terhadap pencabutan wewenang penghulu di pengadilan agama menegnai pencabutan untuk mengadili hak waris, pencabutan salah satu tugas penghulu ini diganti dengan ganti rugi dari pihak *Belanda* dengan membayar para penghulu tiga bulan sekali. Serta ketidakpusan para penghulu Jawa terhadap diangkatnya penghulu KasunananSurakarta sebagai staf pengadilan landraad dan akan mendapatkan gaji dari pemerintah *Belanda*.¹⁰⁰

⁹⁹ Ahmad, 2015,*Peradilan Agama Di Indonesia* , YUDISIA,Vol 6, No. 2, Hlm, 332-333.

¹⁰⁰ Agus Triyanta,2020, *Penghulu Pasca Keluarnya Staatblad 1937 No. 116 KasunananSurakarta Tahun 1937-1940*, El Tarikh, Vol 01, No 02, Hlm., 61-62

Pada tahun 1942 tepatnya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia penghulu di keraton masih memegang peranan yang penting di bidang keagamaan namun dengan nama lembaga yang berbeda yang semula *Radd Agama* menjadi *Sooryoo hoon* dan *kaikiooo* untuk Mahkamah Islam, perubahan nama ini telah dimuat dalam undang-undang Jepang dengan pasal 3 bala Jepang (*Osanu Seizu*) yang disahkan pada tanggal 7 Maret 1942 No.1. Posisi penghulu pada tahun 1945 juga pernah tersncam ketika Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, pada bulan januari 1945 Jepang membentuk sebuah dewan pertimbangan untuk melindungi penghulu dan para ulama yang lain untuk tetap berada di pemerintahan Indonesia walaupun Indonesia telah merdeka. Namun sebelum dewan pertimbangan terbentuk Indonesia telah merdeka dan posisi serta tugas penghulu masih tetap dalam pemerintahan dan pada tahun 1947 tugas penghulu mulai berangsur berkurang dan berakhir para penghulu keraton beserta lembaga keagamaan di keraton ditarik kedalam struktur pemerintahan Indonesia.

Adapun syarat-syarat untuk menjabat sebagai penghulu di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran pada awal pengabdian menjadi penghulu yaitu dilakukan dengan cara raja menunjuk para ulama yang mereka anggap cakap dalam menjalankan tugas dalam bidang keagamaan dan hukum. Pada tahun 1905 saat didirikan sekolahan penghulu di masing-masing proses pengangkatan penghulu mulai memiliki syarat yaitu sebagai berikut:

1. beragama muslim
2. sehat jasmani rohani
3. tidak berurusan dengan hukum
4. tidak memakai candu

5. bisa membaca dan menulis bahasa arab
6. menguasai kitab-kitab fikih dan kitab yang telah ditentukan.¹⁰¹

Berkaitan dengan proses pengangkatan penghulu pada awal kemunculannya yaitu di kerajaan demak dilakukan dengan cara Pemberian “*Tauliyah*”, yaitu pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa yang disebut dengan raja, setelah mataram terpecah pada tahun 1875 pengangkatan penghulu ageng atau penghulu kepala di Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran dilakukan dengan cara yang sama dengan yang dilakukan penguasa terdahulu yaitu dengan memberi “*Tauliyah*” yaitu dengan raja menunjuk langsung para calon penghulu (ulama) yang akan dijadikan pemimpin penghulu pusat.¹⁰²

Proses pengangkatan jabatan yang ada dibawah penghulu dilakukan pada mulanya ditunjuk oleh bupati, dan mengalami perubahan yaitu dengan ditunjuk oleh bupati kemudian ke residen, setelah disetujui selanjutnya ke gubernur jendral dan setelah itu baru disahkan di pengadilan Juistice, pada tahun 1894 terbentuk lembaga *kantoor voor indsche* yang dipimpin oleh C. Snouck Hurgonye yang menambah proses pengangkatan penghulu harus menyertakan biodata pribadi, pendidikan, dan silsilah keluarga baik dari pihak pria maupun wanita, kemudian pada tahun 1930-1947 proses pengangkatan penghulu mengalami perubahan yaitu diwajibkan untuk menempuh pendidikan penghulu dan dinyatakan lulus, menempuh ujian penghulu dengan tim penguji terdiri dari

¹⁰¹ Kitab-kitab yang wajib dikuasai oleh seorang penghulu diantaranya ada kitab al awalim, al-ajrumiyah, Fath al-Qarib, al-Mahalli, Fath Al-Mu'in, Fath al-wahhab, dll.

¹⁰² Arif Junaidi, *Op,Cit*, Hlm, 132-133

penghulu landraad dan ulama lainnya. Materi ujian penghulu pada saat itu terdiri dari membaca dan menulis huruf al qur'an, pengetahuan tentang kitab-kitab fikih, bahasa latin, dan pelajaran Islam terutama menyangkut hukum munahakat atau perkawinan..¹⁰³

B. Peran Penghulu Dikeraton Kasunanan Surakarta Dan Keraton Mangkunegaraan Di Bidang Keagamaan, Hukum, Dan Pendidikan.

a. Peran Penghulu Di Bidang Keagamaan

Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran membagi para Abdi dalem menjadi beberapa kelompok diantaranya ada Abdi dalem yang dibawah pimpinan bupati nayaka, yang disebut dengan Abdi dalem kepatihan, Abdi dalem Kadipaten serta ada Abdi dalem pengulon. Abdi dalem kepatihan yang dipimpin oleh *Bupati Nayaka* bertugas mengurus pemerintahan seluruh kerajaan dan dengan dibantu oleh Abdi dalem Kadipaten yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kerajaan para kerabat kerajaan, dan untuk Abdi dalem pengulon bertugas dalam bidang rokhaniah.¹⁰⁴ Para raja biasanya menunjuk para ulama kiai, ulama dan para guru agama Islam untuk dijadikan guru dan penasehat dalam mengajarkan Islam di lingkungan Keraton. Penghulu dalam struktur birokrasi

¹⁰³ Ibnu Qayim, *Op, Cit*, Hlm..66-68.

¹⁰⁴ Darsiti Suratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1839*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000) Hlm, 261.

Keraton memiliki peranan yang cukup penting dalam bidang keagamaan dan hukum syariat Islam dengan di ketuai atau dikepalai oleh penghulu ageng dan dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan *Tafsir Anom*. Seorang penghulu adalah kepanjangan tangan dan lidah dari raja yang menjbat pada saat itu, dengan diberi gelar Sayidin Panatagama, dan menjadi panutan dalam segala hal yang berkaitan dengan syariat agama Islam, yang petut ditiru dan di tauladani dimasyarakat agar terciptanya masyarakat yang bermoral dan beretika.¹⁰⁵

Gambar 3.1

Sinuhun Pakubuwana X bersama dengan permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu Mas dan KRT Pangulu Tafsiranom V sehabis melaksanakan shalat Jumat di Masjid Agung Surakarta Hadiningrat



Sumber : Serat Pengetan Lampahanipun Kanjeng Raden Penghulu Tafsir Anomingkang Kaping V Sumerep Ing Imogiri tahun 1930¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Serat Pengetan Lampahanipun Kanjeng Raden Penghulu Tafsir Anomingkang Kaping 5 Sumerep Ing Imogiri tahun 1937.

Penghulu di Keraton Kasunanan dan Mangkunegran dalam menjalankan tugasnya sebagai imam masjid agung dibantu oleh kurang lebih 40 orang dengan jabatan dan tugas masing-masing. Jabatan itu meliputi imam, khatib, muadzin, marbot, juru tulis, syuhud (saksi) dan juru kunci. Sebagai imam masjid penghulu bertugas memimpin atau mengimami shalat lima waktu dan shalat Jumat. Selain bertanggung Jawab mengimami penghulu masjid juga bertanggung Jawab dalam mengurus keuangan masjid yang didapat dari biaya perkawinan, zakat, wakaf, dan sedekah infak dari para jamaah umat Islam. Selain dua peran tersebut penghulu juga berperan dalam peringatan upacara yang diselenggarakan Keraton seperti grebeg Maulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar.¹⁰⁷

Peran penghulu dalam bidang keagamaan juga dibuktikan dengan diselenggarakannya shalat hajat pada tanggal 11 April 1939 yang para katib yogiswara telah menyepakati diadakannya sholat hajat¹⁰⁸, serta pada masa penghulu Tafsir Anom V (1933) juga diadakan pengajian yang diadakan di musolla pengulon, dalam pengajian ini mengadopsi sistem santri yaitu dengan sistem pembagian kelas dengan mempelajari Al-Quran dari membaca, menulis serta mempelajari huruf pegon.

Kedekatan penghulu dengan bidang keagamaan dibuktikan pula dengan adanya tempat tinggal khusus yang untuk para penghulu yang berada di sebelah utara masjid agung tepatnya di kampung Kauman. Tata letak rumah

¹⁰⁷ Ibnu Qayim, *Op.Cit*, Hlm, 72-73

¹⁰⁸ Arsip Pelaksanaan Sholat Hajat

penghulu dibuat sedemikian karena menurut tradisi tata kota daerah Keraton Jawa dan tata kota kerajaan Jawa dan Yogyakarta pada khususnya, yakni daerah selatan digunakan untuk istana, dengan sebelah baratnya dibangun alun-alun dengan bersebrangan dengan masjid agung, dan disekitaran masjid Agung (Kauman) dibangun tempat tinggal untuk para agamawan (kiai, penghulu, dan ulama), tata letak seperti ini bertujuan agar para agamawan memiliki kedekatan dengan masjid agung yang dijadikan untuk dakwah menyebarkan agama Islam serta agar memiliki keterdekatan dengan keluarga raja yang bertindak sebagai pemimpin pemerintahan atau umara',serta para ulama lainnya.¹⁰⁹

b. Peran Penghulu Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan masyarakat Islam dengan kurikulum atau mata pelajaran agama Islam. Dapat dijabarkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan proses untuk memperbaiki kehidupan dan ilmu pengetahuan mereka dengan mempelajari agama Islam dengan harapan mereka bisa memperbaiki dan mengarahkan potensi mereka hingga menimbulkan perubahan dan tetap berdampingan dengan nilai-nilai Islam.¹¹⁰

Pendidikan Islam telah dijumpai di Jawa pada masa kerajaan demak (1518-1546), dengan cara mendirikan masjid- masjid di daerah yang strategis

¹⁰⁹ Adnan, *Op, Cit*, Hlm, 5

¹¹⁰ Ahmad Ghazali, 2016, *Konsep Pendidikan Islam Menurut Prespektif Mahmud Yunus*, REKOGNISI, Vol.1, No 2, Hlm., 39.

dengan dikeordinasi oleh para wali, dan guru agama, pendidikan Islam di kerajaan Demak ini dengan cara mubaleg menjadi pembicara utama dengan menyampaikan materi-materi mengenai agama Islam. Kemudian kekuasaan beralih ke Pajang kemudian ke Mataram (1575-1755) pendidikan Islam ini masih bertahan namun masyarakat sudah mengerti apa itu Islam, dan pada masa kerajaan mataram ini masyarakat sudah melakukan pengajian Al-Quran dan kitab-kitab secara rutin bahkan sudah ada beberapa pondok pesantren.¹¹¹ Setelah Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil di Surakarta dan Yogyakarta, pendidikan Islam masih berkembang dan menunjukkan keeksistensianya. Di Kasunanan Surakarta dibangun sekolah mambaul ulum atas prakarsa penghulu Tafsir AnomV dan patih dalem Kangjeng Ario Sosrodiningrat. Usulan itu kemudian di setujui oleh Pakubuwana X dan memberi dukungan penuh terhadap sekolah mambaul ulum ini.

Pendirian sekolah yang berbasis agama Islam ini dilatarbelakangi dengan adanya pengaruh orang eropa yang memasukan budaya barat serta adanya sekolah yang didirikan oleh zending dengan memiliki misi untuk melakukan kristenisasi di kalangan masyarakat Keraton dan sekitarnya. Pendirian sekolah zeanding tersebut membuat sunan resah dan merasa terusik.¹¹² Maka sunan memberi dukungan penuh baik material maupun finansial kepada penghulu Tafsir AnomV untuk mendirikan madrasah dengan tujuan agar sekolah ini maju dan tidak kalah dengan sekolah yang didirikan oleh zending. Pendirian sekolah

¹¹¹ Abdul Gani, 2020, *Sejarah Pendidikan Islam*, Medan, Hlm., 81-82.

¹¹² Kuntowijoyo, *Raja Priyai, Dan Kawula Surakarta*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), Hlm,17.

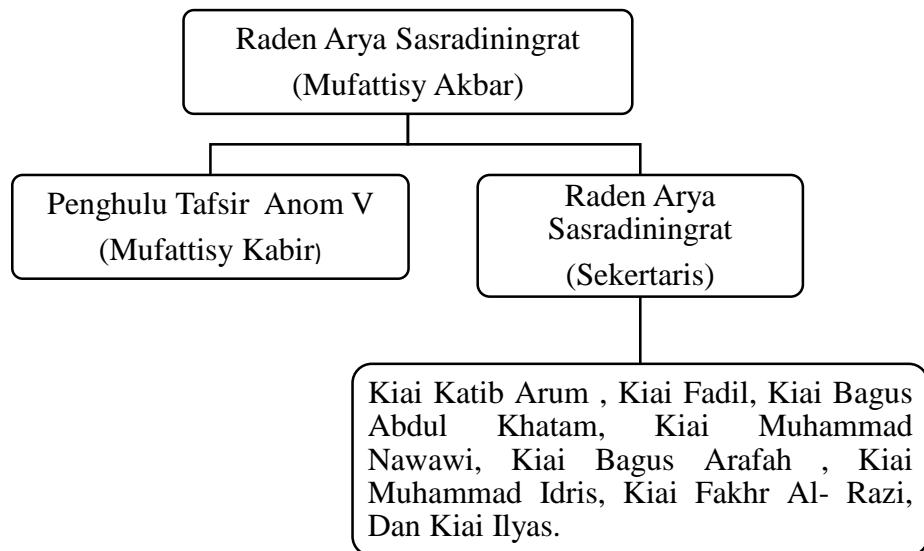
ini merupakan bentuk perlawanan pihak Kasunanan Surakarta terhadap pemerintahan Belanda sebab menurut Staatsblad Van Naderland-Indie 1893 yang isinya pendidikan Islam yang diselenggarakan pemerintahan maupun swasta merupakan hal terlarang dan bisa menimbulkan sanksi dan dicabut izin oprasional sekolahan. Pemerintahan kolonial tidak memberi sanksi karena bisa berakibat menimbulkan sentiment yang lebih besar sehingga pada tahun 1905 membuat ordonasi guru yang mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan mendapatkan izin dari pihak kolonial sebelum melakukan tugasnya sebagai guru agama.¹¹³

Pada 23 juli 1905 didirikan mambaul ulum yang terletak di pawastren masjid agung Surakarta, mambaul ulum berarti sumber ilmu pengetahuan. Mambaul ulum merupakan sekolah berbasis Islam dengan mengadopsi pembelajaran moderen dengan mengubah pendidikan pesantren menjadi sekolah Islam yang disebut dengan madrasah.¹¹⁴ Mambaul ulum sendiri berarti, tenaga alim ulama, katib, naib, paradikan, yang menguasai agama Islam. Madrasah mambaul ulum pada mulanya memiliki 11 kelas, yang terbagi atas 6 kelas tingkat dasar (ibtidaiyah), 3 tingkat kelas menengah (tsanawiyah) dan 2 tingkat atas (Aliyah). Semua sekolahan ini terletak dalam satu gedung. Pada 20 februari 1915 madrasah mambaul ulum ini diresmikan oleh pihak Keraton Kasunanan.

¹¹³ K. Subroto, 2017, *Strategi Snouck Mengalahkan Jihaad Di Nusantara*, Syamina : Edisi 1, Hlm, 26

¹¹⁴ Mulyanto, 2021, *Peran Pakubuwana X Dalam Pengembangandakwah Islam Di Surakarta Tahun 1893-1939*, Mamb'ul Ulum, Vol, 17 No. 1 26-27

ketika didirikan madrasah mambaul ulum memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:¹¹⁵



Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan Madrasah Mambaul Ulum Keraton Kasunanan¹¹⁶

Keterangan:

Ketika didirikan mambaul ulum memiliki struktur kepengurusan yang pertama ada Raden Arya Sasradiningrat sebagai Mufattisy Akbar dengan memiliki tugas mengatur dan menentukan pengelolaan MU (Pembina), kedua ada Penghulu Tafsir AnomV sebagai Mufattisy Kabir yang bertugas sebagai pengelola dan pengurus harian, ketiga ada Raden Arya Reksadipraja sebagai Sekertaris pembina, dan yang terakhir ada dewan guru diantaranya ada Kiai Katib Arum, Kiai Fadil, Kiai Bagus Abdul Khatam, Kiai Muhammad Nawawi,

¹¹⁵ Adnan Basit, *Op, Cit*, Hlm, 6.

¹¹⁶ Adnan, *Op, Cit.*.

Kiai Bagus Arafah , Kiai Muhammad Idris, Kiai Fakhr Al- Razi, Dan Kiai Ilyas.¹¹⁷

Kurikulum dalam proses pembelajaran di mambaul ulum mengkombinasikan antara pengetahuan tentang agama isalm (fiqh,bahasa arab, tarikh dan lain-lain)dan ilmu umum (berhitung, bahasa melayu, ilmu pasti, ilmu Belanda)dengan tetap menjadikan kitab standar sebagai bacaan sehari-harinya.¹¹⁸

Gambar 3.3

Murid- murid yang di terima di Madrasah Mambaul Ulum



Sumber : Biwaddha Nata Surakarta, Wangsaleksana 1936.

Kehadiran madrasah ini banyak menarik para masyarakat terutama para Abdi dalem *pemathakan* atau pegawai *reh pengulon* untuk menyekolahkan anaknya di sekolahan mambaul ulum. Hal ini terbukti pada tahun 1905 sekolah ini telah menampung sekitar 500 siswa. Namun masa keemasan mambaul ulum

¹¹⁷ Abdul Basit,Dan Abdulhayi Adnan, *Prof K.H.R Mohammad Adnan Dan Pemikiranya Dalam Islam*, Hlm., 6-7.

¹¹⁸ Kitab-kitab yang dipelajari di madrasah mambaul ulum diantaranya ada *kitab al-Awamil, al- Ajrumiyyah, 'umiriti Alfiyah, Fath al- Qarib, Fath al-Ma'un, al-Mahalli, al- Jauhar al-Maknun, 'Uqub al-Juman, Talkhis, Sullam, dll*

mulai menurun pada tahun 1942 ketika imperialisme Jepang mulai menguasai Indonesia dan terjadi pergolakan politik menjelang kemerdekaan, bahkan pada tahun 1943-1945 madrasah mambaul ulum mengalami kevakuman karena para santri terfokus pada kemerdekaan Indonesia dan pendanaan dari Kasunan mulai berkurang karena performa Keraton Kasunan yang mulai meredup.¹¹⁹

Penghulu merupakan Abdi dalem Keraton yang dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam bidang agama Islam terutama yang menyangkut hukum syariat Islam, maka dari sinilah penghulu memiliki citra yang sangat bagus di mata masyarakat, sehingga segala perbuatannya akan menjadi contoh masyarakat dengan tujuan untuk menjadi manusia yang beretika dan memiliki budi pekerti yang baik.¹²⁰ Dan untuk dibidang pendidikan di lingkungan Keraton Mangkunegaran didirikan madrasah penghulu yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dengan memasukan unsur Islam dalam kurikulumnya serta untuk mendapatkan calon bakal penghulu yang ahli dibidang agama Islam.

Rencana pembangunan madrasah penghulu yang ada di lingkungan Keraton Mangkunegaran telah diputuskan dan disahkan dalam pertemuan Pangreh Ageng lengkap (Pleno Hoofdbastuurs var gadering) yang merupakan bagian dari Perkumpulan Penghulu Dan Pegawainya (P.P.D.P.) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1939.¹²¹

¹¹⁹ Arif Junaidi, *Op, Cit*, Hlm, 97-98.

¹²⁰ George D Larson, *Masa Menjelang Revolusi Keraton Dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta : UGM Press, 1990) Hlm., 51.

¹²¹ Arsip Madrasah Penghulu, Reksopustaka Mangkunegaran, No. 4729.

Madrasah penghulu terbagi menjadi dua yaitu :

1. Perangan Hoeparanta (Voorbereidende- Afdeeling),
2. Perangan Krida Reh Were (Vak- Afdeeling).

Perangan Hoeparanta masih terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Perangan Heoperanta A.
- b) Perangan Hoeperanta B.

Proses pembelajaran di madrasah penghulu ditempuh selama Sembilan tahun yang terdiri dari 5 tahun untuk sekolah Perangan Hoeparanta dan yang 4 tahun untuk menempuh sekolah Perangan Krida Reh Wara.

- a) Perangan Heoperanta A

Syarat untuk diterima menjadi murid kelas satu di perangan hoeparanta a) yaitu anak laki-laki dengan kriteria :

1. Umur sudah menginjak 15 tahun, tidak boleh lebih.
2. Memiliki ijazah H.I.S. atau sederajat.
3. Memiliki surat berkelakuan baik berbudi pekerti.
4. Bisa membaca al qur'an.
5. Bisa menulis Arab.

Untuk kurikulum di Perangan Heoperanta A meliputi :

75 % mempelajari agama Islam yang terdiri dari :

1. Menulis arab .
2. Bahasa arab.
3. Mempelajari ilmu tajwid.
4. Mempelajari ilmu fikih.

5. Mempelajari ilmu tafsir.
6. Mempelajari hadist.
7. Mempelajari Sejarah Islam.
8. Mempelajari ilmu falaq dan olahraga.

25 % untuk pembelajaran umum, pengetahuan umum di ajarkan untuk mengingat-igat supaya pembelajaran yang telah di dapatkan di sekolahan H.I.S. tidak lupa. Dan bahasa yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan bahasa Melayu.

b) Perangan Heoperanta B.

Murid murid yang diterima di Perangan Heoperanta B yaitu anak laki-laki yang memiliki kriteria :

1. Berusia 15 tahun, boleh lebih.
2. Memiliki ijazah volksschool dan sejenisnya.
3. Memiliki surat bertanda baik budi pekertinya
4. Bisa membaca al qur'an
5. Bisa menulis arab
6. Sudah memiliki pengetahuan agama Islam seperti yang telah dipelajari di sekolah Perangan Heoperanta A.

Kurikulum yang diperoleh di Perangan Heoperanta B meliputi :

25 % mengenai agama pelajaran agama diajarkan supaya tidak lupa dan hilang. Pelajaran itu meliputi : bahasa arab, babad isalm, ilmu falaq, dll.

75% pengetahuan umum menurut ajaran schakelschool hanya di hilangkan pelajaran-pelajaran yang dianggap kurang perlu, seperti menyanyi,

menggambar, dan lain-lain. Dengan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa sehari-hari.

3. Perangan Krida Reh Wara (Vak-Afdeeling).

Murid yang diterima di sekolah Perangan Krida Reh Were (Vak-Afdeeling) harus memiliki syarat :

1. Murid- murid merupakan lulusan dari sekolah Perangan Hoeparata B.
2. Murid- murid yang memiliki ijazah H.I.S. dan sejenisnya dan memiliki pendidikan hoeprata a dan hoeparata b serta berumur 25 tahun, tidak boleh lebih.

Adapun kurikulum yang diajarkan dalam sekolah Perangan Krida Reh Were meliputi :

60% pengetahuan agama Islam, dengan meneruskan pembelajaran agama Islam yang telah didapat di Perangan Heoperanta A, serta ditambah dengan pembelajaran mengenai kewajiban-kewajiban menjadi penghulu, struktur pemerintahan Islam dan Negara, termasuk pengetahuan mengenai organisasi dan system administrasi : nikah, kas masjid, read agama, dan lain-lain, sampai dengan praktiknya.

40 % pengetahuan umum, untuk pengetahuan umum mengadopsi pembelajaran Mulo, selanjutnya dikurangi pembelajaran yang tidak perlu dalam penghulu, serta ditambah dengan pembelajaran tatanan hukum Hindia-Belanda, dasar-dasar pengadilan agama, dasar-dasar hukum adat, serta dasar-dasar pendidikan sosiologi.

Madrasah penghulu memulai pembelajarannya pada jam 8 sampai dengan jam 1 siang, dengan murid-murid yang berasal dari keluarga penghulu dan

terdapat 3 orang dari setiap kabupaten untuk mengirimkan murid-murid yang akan disekolahkan ke madrasah penghulu. Murid- murid yang telah selesai pendidikan penghulu dan dinyatakan lulus mendapatkan tempat sebagai katib sampai seterusnya, madrasah penghulu memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas penghulu dan kedudukan penghulu (positive-regeling).¹²²

c. Peran Penghulu Dalam Bidang Hukum

Penghulu adalah orang yang memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan agama Islam, hukum keluarga, wali hakim, khutbah dan pendidikan agama Islam. Tugas utama seorang penghulu adalah menjadi kepala pengadilan. Dalam tradisi Yogyakarta dan Surakarta disebut dengan *Pengadilan Surambi*, sedangkan di Cirebon disebut dengan pengadilan penghulu.¹²³ sistem pengadilan di karisidenan Surakarta pada abad ke 18 dikuasai oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, mendapat sorotan yang cukup tajam dari pemerintahan Hindia- Belanda karena merupakan bagian terpenting dalam tatanan suatu Negara serta alat untuk mengatur masyarakat.¹²⁴

Karisidana Surakarta pada dasarnya masih mempertahankan sistem hukum yang ada pada waktu kerajaan kartasura (1680-1745), pada awal terbentuknya Keraton Kasunanandan mangkunegraan terdapat tiga peradilan yang di

¹²² Arsip Madrash Penghulu, Reksopustaka Mangkunegaran, No. 4729.

¹²³ Hazmirullah,Dkk, 2019, *The Function And Position Of Penghulu In Raffles' Kitab Hukum Manuscript (1814)*, Jurnal Of Indonesian Islam, Vol.13,No. 1, Hlm, 186-187.

¹²⁴ Sugiarto, *Reorganitaion Of Judicature In Surakarta Resident 1847-1874*, Hlm, 778-779.

berlakukannya untuk menyelesaikan perkara di lingkungan Keraton. Tiga peradilan tersebut terdiri dari :

- a. Peradilan Perdata, merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan politik dan kriminalitas, dengan dipimpin oleh jaksa sebagai penuntut umum.
- b. Pengadilan Balemangu, merupakan pengadilan yang menyelesaikan perkara mengenai permasalahan agrarian dengan dipimpin oleh patih yang bertindak sebagai jaksa
- c. Pengadilan Surambi, merupakan pengadilan yang dilakukan di surambi masjid agung yang didirikan oleh kerajaan. Dalam melaksanakan tugasnya pengadilan surambi dipimpin oleh seorang penghulu yang bertindak sebagai ketua, dan 4 orang yang bertindak sebagai anggota, dalam tradisi Surakarta disebut dengan “ngulama”. Adapun perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan surambi meliputi pesengketaan keluarga, masalah warisan, pernikahan, perceraian, gono-gini, dan wasiat. Selain menangani perkara tersebut, pengadilan surambi juga menangani perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan perdata dan balemangu.¹²⁵

Wiyose jumeneng adile Allah blaka. Agama iku angalahaken saliring padu ing pradata kabeh, agama iku kalindih dening nyumana (dakwaan) kabehta pramanane artine nyata yen mona kapramana kang anandur dewe”. (Keluar dari menegakkan keadilan Tuhan semata. Agama itu menyelesaikan segala hal perkara/konflik, agama itu menjadi dasar dakwaan, dalam seluruh jiwanya. Artinya nyata jika diam dalam pengawasan, yang menanam sendiri).

Lan lamun ana wong anekel anak rabining wong ukume tinanjir (takzir), winirangaken ing pasar cinukur pinerapat ing ngideraken sanake pada angingel-inggel ndase kabeh”, (Dan barang siapa yang menangkap orang berbuat asusila,

¹²⁵ M. Irfan Riyandi, 2021, *Integrasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak Abad XVI M*, ASCARYA, Vol. 1, No. 2, Hlm, 256-257.

maka hukumannya ta'zir (hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa/maksiat). Dipermalukan di keramaian, dipotong rambutnya seperempat. Saat dipermalukan, saudaranya seperti dianiaya kepalanya semua).¹²⁶

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pengadilan serambi yang dipimpin oleh penghulu ageng dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan penghulu Tafsir Anomdat dapat menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan pradata dan pengadilan belamangu. Hal ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian perkara dalam pengadilan surambi dengan menggunakan dasar hukum-hukum Islam dan berdasarkan kitab-kitab agama Islam. Pada masa pemerintahan pakubuwana IV pengadilan surambi diberi tugas untuk melakukan hukuman kisas, seperti yang dijelaskan dalam serat nawala pradata sebagai berikut :

“ *Andene wong padu selaki rabi kanyata wasiyat, waris sapadhane lan raja pati miwah raja tatu ingkang sepi saka sebab, iya pengulu sing ngakimi.* ”

Dari penjelasan serat nawakala pradata dapat diambil kesimpulan bahwa penghulu merupakan jabatan yang sangat berperan penting dalam pengadilan surambi, maka dalam memilih Abdi dalem penghulu harus dilakukan oleh sunan langsung. Dengan adanya hukuman kisas ini maka sunan juga mengangkat beberapa abdi dalem untuk melaksanakan putusan yang telah diputuskan oleh penghulu di pengadilan surambi. Berikut abdi daelm yang dibentuk oleh sunan :

abdi daelm *nirbaya* yang bertugas untuk menangkap penjahat dengan menggunakan alat yaitu tali, abdi dalem *martaulut* bertugas melakukan hukuman kisas yang telah diputuskan oleh pengadilan surambi yaitu memotong leher, Abdi dalem *singanegara*, yaitu abdi daelm yang bertugas untuk melaksanakan

¹²⁶ Ibid, Hlm, 159.

hukuman kisas yang telah diputuskan oleh pengadilan surambi berupa pemotongan leher, kaki, tangan, menyayat, dan menyiksa terdakwa.¹²⁷

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda melahirkan keputusan raja yang dimuat dalam Staatsblad no. 152 yang memutuskan keberadaan pengadilan surambi sebagai badan peradilan yang terikat dengan system kenegaraan, dengan orang Belanda menyebutnya dengan *preisterraacf*, yang memiliki tugas menangani perkara-perkara pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqoh, dan baitul mal, yang bersangkutan dengan syariat agama Islam.¹²⁸ Pada tahun 1931 Belanda mengeluarkan Staatsblads 1931 no 53, staatblaad ini membahas tentang penghapusan salah satu tugas penghulu dalam pengadilan surambi, namun peraturan ini belum sempat terlaksanan karena keterbatasan dana dari pemerintahan kolonial dan adanya reaksi di mayarakat. Sehingga peraturan ini baru terlaksana pada tahun 1937 dengan dibuatnya peraturan yang dimuat dalam staatblaad 1937 no. 116 yang memuat tentang penghapusan salah satu tugas penghulu. Berdasarkan Staatsblad 1937 no. 116 memuat beberapa pasal yang menghilangkan beberapa tugas pengadilan surambi yang pada awalnya dimuat di Staatsblad 1882 no. 56. Pasal staatblaad tersebut berisi tentang :

1. Memberi jalan keluar untuk suami istri (beragama Islam) yang sedang beselisih paham dan membutuhkan orang ketiga untuk mediasi.
2. Menyelesaikan perkara NTCR (Nikah, talak, cerai, rujuk).

¹²⁷ Katno, *Op, Cit*, Hlm, 53.

¹²⁸ Aah Tsamrotul, *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : Liventurindo, 2021), Hlm, 48.

3. Memberi putusan perceraian
4. Menyatakan syarat untuk melakukan talak sudah terpenuhi.
5. Perkara tentang keperluan kehidupan suami istri yang wajib dipenuhi suami.
6. Dengan diberlakukannya *staatblaad* 1937 maka salah satu tugas penghulu di pengadilan surambi menjadi berkurang.¹²⁹

Pada tahun 1942 Indonesia dikuasai oleh Jepang, namun kebijakan-kebijakan dan peradilan masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Belanda, hanya mengubah nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Pergantian nama ini berdasarkan pada aturan peralihan pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 7 Maret 1942 nomer.1 yang disahkan pada tanggal 29 April 1942. Pada masa pendudukan Jepang pengadilan surambi juga pernah terancam yaitu pada tahun 1945 sempat terjadi konflik mengenai bagaimana susunan kepengurusan penghulu setelah kemerdekaan Indonesia dan cara mengurus masjid Keraton, namun perselisihan itu teratasi dengan damai tanpa ada perselisihan antara penghulu dengan pemerintahan.¹³⁰

¹²⁹ Agus Triyanta, *Op, Cit*, Hlm, 59.

¹³⁰ Miftakhur Ridlo, 2021, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kasultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan*, *Asy- Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, Hlm, 161-162.

Gambar 3.2

Suasana sidang di Jawa pada abad ke 20. Sidang dipimpin oleh J.M.Ch.E. Le Rutte (duduk di tengah), dengan terdakwa yang menggunakan baju putih diapit oleh dua saksi yang duduk dilantai, panitra duduk di sebelah ketua sidang (berkerah putih), disebelahnya ada jaksa penuntut (Raden Sujalman) yang didampingi oleh penghulu (menggunakan sorban).



Sumber : media social @mataramroyalblood¹³¹

¹³¹ Media social @mataramroyalblood <https://www.instagram.com/p/CgqaXFirO11/>

BAB IV

PERKUMPULAN PENGHULU DI SURAKARTA

1. Awal Mula Tebentuknya Perkumpulan Penghulu Dan Pegawainya (PPDP) Di Surakarta Pada 1937.

Penghulu Keraton merupakan abdi dalem yang bertugas dalam bidang keagamaan dan hukum syariat Islam, penghulu di dalam Keraton juga disebut dengan abdi dalem pamethakan atau abdi dalem putihan. Para abdidaem penghulu memiliki peran yang cukup penting dalam penyebaran Islam, hukum agama Islam, perayaan hari besar Islam, dll. Pada abad ke 19 penghulu mempunyai peran yang cukup penting dalam masyarakat, hal ini dikarenakan penghulu Keraton Surakarta memiliki wibawa yang cukup berpengaruh dalam masyarakat, sehingga segala tindakan dan ucapan penghulu diikuti oleh masyarakat. Pada abad ke 19 pengaruh yang kuat juga datang dari pihak Belanda yang ikut mencampuri urusan hukum di Indonesia dan berdampak kepada kondisi sosial keagamaan Keraton Surakarta. Puncak ketika Belanda mengeluarkan *staatblads* 1935 yang berisi mengenai pengurangan tugas penghulu dalam bidang mawaris, namun pada tahun 1935 *staatblads* belum bisa terlaksana dan diterapkan karena terkendala dengan dana yang belum memadai.¹³²

¹³² Erfina Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah Dan Konsep Dan Praktik Dipengadilan Agama*, (Jakarta Setara Press, 2016), Hlm 60.

Pada tanggal 19 februari tahun 1937 pemerintah Belanda mulai memberlakukan staatblads 1937 nomor 116 yang berisi tentang pencabutan hak waris dan penerbitan akta cerai. Dengan beralihnya tugas ke pengadilan *landraad* dengan diberi tugas menerbitkan akta cerai dan mengadili perkara warisan. Pertengahan tahun 1937 Belanda juga mencabut salah satu tugas penghulu yaitu mengenai pengadilan mawaris di pengadilan agama, hal ini dikarenakan pihak Belanda menganggap permasalahan mengenai hukum warisan tidak termasuk dalam hukum adat agama Islam serta pihak belanda beranggapan bahwa penghulu tidak ada sangkut pautnya dengan peradilan mengenai hukum warisan. Pencabutan hak waris ini di abadikan dengan adanya staatblads 1937 nomor 116.¹³³ Penerapan staatblads ini bertujuan untuk penyeragaman hukum di Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Penyeragaman hukum ini berakibat menyempit tugas penghulu dalam bidang peradilan dan dalam birokrasi Keraton. Pasalnya penghulu hanya bertugas dalam sistem birokrasi yang ada dalam Keraton dan menjadi penasihat dalam pengadilan perdata gede yang menjadi banding dalam pengadilan surambi.¹³⁴

Dikeluarkanya staatblads 1937 mengakibatkan ruang gerak penghulu menjadi terbatas, maka pada tahun 1937 para penghulu jawa dan Madura membentuk perkumpulan penghulu dan pegawainya (PPDP) atas prakarsa Muhammad Adan dengan memiliki tujuan utamanya yaitu menentang kebijakan

¹³³ Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Jawa Dan Madura*, (Yogyakarta; Tp,1953), Hlm 21.

¹³⁴ Noeh, *Sejarah Peradilan Agama*, Hlm 26.

pemerintah Belanda dengan dikeluarkannya staatblads 1937 nomor 116. Selain itu perkumpulan penghulu juga memiliki tujuan dan memiliki maksud sebagai berikut :

1. *“Memadjockan perasaan menanggoeng jawab dan kesetiaän anggauta - anggautanja , baik didalam dan pada jabalan - mauepoen didalam dan pada ke oelama annja masing – masing”*.
2. *Memperbalikan kepentingan kepentingan anggauta anggautanja dan memperbaiki kedoedoekan mereka iloe , ,, baik di dalam mauepoen di loear djabatana ”* .
3. *Toeroel bekerja memadjockan ketjintaän pada Agama Islamdan kehidoepan menoeroet Agama Islam”* .

Dapat disimpulkan tujuan dan maksud berdirinya PPDP adalah sebagai wadah untuk mengebangkan dan memperjuangkan hak-hak yang ada dalam penghulu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran serta menjadikan para penghulu menjadi solid dalam menjalankan tugasnya sebagai ulama Keraton yang bergerak dalam bidang keagamaan.¹³⁵

Perkumpulan penghulu dan pegawainya melakukan musyawarah pertama kalinya pada tanggal 15 Mei 1937 sampai dengan 18 Mei 1937 yang diselenggarakan di pendopo pangulon Surakarta dengan membahas agenda pokok :

Mengenai perubahan wewenang penghulu di pengadilan agama yang dikurangi peranya dalam mengadili hak waris yang kemudian diganti oleh pihak Belanda dengan membayar penghulu dengan kurun waktu tiga bulan sekali.

¹³⁵ Arip PPDP, yang ditemukan di Rekso Pustaka Mangkunegaran

Pengangkatan penghulu Keraton Kasunanan Surakarta menjadi bagian dari Belanda yaitu menjadi staf pengadilan laandraad dengan mendapatkan gaji setiap bulanya dari pemerintahan Belanda.¹³⁶

Pengangkatan penghulu kedalam penghulu laandrad mengakibatkan para penghulu Keraton Kasunanan maupun Mangkunegaran tidak mendapatkan gaji pensiunan dan pada saat pertemuan penghulu Mansur membacakan surat perintah dari G.f Pijjer mengenai kewenangan penghulu dan penyelesaian hukum mawaris yang semula di pengadilan surambi beralih ke pengadilan landraad, serta menjaga para penghulu agar tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya agar tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh dengan dengan isu-isu yang sedang menerpa para penghulu Keraton. Penarikan penghulu ke dalam pengadilan laandrad dan berdirinya PPDP juga membuat sedikit konflik antra Nadhatul Ulama dengan penghulu. Berita Nadhatul Ulama (BNO) menuduh bahwa penghulu yang masuk kedalam penghulu laandrad merupakan dalang dari penghapusan tugas penghulu dalam menyelesaikan perkara warisan.¹³⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penghulu tidak hanya bergulat dalam bidang keagamaan saja, para penghulu juga memiliki tanggung jawab yang cukup penting dengan sesama muslim yaitu untuk membentuk muslim yang toleran dan

¹³⁶ Ibid...

¹³⁷ Agus Triyanta, *Penghulu Pasca Keluarnya Staatblads 1937 No 116 Kasunanan Surakarta Tahun 1937-1940*. El- Tarikh: Vol 01, No 2, Hlm 61-63.

menjujung tinggi rasa damai. Penghulu juga memiliki target untuk memajukan umat muslim.

Perkumpulan penghulu dan pegawainya juga melaksanakan pertemuan yang kedua yang bertempat di Surakarta, tepatnya di Habipraya, Kota Gedhe. Pada pertemuan tersebut datang beberapa utusan dari Mangkunegaran R.ng. Yosowidagda, dari Kasunanan di wakili oleh K.P.Haryomataram, serta dihadiri oleh menia pers dan 1000 penghulu yang tergabung di PPDP. Dengan membahas tentang kemajemukan para penghulu.

2. Konferensi Penghulu Di Kasunanan Surakarta Dan Keraton Mangkunegraan tahun 1936

Surakarta merupakan kota yang menyimpan banyak sekali kebudayaan dan hasil peradaban, maka tidak heran jika Surakarta memiliki sebutan sebagai pusat peradaban Islam yang terbesar di pulau jawa. Islam berkembang pesat di Surakarta bahkan Islam bisa masuk dan kedalam kerajaan di Surakarta dan menyatu dengan tradisi yang ada di Keraton Surakarta. Dalam struktur pemerintahanya raja juga memiliki peran diantaranya sebagai tokoh politik yaitu mengatur dalam struktur pemerintahanya dan peran di bidang keagamaan sehingga di Surakarta raja memiliki gelar sebagai *Khalifatullah Syaidin Panatagama*. *Khalifatullah Syaidin Panatagama* raja dibantu oleh abdi dalem yang berada di dalam bidang keagamaan yaitu disebut dengan Penghulu dan dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan Tafsir Anom dan dalam tradisi saat ini bisa dikatakan sebagai mentri agama. Penghulu di Keraton

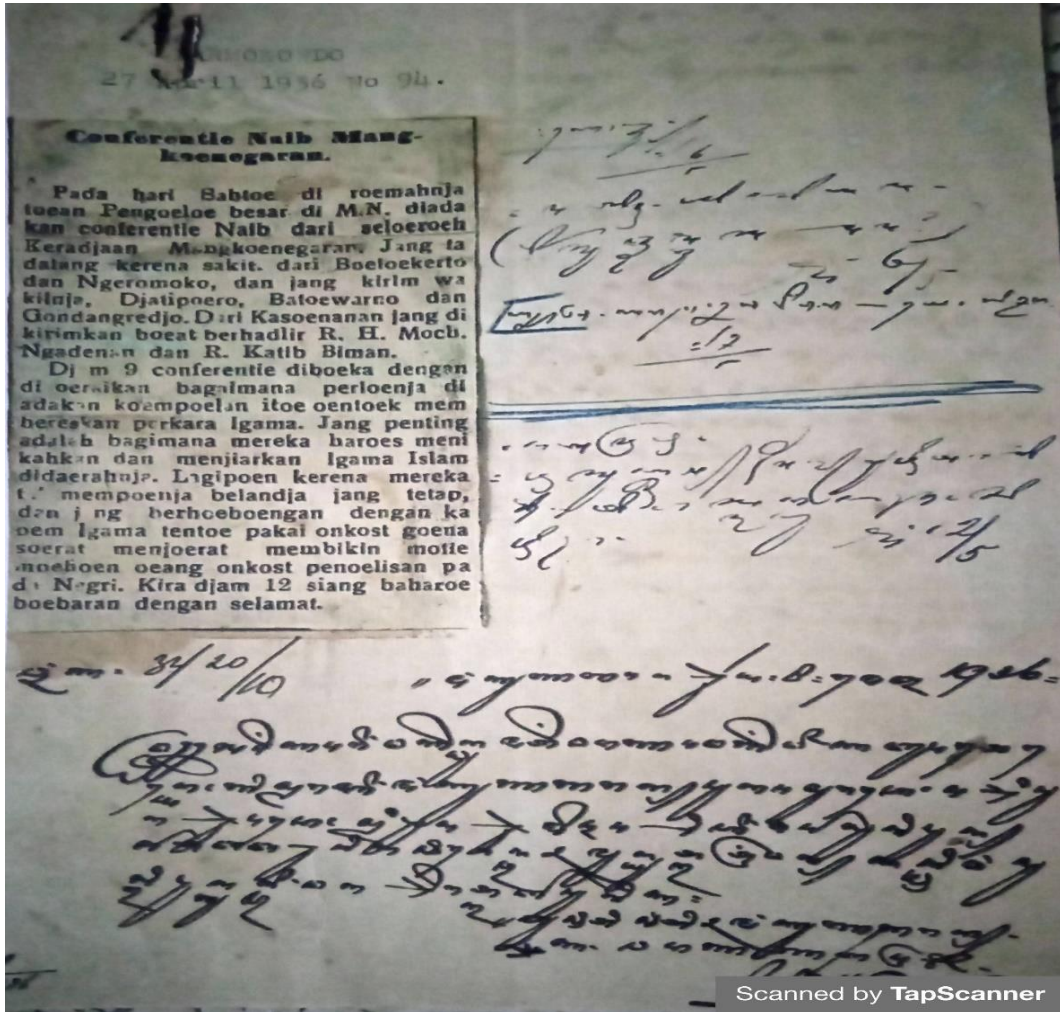
Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran memiliki peranan yang cukup penting diantaranya sebagai pengadilan dalam perkara Nikah, Talak, Cerai, rujuk (NTCR), dakwah, pendidikan dan peradilan surambi yang bertempat di masjid agung baik di Masjid Agung Kasunanan maupun di Masjid Agung Al Wustha Mangkunegaran. Penghulu baik di mangkunegaraan maupun di Kasunanan saling melakukan keordinasi untuk menentukan bagaimana sistem yang akan digunakan untuk memajukan agama Islam agar dapat berkembang dengan pesat di wilayah Keraton Surakarta. Keordinasi ini dilakukan karena Mangkunegaran masih merupakan bagian dari Kasunanan Surakarta.¹³⁸

Perkumpulan penghulu antara penghulu Kasunanan dan penghulu Mangkunegaran sering disebut dengan koferensi atau perkumpulan penghulu Surakarta. Perkumpulan penghulu ini mulai dibentuk pada tahun 1935 oleh Penghulu Tafsir Anon V dan Muhammad Rosidi, pembentukan konferensi ini dilatarbelakangi karena adanya pembentukan staatblads Belanda yang bertujuan untuk mengurangi peran penghulu dalam bidang mawaris. Mendengar hal tersebut penghulu kdua Keraton Surakarta membentuk sebuah perkumpulan yang dimuat dalam surat kabar Darmokondo yang berisi tentang.

¹³⁸ Wawancara Pak Muhtarom Takmir Masjid Agung Surakarta, Pada Tanggal 25 Oktober 2022

Gambar 4.1

Surat kabar yang mengabarkan tentang diadakanya konferensi naib di Mangkunegaran¹³⁹



Pada hari sabtu tanggal 25 April 1936 diadakan konferensi naib yang bertempat di rumah Penghulu Besar, Mangkunegaran. konferensi Naib ini dihadiri oleh beberapa daerah yang berada dibawah kekuasaan Mangkunegaran, diantaranya: ada perwakilan dari Djatipoero, Batoewarno, Gondanrejo, dan dari

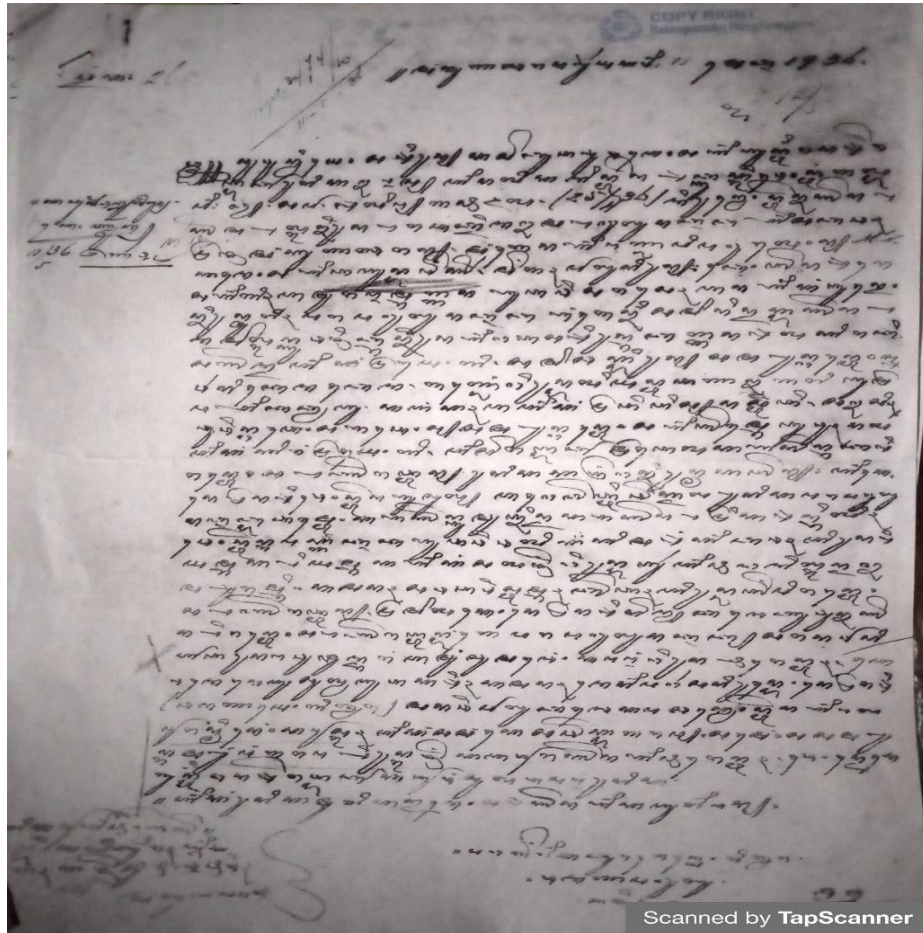
¹³⁹ Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

Kasunanan diwakili oleh R. H. Moch Ngadenan dan R. Katib Biman. Namun dalam pertemuan ini ada beberapa daerah yang absen atau yang tidak menghadiri konferensi tersebut dikarenakan sakit. Konferensi dibuka jam 9 dengan memaparkan pentingnya diadakan kumpulan penghulu yaitu untuk membereskan persoalan agama Islam. Dalam konferensi ini juga dibahas mengenai tugas penghulu (menikahkan dan menyiarkan agama Islam didaerahnya serta penarikan biaya untuk membuat surat pernikahan mengingat belanja atau gaji penghulu pada saat itu tidak tetap sehingga dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan penarikan uang kepada orang yang sedang melakukan akad nikah. Tepat pukul 12.00 pertemuan berakhir dengan selamat.¹⁴⁰ Konferensi pada taun 1936 juga di perkuat dengan adanya surat dari Mangkunegaran VII yang menyatakan bahwa telah diselenggarakan konferensi di pendopo Mangkunegaran, berikut surat dari pihak Mangkunegaran selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi tersebut.

¹⁴⁰ Darmokondo Conferentie naib Mangkunegaran pada tanggal 27 April 1936

Gambar 4.2

Surat dari mangkunegaran yang berisi tentang telah dilaksanakan konferensi penghulu yang bertempat di pendopo Mnagkunegaran.¹⁴¹



Sumber: arsip surat penyelenggaraan konferensi penghulu

Konferensi penghulu diadakan setiap tahunnya, dengan membahas tentang peran penghulu di Keraton, bagaimana sistem yang baik digunakan untuk berdakwah, bagaimana cara regenerasi penghulu di Keraton dan bagaimana pendidikan agama Islam di Keraton yaitu dengan mendirikan sekolah yang

¹⁴¹ Arsip yang ditemukan di perpustakaan reksa pustaka Mangkunegaran.

berbasis agama Islam dengan tujuan untuk mencetak generasi ulama atau penghulu Keraton yang ahli dalam bidang agama. Para penghulu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran saling berkoordinasi untuk memajukan agama Islam di dalam Keraton. Para penghulu saling membuat ide-ide untuk membuat IslamSurakarta maju tanpa adanya konflik dan saling adu argument. Hal ini dilakukan karena keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan merupakan satu kesatuan dimana pada kenyataanya Keraton Mangkunegaran masih merupakan bagian dari Kasunanan walaupun Mangkunegaran sudah diberi hak otonom tetapi untuk gaya dan sistem pemerintahan masih cenderung ke Kasunanan.¹⁴²

3. Dampak Diadakan Konferensi Bagi Penghulu Dan Masyarakat Konferensi

Perkumpulan penghulu yang diadakan oleh Keraton surakarta dan Kadipaten Mangkunegran pada tahun 1936, memiliki dampak yang positif bagi penghulu dan masyarakat. hal ini disebabkan karena Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran masih satu trah, mengingat kadipaten Mangkunegaran masih bagian dari Keraton Kasunanan surakarta yang saat itu Sinuhun Pakubuwana yang ke II harus mebagi dengan Pangeran Sambernyawa setelah mengakhiri penyeranganya. Walaupun Keraton Kasunanan dan mangkunegraan berbeda namun sistem masih mengikuti gaya Keraton

¹⁴² Wawancara Pak Muhtarom Takmir Masjid Agung Surakarta, Pada Tanggal 25 Oktober 2022.

Kasunanan surakarta. memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat maupun penghulu sendiri. Diadakan konferensi ini membuat kondisi keagamaan menjadi lebih maju, misalnya dalam pengelolaan masjid yang semula dilakukan oleh beberapa marbot dengan adanya konferensi ini membuat struktur kepengurusan yang lebih tertata dengan tugas masing-masing, kemudian dalam cara menyebarkan agama Islam juga lebih berdamai dengan cara yang ringan dan mudah diterima di masyarakat. Konferensi ini juga membahas tentang bagaimana sistem pendidikan yang akan digunakan di Keraton Kasunanan maupun Kadipaten Mangkunegran, di Keraton Kasunanan berdiri sekolah agama Islam yang di beri nama Mambaul Ulum dengan mengadopsi sistem pembelajaran agama Islam dan bertujuan untuk mencetak ulama-ulama yang ahli dalam bidang keagamaan, sama halnya dengan Kasunanan Surakarta di Kadipaten Mangkunegran juga didirikan sekolah penghulu dengan diberinama Madrasah Penghulu yang sistem pembelajaran sama dengan Keraton Kasunanan surakarta.¹⁴³

Selama diadakan konferensi ini penghulu menerima dengan baik dan antusias, hal ini dikarenakan diadakan konferensi ini menjadi ajang untuk bertukar pikiran antara penghulu di wilayah surakarta untuk memajukan wilayah mereka dengan sistem kebijakan yang sama. Untuk masyarakat surakarta menerima dengan baik diadakan konferensi ini, hal ini dibuktikan dengan

¹⁴³ Wawancara Pak Muhtarom Takmir Masjid Agung Surakarta, Pada Tanggal 25 Oktober 2022

banyak masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah mambaul
ulum maupun sekolah penghulu yang ada di lingkungan Keraton.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penghulu merupakan pejabat keagamaan yang berperan dalam bidang keagamaan . penghulu di keraton Kasunanan dan keraton Mangkunegaraan merupakan suatu jabatan yang dipertahankan dari kerajaan islam terdahulu yaitu dari Mataram, Pajang, Kasunanan sampai dengan Mangkunegaraan. Struktur penghulu ini terus dipertahankan hingga ke kerajaan Islam yang ada di Jawa dikenal dengan *abdi dalem pamethakan* dengan diwadahi lembaga yang bernama panggulon. Hingga pada abad ke 19 yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Hermen Wiliem Deandeles masih mempertahankan struktur jabatan penghulu Namun pihak kolonial mengenal nama penghulu dengan nama yang berbeda yaitu dengan nama *opper priester* dan *chiefs priest*. *Priester* dan *priest* sendiri memiliki arti sebagai pejabat agama Islam

Struktur jabatan penghulu terus dipertahankan mengingat penghulu memiliki wibawa yang cukup tinggi untuk menarik simpatisan masyarakat. Penghulu di keraton kasunanan surakarta dan kadipaten memiliki peranan yang cukup penting yaitu dalam bidang keagamaan penghulu berperan sebagai pendakwah, pengelolaan masjid, kemudian acara besar yang berhubungan dengan agama Islam, dalam bidang pendidikan penghulu juga

berperan sebagai tenaga pendidiki dalam sekolah yang penghulu dirikan, dan dalam bidang hukum penghulu berperan sebagai *qadi* yaitu membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum *munahakat* serta menyelesaikan perkara yang yang berhubungan dengan agama Islam. Pengadilan yang dipimpin oleh para penghulu disebut dengan pengadilan surambi yang bertempat di surambi masjid agung. Proses Pengangkatan Penghulu Keraton Kasunanan Dan Mangkunegaran Pada awal kemunculanya yaitu di kerajaan demak dilakukan dengan cara Pemberian , penujuksn secara langsung oleh raja atau "*Tauliyah*, Pada tahun 1930 jabatan penghulu tidak lagi ditunjuk oleh raja melainkan diwariskan kepada putra dari penghulu. Sedangkan untuk proses pengangkatan untuk Proses Pengangkatan Para Staf Penghulu Pada tahun 1894 yang menambah proses pengangkatan penghulu harus menyertakan biodata pribadi, pendidikan, dan silsilah keluarga baik dari pihak pria maupun wanita. Pada tahun 1930-1945 proses pengangkatan penghulu mengalami perubahan yaitu diwajibkan untuk menempuh pendidikan penghulu dan dinyatakan lulus. Syarat menjadi penghulu beragama muslim yaitu sehat jasmani rohani, tidak berurusan dengan hukum, tidak memakai candu, bisa membaca dan menulis bahasa arab, menguasai kitab-kitab fikih dan kitab yang telah ditentukan.

Penghulu tidak mendapat gaji, para penghulu hanya diberikan tanah lungguh yang kemudian para penghulu kelola bersama masyarakat dengan hasil dibagi kepada masyarakat serta digunakan untuk pembiayaan dakwah para penghulu untuk menuju daerah terpencil yang ada di wilayah surakarta.

Selain itu seorang penghulu harus memiliki pengetahuan lebih dibidang keagamaan Panatagama di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran memiliki 4 mazhab yaitu terdiri dari Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah (hukum), Mazhab Syafei (fikih), Mazhab Imam Ghazali (akhlak tasawuf), dan yang keempat kehidupan keagamaan dan politik tidak berbenturan dengan Keraton dalam konteks kekinian tidak berbenturan dengan Keraton dan dengan Negara. Untuk menghindari benturan-benturan yang diakibatkan dari luar maupun dari dalam maka kedua Keraton di Surakarta sering mengadakan pertemuan atau konferensi yang di mulai tahun 1936 yang pada saat itu terjadi konflik antara penghulu dengan Belanda tentang pencabutan pengadilan hak waris di kalangan penghulu yang kemudian para penghulu mengadakan pertemuan di pendopo mangkunegran yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Kasunanan.

Pertemuan tersebut membahas tentang kerordianasi dalam bidang dakwah serta biaya adminitrasi yang harus dibayarkan oleh kedua calon pengantin mengingat pada saat itu penghulu tidak memiliki gaji untuk membayar adminitrasi. Kenferensi ini terus dilakukan setiap tahunnya dengan pembahasan berbeda-beda dengan tujuan memajukan agama Islamdi Keraton. Para penghulu dan masyarakat menyabut dengan baik dengan adanya konferensi ini karena para penghulu dapat menciptakan ide-ide yang bagus untuk di publis dimasyarakat agar masyarakat bisa merasakan ketentraman dengan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat memajukan masyarakat.

B. Saran

Ungkapan rasa syukur dan ucap Alhamdulillah penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih banyak kurang dan masih belum sempurna, walaupun telah di maksimalkan oleh penulis. Besar harapan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca dan untuk penulis sendiri.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik daris segi manapun, maka dari itu penulis penulis perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kebaikan penulisan berikurtnya.

Daftar Pustaka

Arsip

Arsip Pelaksanaan Sholat Hajat di Mangkunegaran

Arsip Pendirian Madrasah Penghulu Di Mangkunegaraan 1937

Arsip Staatblad 1937 No. 116

Arsip surat izin mengadakan konferensi yang ditemukan di Perpustakaan Rekso
Pustoko Mangkunegaran,

Perkumpulan Penghulu dan Pkerjanya (P . P . D . P) Tahun 1937

Serat Darmokondo, Conferentine Naib Mangkunegaran, 27 April 1936

Serat Pengetan Lampahanipun Kanjeng Raden Penghulu Tafsir Anom ingkang
Kaping V Sumerep Ing Imogiri tahun 1930

Buku

Aah Tsamrotul, 2021, *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung :
Liventurindo.

Abdul Aziz, 2006, *Politik Islam: Pergaulan Ideology Ppp Menjadi Partai Islam*,
Yogyakarta : Tiara Wacana.

Abdul Basit,Dan Abdulhayi Adnan, *Prof K.H.R Mohammad Adnan Dan
Pemikiranya Dalam Islam*.

Abdul Gani, 2020, *Sejarah Pendidikan Islam*, Medan.

Abdullah Idi, 2019, *Politik Enisitas Hindia Belanda: Dilemma Dalam Pengelolaan
Keberagaman Entis Di Indonesia*, Jakarta : Prenandamedia Group.

Ahmad Najib Burhani, 2010, *Muhammadiyah Jawa*, Jakarta: Al-Wasat Publising
House.

- Arif, Akhmad, 2012, *Penafsiran Al-qur'an Penghulu Kraton Surakarta Intertekstik dan Ortodoksi*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang
- Clifford Geertz, 1985, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Kebudayaan Jawa*, Depok : Komunitas Bambu.
- Dr. H.J. De Graaf dan Dr. TH. G. TH. Pigeaud, 1985, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa*, Jakarta: Grafiti Press.
- Dr. H.J.. De Graaf dan Dr. TH. G. TH. Pigeaud, 1985, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa*, Jakarta: Grafiti Press.
- Kuntowijaya, 2013, *Metodelogi Sejarah* , Yogyakarta: Tiara wacana.
- Kuntowijoyo, 2004, *Raja, Priyai, Dan Kawula Surakarta*, Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo, 2008, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, 2013, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- M. Hari Mulyadi, 1999, *Runtuhnya Kekuasaan Keraton Alit (Studi Radikalisme Social Wong Solo Dan Kerusakan Mei 1998 Di Surakarta)*, solo: Lptp.
- M.C. Ricklef, 2013, *Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangannya Dari Tahun 1930 Sampai Sekarang*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Martono, Sumarsaid, 1985 , *Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasihini, 2012, *sarekat Islammencari ideology 1924-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusponegoro, Ma'mun, dkk, 2007, *Kauman , Religi, Tradisi, dan Santri*, Surakarta : Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman.
- Qoayim, Ismai, 1997, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press.
- S. Margana, 2010, *Keraton Surakarta Dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010.

Supariadi,2017, *Dinamika Kehidupan Religius Era Kasunanan Surakarta*, Jakarta: Litbangdiklat Press.

Syaifudin zuhri, dkk, 2009, *Gerakan Wahabi Di Indonesia (Dialog Dan Kritik)*, Yogyakarta: Bina Harfa.

Syamsul Bakri,2015, *Gerakan Koloniasme IslamSurakarta 1914-1942*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Takashi shirishi,1997, *Zaman Bergerak*,Jakarta : Grafiti.

Ter,Haar, 1960, *Asas-Asas Hukum Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Prandja Paramita.

Jurnal

Adaby,Ahmad, 2004 , *Ulama Jawa Dalam Prespektif Sejarah*, Humaniora, Vol. 6 No.01

Ahmad Ghozali, 2016, *Konsep Pendidikan IslamMenurut Prespektif Mahmud Yunus*, REKOGNISI, Vol.1, No 2.

Ahmad, 2015,*Peradilan Agama Di Indonesia* , YUDISIA,Vol 6, No. 2.

Amelia Fauziah, 2003 , *Antara Hitam dan Putih:Pengulu pada Masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.10 No.02, Hlm 180-181.

Anton Haryono, 2015, *260 Tahun Kasultanan Yogyakarta*.

Fadillah,Amir, 2011 , *Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren di Jawa*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 08 No. 01.

Fauziah,Amelia, 2003 , *Antara Hitam dan Putih:Pengulu pada Masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.10 No.02.

Hasyim,Muhammad , 2005 , *Potret Penghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian*, Wacana, Vol. 7 NO. 5

Hazmirullah,Dkk, 2019, *The Function And Position Of Penghulu In Raffles' Kitab Hukum Manuscript (1814)*, Jurnal Of Indonesian Islam, Vol.13,No. 1.

Hermanu Soebagjo,2015, *Politik Symbol Kasunanan, Sejarah Dan Budaya*, Vol 9 Nomer 2.

Kurnia Mery, 2018 , *Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan* karya, Beranda, Vol. 7 No, 1.

M. Irfan Riyandi, 2021, *Integrasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak Abad XVI M*, ASCARYA, Vol. 1, No.2.

Megi Saputa, 2018, *Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta*, Al-Ahwal, Vol 11, No.2.

Miftakhur Ridlo, 2021, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kasultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan*, Asy- Syari'ah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No.2.

Sugiarto, *Reorganitaion Of Judicature In Surakarta Resident 1847-1874*.

Syamsul Bakri, 2018, *Surakarta Bergerak (Rekontruksi Sejarah Pergerakan Di Surakarta Awal Abad Ke 20)*, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, Vol 31, N0 2.

Zakiyuddin Baidhawy, 2010, *Dinamika radikalisme dan konflik bersentimen keagamaan di Surakarta*, Studi Philoshophica Et Theologica, Vol. 10 No. 2.

Skripsi

Nur Lufika Muhibah, 2018 , *Peran Penghulu Mangkunegaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro ke-VII tahun 1916-1944* , (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Yeni Dwi Ayu Paramitha , 2013 , *Abdi Dalem Penghulu Pada Masa Pemerintahan Pakubuwono X Kraton Kasunanan Surakarta (1893-1939)* , (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Triyanta, Agus, 2018 , *Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya Staatsbled 1937 NO. 116 Kraton Surakarta 1937-1940*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Internet

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/koferensi.html> Arti Kata Konferensi-kamus besar Indonesia (KBBI) Online

[https : //id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada 10 juni 2021

[https : //kbbi.web.id](https://kbbi.web.id). Penghulu arti kata penghulu – kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) Online diakses pada tanggal 10 juni 2021

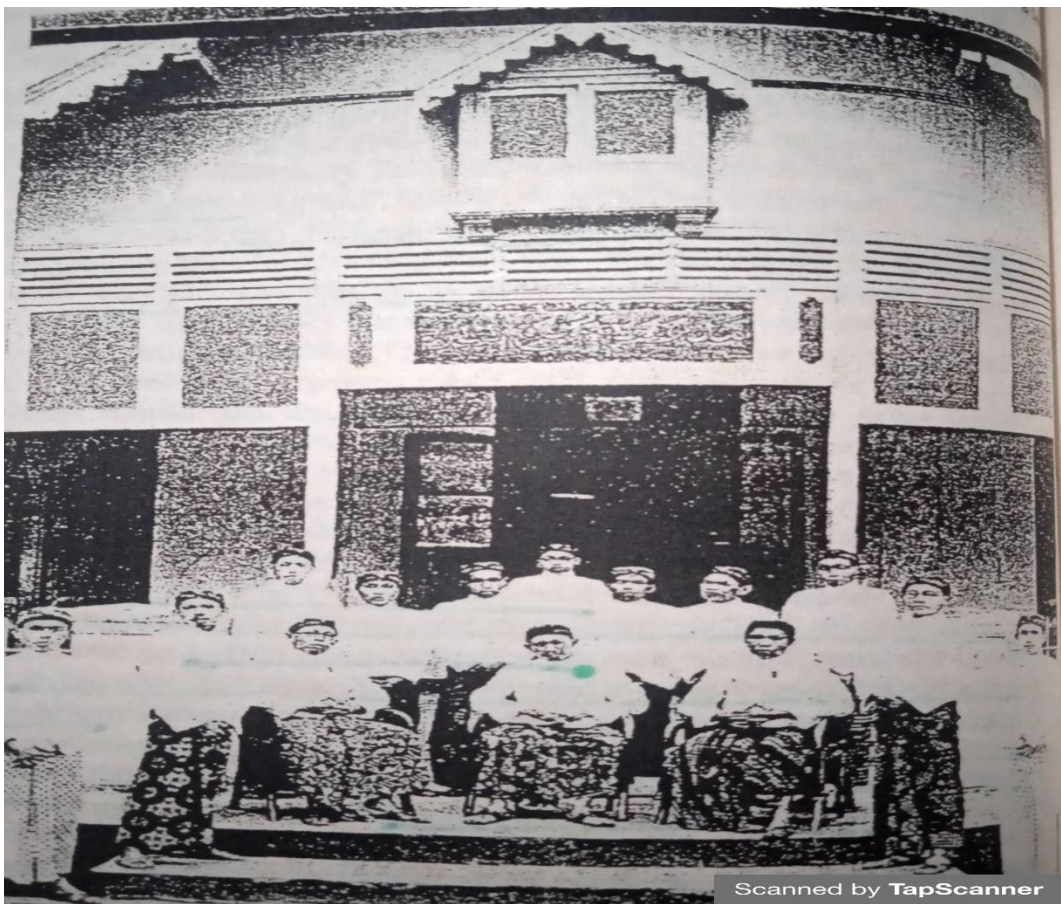
[https : // kbbi.web.id/mentaltas](https://kbbi.web.id/mentaltas) dikses 10 juni 2021

Wawancara

Bp. Muhtarom selaku pengurus Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta

LAMPIRAN









SURAT KETERANGAN
Nomor : 078/MAS. 20-23/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Masjid Agung Surakarta menerangkan bahwa :

N A M A : FARISKA DWI PURBANINGRUM
N I M : 183231020
PROGRAM STUDI : Sejarah Peradaban Islam
FAKULTAS : Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri RM. Said Surakarta
SEMESTER : 9

Nama tersebut telah mengadakan, **Penelitian dan mencari data untuk menyusun Skripsi dengan judul " PENGHULU-PENGHULU KARATON PERAN DAN KOFERENSI DI BIDANG HUKUM AGAMA, DAN PENDIDIKAN DI KASUNANAN MANGKUNEGARAN TAHUN 1936 – 1945 "**

Demikian harap maklum dan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 25 Oktober 2022



Ketua

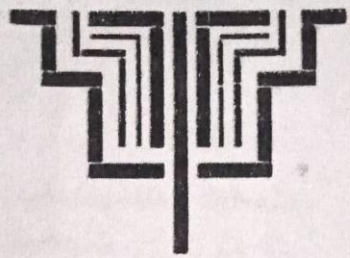
[Signature]
W. AROM, M.Pd.I, M.SI

1000000000
P/2015

1 0.40

PEDOMAN P.P.D.P.

MENERANGKAN SENDI-DASAR DAN
ASAS TOEDJOEAN PERHIMPOENAN
PANGHOELOE DAN PEGAWAINJA
DENGAN PENDAHOELOEAN KETE-
RANGAN DARI ASALNJA ADA PER-
HIMPOENAN SEKERDJA. BEDANJA
DENGAN P. P. D. P. -



Uitgave:
HOOFDBESTUUR P. P. D. P.
SOERAKARTA.
Kantoor: Kaoeman — Solo.

TAKA"

3

Rechtspersoon G. B. 4 Januari 1939 No. A 43/1/41.

MUEQADDIMAH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ.
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ * أَمَّا بَعْدُ

Menoeroet pengalaman dan pendengaran, ternjatalah oleh kita Hoofdbestuur P. P. D. P., bahwa ke - P. P. D. P. - an kita oleh „orang loear”, diterangkan atau difahamkan berbeda-beda jang satoe dari pada jang lain. Setengahnja ada jang „tjotjok”, ada jang „hampir tjotjok”, dan ada poela jang sama sekali „tidak tjotjok” dengan nafsijah P. P. D. P. jang sebenarnja.

Soenggoehpoen hal jang demikian itoe loemerah belakadanya, tetapi terpikirlah oleh kita Hoofdbestuur, bahwa keterangan tentang— dan faham dari pada ke - P. P. D. P. - an kita jang berbeda-beda itoe, moengkinlah akan menjebabkan keragoe-ragoean orang ramai terhadap pada P.P.D.P. kita dan, dengan pendek dikata, dapatlah akan menimboelkan lebih banjak moedharat dari pada manfa'at bagi P. P. D. P. kita adanja

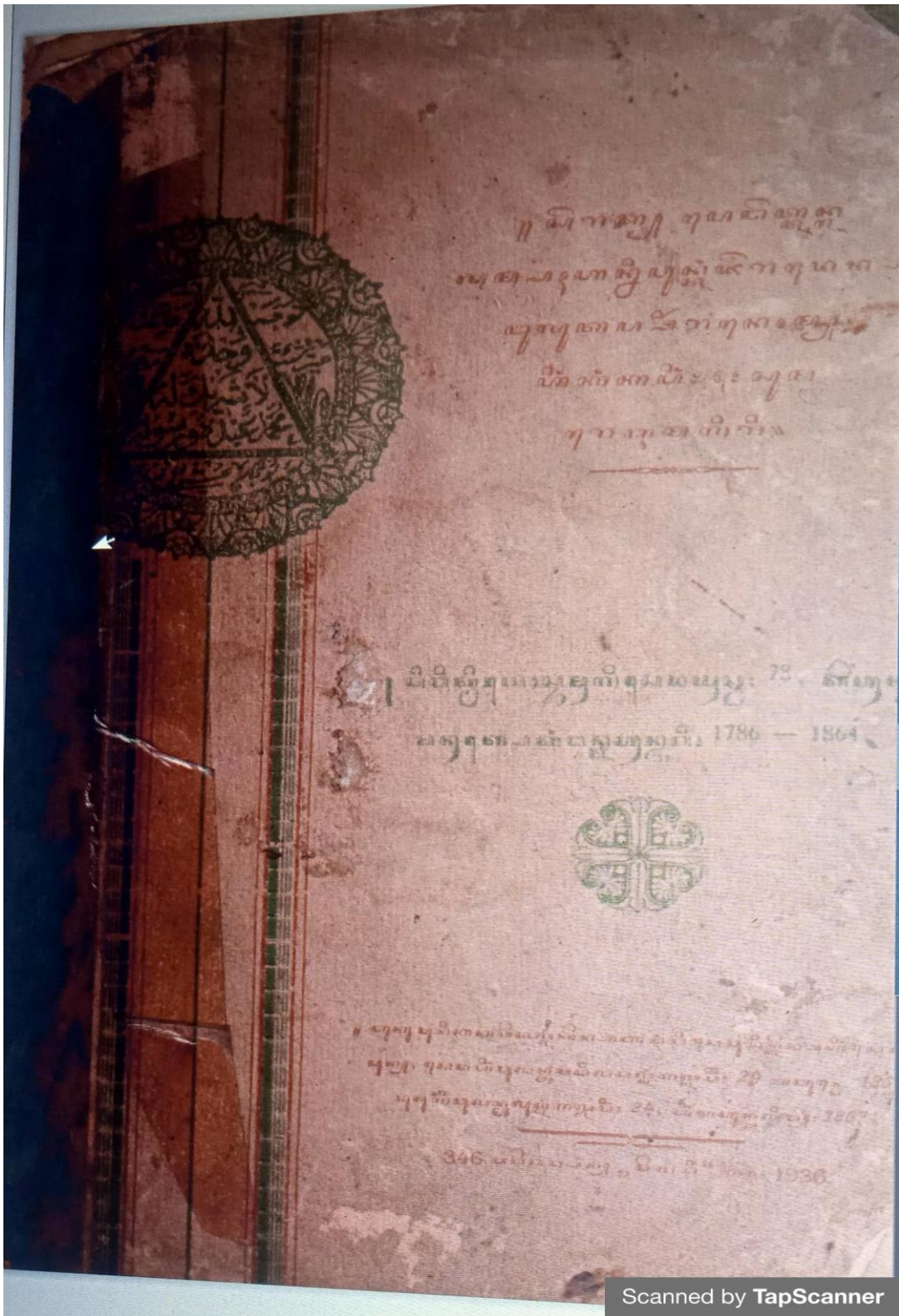
Itoelah soeatoe 'aqibat jang sama sekali tidak diharap oleh P. P. D. P. kita!

Di dalam hal ini perloelah djadinja kita Hoofdbestuur: „bersedia pajoeng sebelom keboedjanaan”. Perloelah djadinja kita Hoofdbestuur menentoeakan: „Pedoman P. P. D. P.” akan goena menjetop adanja keterangan tentang— dan faham dari pada ke - P. P. D. P. - an kita jang berbeda-beda itoe.

Oentoeak keperloean itoe, kita Hoofdbestuur telah mempersilahkan Adviseur P. P. D. P. kita, saudara M. Moesa 'l Mahfoeld, merentjanakan: „Boekoe Pedoman P. P. D. P.” itoe. Setelah rentjana itoe kita periksa, kita permoesjawaratkan masak-masak dan kita ambil kepoetoesan tetapnja, lalqelah kita terbitkan dan inilah woedjoednja.

Boekoe ini dimaksoed boeat oemoem, baik „orang-dalam” maepoen „orang-loear.” Maka perloelah tiasa

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner

Surat
No. 270.

Lampiran: 1.-

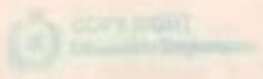
Sangkaran, 20 April 1979.-

Mari ngatoeraken pethikan swaton
pandapeek koela wewarah salat-kadjad.

Keswoen wijosipoen, hangtutokaken sawesdhalem babandey
kampungandhalem Rangdjeng Soesti Pangiran Achipati sarana isje-
man, nalika koela katimbalan ngandhikan ing ngarsadhalem ing
soerja kaping 11 April 1979, hasareng poenika koela ngatoere-
ken 1 lembar pethikan swatnwis ingkang minangka swaton panda-
peek koela wewarah salat-kadjad dhalah wahoesnipoen, poenapa
dhéné pandapeek koela ingkang makoten wahoe sampoen dhipoen
soefahati dhéning para prikantje ketib Jogiswara.

Inkang poenika megi handhadhewaken ing kahoeningen
sana ranoeng tjoerndong ing sakaparengipoen laréntah.-

Pengagenging kabupaten Jogiswara,
Wadhana Tangaloe,
Wg. H. Inanrossidhi.



Sampoen katjotjogaken,
Mantri kabupaten Hamongpradja,

Boegi katoer
ing pandjenerganipoen Kjahi Loerah
ingkang pilenggah Rangdjeng Boepati-Patih
ing Sangkoenagaran.

RANTJANGAN BADE HADHEGIPOEN MADRASAH PANGOLOE
TOEWIN PERANGANING WOELANGAN INGKANG
BAROE.

Sampoen kahsanaken wonten ing parepatanipoen Pengraih Hageng
L.angkay (Pleno Hoofdbestuursvergadering) saking Pakampalan
Pangoloe Dhalag Poenggawanipoen (P.P.D.P.) ing Hindia-Walan-
dhi, wonten ing Tawangmangoe kala soerja kaping 25 December
1939.

Madrasah Pangoloe poenika kaperang dhados kalih perangan hageng,
kadosta:

- I. Perangan Hoeparanta (Vorbereidende-afdeeling).
- II. " Krida-Rbb-Wara (Vek-afdeeling).

Perangan Hoeparanta kaperang malih dhados kalih, inggih poenika:

1. Perangan Hoeparanta A.
 2. " Hoeparanta B.
- Dhene dhangcening peminahan wonten ing Madrasah Pangoloe poenika,
toekrap perangan Hoeparanta B taheon, Krida-Rbb-Wara 4 taheon, gosunggoeng
dhados 2 taheon.

PERANGAN HOEPARANTA A.

Moerid2 ingkang katampi wonten ing klas I ing perangan Hoeparanta
A poenika larb2 djaler ingkang:

1. Cempokipoen sampoen djangkay 15 taheon, boten langkoeng.
2. Hanguadahi diploma H.I.S. oetawi ingkang kasemekaken poenika.
3. " serat pratanda sahning boedhi-pakertinipoen.
4. Sagad mahos Qoeran.
5. " njerat Arab.

Dhene woelangan ing perangan HOEPARANTA A. poenika wonten kalih war-
ni, kadosta:

- I. Ingkang 70% Kawroeh Agami Islam, inggih poenika:

a. njerat Arab; b. Basa Arab; c. Wiwitanipoen kawroeh Tadjwid; d. Parama-
sutra Arab toewia sapanoenggilanipoen; e. Kawroeh Kalam (Tauhid); f. Ka-
wroeh Pakih; g. Kawroeh Tafsir; h. Kawroeh Coedhis; i. Kawroeh Kasocilan;
j. Kawroeh Babad Islam; k. Kawroeh Falaq; l. Celah rega.

- II. Ingkang 25% Kawroeh Oemoem. Namoeng kangge andjagi, soepadhos
kawroeh2 ingkang perloe2, ingkang sampoen kawoelangaken wonten ing H.I.S.
oetawi sasaminipoen poenika, sampoen ngantos hitjal. Dhene basa Priboemi
(Vek Landstaal) ingkang dhipoen hangge bakoe: basa Malajoe.

PERANGAN HOEPARANTA B.

Moerid2 ingkang katampi wonten ing klas I ing perangan Hoeparanta
B. poenika larb2 djaler ingkang:

1. Cempokipoen sampoen djangkay 15 taheon, boten langkoeng.
2. Hanguadahi diploma Volksschool oetawi sasaminipoen poenika.
3. " serat pratanda sahning boedhi-pakertinipoen.
4. Sagad mahos Qoeran.
5. " njerat Arab toewin.

Sampoen hanggadahi kawroeh Agami Islam, kirang-langkoeng kadhos woelangan
ingkang sampoen kawoelangaken wonten ing perangan Hoeparanta A. kasbcet
nginggil.

Woelangan ing perangan HOEPARANTA B. poenika oegi kaperang dha-
dho: kalih warini:

- I. Ingkang 25% Kawroeh Agami Islam. Namoeng kangge andjagi, soepadhos kaw-
roeh-kawroeh ingkang perloe2, ingkang sampoen kaliharb2 para moerid saking
sadjawining perangan HOEPARANTA B. poenika, sampoen ngantos hitjal, kanti
dhipoen wewahi woelangan:
a. Basa Arab; b. Wiwitanipoen kawroeh Babad Islam; c. Wiwitanipoen Kawroeh
Falaq; d. Celah rega.

- II. Ingkang 75% Kawroeh Oemoem. Manost woelangan Schakelschool, namoeng ka-
het dhipoen hitjal woelangan ingkang kirang perloe, soepaminipoen: menjanji,
hanggaber toewin sapanoenggilanipoen. Basa Priboemi (Vek Landstaal) ing-
kang dhipoen hangge bakoe: basa Malajoe.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

1937 No. 116 RECHTSWEZEN. PRIESTERRADEN. GODSDIEN-
STIGE RECHTSpraak. INLANDSCHE BOE-
DELKAMERS. REGLEMENTEN. Voorloopige
voorzieningen omtrent de in het reglement op de
godsdienstige rechtspraak opgenomen bevoegdheids-
afbakening tusschen wereldlijken en godsdienstigen
rechter.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN
NEDERLANDSCH-INDIË,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!

doet te weten:

Dat Hij, in afwachting van de inwerkingtreding van Hoofdstuk I van het Reglement op de godsdienstige rechtspraak, de benoeming van voogden en de Inlandsche boedelkamers op Java en Madoera, vastgesteld bij de ordonnantie van 31 Januari 1931 (Staatsblad No. 53), de noodige voorzieningen willende treffen om de in dat reglement opgenomen bevoegdheidsafbakening tusschen wereldlijken en godsdienstigen rechter reeds thans te kunnen invoeren;

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord en in overeenstemming met den Volksraad;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel I.

Het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 No. 24 (Indisch Staatsblad No. 152) wordt aangevuld als volgt:

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Fariska Dwi Purbaningrum
Tempat dan Tgl. Lahir : Klaten, 16 Juni 1999
Nama Ayah : Sugiman
Nama Ibu : Sumirah
Asal Instansi : UIN Raden Mas Said Surakarta
Alamat : Gedangan, Gembegan, Kalikotes, Klaten
Email : fariskadwi99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD N 1 Gembegan : Lulus 2012
SMP N 5 Klaten : Lulus 2015
MAN 2 Klaten : Lulus 2018
UIN Raden Mas Said Surakarta : 2022

C. Pengalaman Organisasi

Wakil ketua karang taruna Dusun Gedangan : 2020-2022